



**MENGURAI KERUMITAN
KASUS SAMBO**

**PEMANGKASAN
HONORER BIKIN PUSING
TUJUH KELILING**

**TANAMKAN JIWA
PRODUKTIF
LEWAT GSMP**

**KETAHANAN PANGAN
INDONESIA DIAKUI
DUNIA INTERNASIONAL**

**PENGHARGAAN
UNTUK DAERAH
PENGHASIL BERAS**

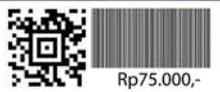
**MENTERI BIKIN
GADUH SOAL
GANDUM**

**SIAPKAN IKON
BARU KOTA
TANGERANG
SELATAN**

KAPOLRI DIUJI KAPOLRI TERUJI

**MEMBANGUN SDM
UNGGUL KEBUTUHAN
IKN NUSANTARA**

**TINGKATKAN
PERLINDUNGAN
PEKERJA
MIGRAN
NTB**



Rp75.000,-

info indonesia iNOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000

*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



**JALAN MPR III NO. 5B KELURAHAN CILANDAK BARAT,
KECAMATAN CILANDAK, JAKARTA SELATAN (12430), TELP 021-27812397**

PENDIRI

Usman Rizal, Rizky Darmawindra

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM

Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN

Zulfahmi Jamba

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

REDAKTUR PELAKSANA

Rusdiyono, Rahmad R

REDAKTUR

Raden Mohd Solehin, Andyanto,
Rahmad R, Rusdiyono,
Benni Martha Daya, Yuliani

REPORTER

Desi Wulandari, Anugrah Dany, Rifky Ilmi,
Pras Budi Prasetya,
Ahmad Yani, Yuni Watiana,
Mario Ananta, Rahmad KR, Iwan Fals,
Henri Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina
Iskandar, Jifran, Boyke Parningotan Hutapea
(Bekasi), Dian Taresa (Kalimantan Tengah),
Zaki (Kalimantan Timur),
Basri (Kalimantan Utara), Lalu Suparman
Abakti (Nusa Tenggara Barat), Abu Bakar
Usman (Kepulauan Bangka Belitung)

EDITOR & GRAFIS

Al Amin, Achiles

TATA LETAK

Sujatmiko

MEDIA SOSIAL

Haidir Ali

KEUANGAN

Dra Nurhamida

SEKRETARIS REDAKSI

Ega Tri Agustini

PENGEMBANGAN BISNIS

Kiki Ibrahim
RM Solehin

DISTRIBUSI

Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT

A/N : PT. Wahana Multimedia
BCA : No Rek : 553-041-4321
KCP Otista Jakarta Timur

LEBIH

Lebih, bukan berlebihan. Memang terkait tema Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia: Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

Tema itu jelas berkaitan dengan tantangan mendesak yang kita hadapi sebagai bangsa dalam dua tahun terakhir. Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 dan dampaknya terhadap kehidupan negara-bangsa ini secara keseluruhan.

Bertolak dari tantangan itu, tercermin negara dan warga hendaknya bekerja sama mempercepat pemulihan kondisi di semua lini kehidupan. Sekaligus bangkit untuk menghadapi tantangan global.

Sisi ideologis pun melekat dengan tema itu. Bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara dan rakyat bekerja sama menghadapi segenap tantangan dalam naungan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. "Dasar-dasar negara yang menuntun kita untuk bersama pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa Indonesia maju," begitulah keterangan resmi Pedoman Identitas Visual 77 Tahun Kemerdekaan Indonesia.

Nah, salah satu pengertian tema adalah pengaturan atau setting dan pembentukan suasana pada aktivitas atau tempat. Dalam pengertian itu maka peringatan HUT ke-77 Proklamasi hendaknya bersuasana sesuai dengan temanya.

Akan lebih bermakna jika tema itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari warga yang memetik manfaat dari kebijakan penyelenggara negara. Kebijakan di segenap lini pemerintahan. Entah itu kebijakan di bidang pendidikan, di bidang hukum dan keadilan, tenaga kerja, dan bidang-bidang lain yang mencakup nama-nama kementerian dan lembaga.

Jika ada lembaga bernama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, maka hendaknya kebijakan-kebijakan itu memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nama-nama kementerian itu menjadi pilihan mengingat tantangan mendesak yang selaras dengan tema HUT ke-77 Proklamasi itu. Tentu bukan berarti kementerian dan lembaga lain kurang penting.

Toh memang tak mungkin memuaskan semua warga. Bukan hanya Indonesia yang menghadapinya. Negara lain pun demikian. Namun, perbandingan demi perbandingan akan selalu muncul menjadi fakta. Tinggal lagi, bagaimana warga yang tak puas itu hanya segelintir kecil saja.

Selanjutnya, bagaimana kebijakan menghadapi ketidakpuasan itu? Mengabaikan apalagi menekan warga yang tidak puas karena jumlahnya kecil tentu saja bukan pilihan praktis maupun ideologis yang ideal. Justru kebijakan represif berlebihan banyak meninggalkan catatan dampak memantul yang melemahkan penyelenggaraan negara. Dirgahayu Indonesia, semoga lebih cepat mencapai kemajuan di segala bidang. ●

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
● TELP 021-791 96781 ● FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id



DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
AGUSTUS
2022



6 INFO UTAMA

Sudah sejak 10 Juli 2022 pemberitaan kasus Irjen Ferdy Sambo menjadi perhatian publik. Kunci penyelesaiannya adalah memahami kerumitannya. Jawabannya memang pilihan berganda.



20 INFO SUMSEL

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengapresiasi Sumatera Selatan dan Jawa Barat yang terus mendorong UMKM dengan menampilkan berbagai produk daerah.



24 INFO TANGSEL

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengumumkan secara terbuka Sayembara Desain Bundaran Maruga ke seluruh arsitek di Indonesia di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Senin (1/8/2022). Bundaran Maruga akan dijadikan sebagai ikon di wilayah termuda di Provinsi Banten itu.

70

INFO TEKNOLOGI

Porsche Indonesia kembali hadir di pameran otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-29 di International Convention and Exhibition Center di Bumi Serpong Damai (ICE BSD City), 11-21 Agustus 2022.





34 INFO KALIMANTAN TIMUR

Terpilihnya Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan berkah sekaligus peluang besar. Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi sudah menyiapkan langkah strategis untuk menangkap peluang besar itu dengan membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas.



64 INFO POLITIK

Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura bertekad untuk kembali ke Parlemen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berbekal pengalaman pengurus dan kader, Hanura memulai langkah dengan mendaftarkan diri sebagai partai peserta Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).



74 INFO ISTANA

Pemerintah Indonesia percaya diri mampu menjaga ketahanan pangan di tengah kondisi krisis pangan global akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

- 3 DARI REDAKSI
- 18 OPINI
- 28 INFO BEKASI
- 30 INFO NTB
- 38 INFO NUSANTARA
- 42 INFO NASIONAL
- 50 COVER STORY
- 56 INFO SOSOK
- 58 INFO EKONOMI
- 78 INFO SPORT
- 82 INFO WISATA
- 86 INFO SELEBRITI
- 86 INFO KHUSUS
- 98 KAJI





MENGURAI KERUMITAN KASUS SAMBO

Sudah sejak 10 Juli 2022 pemberitaan kasus Irjen Ferdy Sambo menjadi perhatian publik. Kunci penyelesaiannya adalah memahami kerumitannya. Jawabannya memang pilihan berganda.

Informasi tentang kasusnya sudah melimpah ruah. Namun karena melimpah ruah itu pula tampak muncul pemahaman yang terpisah-pisah.

Toh persoalan yang tampak terpisah-pisah itu sebenarnya terjalin secara utuh. Yang terpisah-pisah itu adalah pribadi Ferdy Sambo, keluarganya, yang bersambung dengan institusi Kepolisian Republik Indonesia, dan karena itu mau tak mau memiliki implikasi politik karena menyangkut penyelenggaraan negara.

Yang pertama tentu saja pemicu awalnya, yakni terbunuhnya Brigadir J yang bernama lengkap Nofriansyah Yosua Hutabarat, seorang polisi berpangkat jauh lebih rendah namun berada di lingkungan dekat Sambo, se-

orang jenderal polisi berbintang dua. Brigadir J diketahui tewas pada Jumat, 8 Juli 2022, petang hari.

Satu bulan setelah Brigadir J tewas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan penetapan Sambo sebagai tersangka. Menurut Kapolri ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan.

"Tim khusus Polri menemukan peristiwa penembakan terhadap saudara J (Brigadir J) hingga meninggal dunia yang dilakukan saudara RE (Bharada E) atas perintah FS (Ferdy Sambo)," tegas Listyo saat konferensi pers di Mabes Polri, Selasa 9 Agustus 2022.

Kemudian, lanjut Listyo, untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak

menembak, Ferdy Sambo melakukan penembakan dengan senjata milik Brigadir J ke dinding berkali-kali agar terkesan seolah terjadi tembak menembak. "Terkait apakah saudara FS menyuruh atau terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak terkait," kata Listyo.

Kapolri Listyo mengemukakan, pada Senin, 8 Agustus 2022 Polri telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Saudara RE, RR dan saudara KM. Selanjutnya, Selasa pagi, 9 Agustus 2022 berlangsung gelar perkara. Alhasil Tim Khusus (Timsus) penanganan kasus ini menetapkan FS sebagai tersangka.

Kapolri sudah mengungkapkan bahwa perubahan kronologi kejadian juga berasal dari keterangan yang berubah dari Bharada E atau Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kapolri mendengarkan langsung cerita Bharada E soal kejadian yang sebenarnya.

Kronologi yang disampaikan adalah soal Bharada E melihat Sambo dan Brigadir J yang terkapar. Tamtama Polri itu hanya mengatakan tidak melihat penembakan, kemudian Sambo menyerahkan senjata kepadanya.

"Saya tanya kepada Richard, 'Kenapa waktu itu kamu sampaikan kamu yang menembak?' Alasannya, waktu itu dia takut, ada tunangan dan segala macam," ujar Sigit.

Karena pernyataannya seperti itu, Kapolri menyerahkan Bharada E kepada penyidik untuk mengisi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disumpah. Jenderal bintang empat itu melihat tamtama itu belum terbuka semuanya dan masih labil.

Bharada E kemudian mendapat kesempatan untuk berdoa dan lebih tenang. Setelah itu ia menuliskan kronologi penembakan Brigadir J. Tulisan tangan Bharada E yang tertuang dalam BAP antara lain, dia menembak atas perintah dan Ferdy Sambo juga ikut menembak.

Perintah pembunuhan itu disampaikan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling III setelah kembali dari Magelang. "Dia menulis tangan. Nulis tangannya lama, enam jam," kata Sigit.

Bharada E sebagai tersangka dijerat

dengan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP. Selain itu, Brigadir Ricky Rizal dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Selanjutnya, kepolisian menetapkan pula istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi sebagai tersangka.

berikan keterangan singkat kepada awak media.

Didampingi salah satu anaknya dan kuasa hukumnya, Arman Hanis, Putri datang ke Markas Brimob dengan maksud menjenguk Ferdy Sambo. Namun, keinginan Putri Candrawathi meli-



drawathui sebagai tersangka. Putri sempat muncul di depan publik. Ia terekam berada di depan Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, pada Minggu malam, 7 Agustus 2022

Saat itu dia berniat menemui suaminya, Ferdy Sambo, yang ditempatkan di sel khusus di Mako Brimob. Putri saat itu tampak menangis ketika mem-

hat Ferdy tak terpenuhi.

Bu Putri tampak berusaha menguatkan diri berbicara di depan kamera para pemburu berita. "Saya Putri, bersama anak-anak, saya memercayai dan tulus mencintai suami saya," katanya.

"Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini, dan saya ikhlas memaafkan segala

• INFO UTAMA

perbuatan yang kami dan keluarga alami,” tutur Putri Candrawathi saat itu.

Pada awal kasus penembakan Brigadir J terkuak, Putri mengaku sebagai korban pelecehan seksual. Setelah penyelidikan penembakan Brigadir J berlangsung, Putri meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Meski begitu, menurut Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Putri kurang kooperatif dalam memberikan keterangan. Meski sudah dua kali bertemu dengan LPSK, Putri tidak memberi keterangan

mad Taufan Damanik, pemeriksaan terus tertunda karena Putri beralasan masih syok. “Itu harus kita hormati, bukan berarti kita membiarkan berlama lama, enggak, kalau nanti kita pertimbangkan ini akan pengaruhi tahapan tahapan pemeriksaan,” ujar Taufan di Kantor Komnas, Kamis, 11 Agustus 2022.

Pada kesempatan berbeda, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan akan melibatkan Komnas Perempuan dalam pemeriksaan Putri. Namun, dia juga mengata-

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, berdasarkan pemeriksaan dua laporan tersebut tidak terbukti kebenarannya. “Berdasarkan hasil gelar perkara tadi, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana,” jelas Rian di Mabes Polri, Jumat, 12 Agustus 2022.

Usai penghentian proses penanganan dua laporan tadi, Tim khusus Polri menetapkan Putri Candrawathi sebagai tersangka pembunuhan



apa pun. “LPSK merasa, ya memang kurang kooperatif ibu ini,” ujar Hasto, Rabu, 10 Agustus 2022. LPSK pun menegaskan akan membatalkan permohonan perlindungan yang telah diajukannya Putri jika tetap tak kooperatif.

Sedangkan Komnas HAM yang ikut dalam penyelidikan penembakan Brigadir J sejak awal menyatakan rencananya ingin memeriksa Putri. Meski begitu, toh hingga Putri ditetapkan menjadi tersangka, pemeriksaan oleh Komnas HAM tertunda.

Menurut Ketua Komnas HAM Ah-

kan Putri belum dapat mengonfirmasi waktu pemeriksaannya. “Khusus Ibu PC (Putri Candrawathi) dihandle oleh teman teman Komnas Perempuan, dan juga komisioner Sandra,” kata Beka.

Di sisi lain, setelah Ferdly Sambo menjadi tersangka, Polri menghentikan penanganan dua laporan terkait pembunuhan Brigadir J. Pertama, laporan tentang kasus pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada Putri Candrawathi. Kedua, laporan tentang rencana pembunuhan Bharada E yang akan dilakukan oleh Brigadir J.

Brigadir J. Kepala Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan penetapan status tersangka itu setelah dilakukan gelar perkara, dan Polri menemukan temuan baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. “Setelah melakukan gelar perkara, kami menetapkan saudari PC sebagai tersangka,” tutur Agung di Mabes Polri, Jumat, 19 Agustus 2022.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigjen Andi Rian menambahkan, penetapan PC sebagai tersangka

setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali. Ia menyebutkan rekaman CCTV yang ditemukan polisi menjadi petunjuk.

Menurut Andi, dalam rekaman CCTV tersebut menggambarkan peristiwa sebelum, sesaat, hingga sesudah peristiwa pembunuhan Brigadir J. "Alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian di Duren Tiga itu berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik," kata Andi di Bareskrim Polri, Kebayoran

perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua," jelasnya.

Info lebih gamblang datang dari Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Ia menjelaskan, Putri Candrawathi berada lantai tiga rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Jalan Saguling III, Duren Tiga, sesaat sebelum peristiwa penembakan dilakukan.

Saat itu, di rumah pribadi tersebut, Ferdy Sambo bertanya kepada Briпка Ricky Rizal alias Briпка RR dan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, sanggup tidak untuk mengeksekusi Brig-

"Mengajak berangkat ke Duren tiga bersama RE, RR, KM, almarhum J. Mengikuti skenario yang dibangun oleh FS," ungkap Agus.

Putri Candrawathi juga disebut bersama Ferdy Sambo saat menjanjikan uang kepada Bharada RE, Briпка RR, KM agar menutup mulut penembakan itu. Bharada E yang mengeksekusi Brigadir J, dijanjikan uang Rp 1 miliar.

Sedangkan Briпка RR dan KM masing-masing dijanjikan akan diberi Rp 500 juta. "(Putri) bersama FS saat menjanjikan uang kepada RE, RR, dan KM,"



Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Agustus 2022.

Andi menerangkan barang bukti rekaman CCTV tersebut menjadi salah satu dasar penetapan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus ini. "Inilah yang menjadi bagian dari circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC (Putri Candrawathi) ada di lokasi sejak di Saguling sampai Duren Tiga dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari pada

adir J. "(Keberadaan Putri, red) ada di lantai tiga saat Ricky dan Richard ditanya kesanggupan untuk menembak almarhum Yosua," kata Agus, Sabtu, 20 Agustus 2022.

Kemudian Putri Candrawathi mengajak Brigadir Josua, Briпка RR, Bharada E, dan KM ke lokasi kejadian: Kompleks Polri, Duren Tiga, Pancoran Jakarta Selatan. Ajakan Putri tersebut, kata Agus, guna mengikuti skenario busuk yang disusun Ferdy Sambo untuk menghabiskan nyawa sang ajudannya, Brigadir J.

kata Komjen Agus Andrianto.

Dengan begitu, sudah lima tersangka yang terungkap. Ini kasus pidana yang melibatkan Ferdy Sambo, istri, keluarga, dan rumah tangganya. Jadi proses hukum yang menjadi solusinya. Biarkan proses hukum pula yang mengungkap motif pembunuhan Brigadir J.

Tapi, memang ada jalinan Ferdy Sambo dan keluarga dengan institusi kepolisian, juga penyelenggaraan negara. Ini yang menimbulkan pilihan berganda. ●

DARI KELUARGA KE PENYELENGGARAAN NEGARA

Temuan baru menjembatani masalah pribadi ke persoalan institusi. Terjalin melalui urusan keluarga.

Jadi, sepuluh hari setelah penetapan tersangka Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuwat Ma'ruf, berlangsung pelimpahan berkas perkaranya ke Kejaksaan Agung. Itu setelah Tim Khusus (Timsus) Polri yang menangani pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J telah menyelesaikan pemberkasannya.

"Penyidik dan Timsus ini bekerja maraton terutama kepada empat tersangka yaitu FS, KM, RR dan RE secara maksimal melengkapi pemberkasannya. Terhadap keempat tersangka ini penyidik insyaallah, selesai rilis ini, akan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan," kata Inspektur Pengawas Umum Polri Komjen Agung Budi Maryoto, Jumat,

19 Agustus 2022.

Pelimpahan berkas ini memang baru tahap pertama sebagaimana dikemukakan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian. "Empat berkas perkara tersangka sebelumnya yaitu FS, RR, RE, dan KM hari ini akan kita laksanakan pelimpahan ke kejaksaan Tahap I untuk nanti akan dipelajari oleh teman-teman Jaksa Penuntut Umum," ungkapnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengakui Kejagung menerima berkas pelimpahan berkas perkara Tahap I dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada hari itu, Jumat, 19 Agustus 2022, pukul 14.30 WIB. "Kami sudah menerima berkas tersangka FS, REPL,



RRW, KM," kata Ketut Sumedana.

Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 340 juncto 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP. Selanjutnya, Jaksa Peneliti (Jaksa P-16) akan meneliti berkas perkara dalam waktu empat belas hari untuk menentukan apakah berkas perkara dinyatakan lengkap atau belum secara formil maupun materiil atau P.18.

"Selama dalam penelitian berkas perkara, dan untuk mengefektifkan waktu yang diberikan oleh Undang-undang, Jaksa Peneliti akan melakukan koordinasi dengan penyidik guna mempercepat penyelesaian proses penyidikan," kata Ketut Sumedana.

Ia menjelaskan, jika berkas perkara itu dinyatakan lengkap, maka Kejagung bakal menerbitkan formulir P21 dan siap untuk disidangkan. "Tahapnya kalau terjadi kekurangan berkas perkara, berarti akan diterbitkan P19," sambungnya.

Setelah berkas rampung dan terbit formulir P21, kata Sumedana, proses

masuk ke tahap kedua, yaitu penyerahan barang bukti, berikut tersangka. Ketut melanjutkan, dia berharap proses ini lekas rampung dengan mempercepat penyelesaian perkara melalui koordinasi efektif dan intensif.

"Maka dari itu harapan daripada kita untuk mempercepat penyelesaian perkara adalah dengan koordinasi efektif dan intensif antara penyidik dan Penuntut Umum, karena perkara ini menarik perhatian masyarakat," tandasnya.

Maka 14 hari setelah penyerahan berkas tahap pertama, setidaknya hingga September 2022, penyidik akan menunggu pemeriksaan berkas oleh jaksa. Apabila dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan pelimpahan tahap II yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka untuk disidangkan.

Sejauh ini, polisi belum menunjukkan kepada publik barang bukti terkait empat tersangka itu. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengemukakan alasan tim khusus tidak menunjukkan barang bukti terkait kasus pem-

bunuhan Brigadir Nofriyansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Menurut Komjenn Agus, barang bukti untuk kepentingan pembuktian di persidangan. "Bukti, kan, untuk pembuktian di persidangan. Langkahnya, kan, pro justisia," kata Agus, Sabtu, 20 Agustus 2022.

Menurut dia, barang bukti akan diserahkan setelah jaksa mendalami kelengkapan berita acara pemeriksaan (BAP) yang diajukan penyidik. Dalam pendalaman itu, sambungnya, penuntut umum bakal menguji keterangan saksi dan tersangka. Termasuk kesesuaian keterangan antara para tersangka dengan alat bukti yang ada dalam BAP.

Selanjutnya, kata eks Kabaharkam Polri ini, isi BAP menjadi dasar pengajuan tuntutan hukum terhadap para tersangka yang menjadi terdakwa. "Jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutan hukum di persidangan," ungkap Agus Andrianto.

Toh Agus pernah mengemukakan, masing-masing tersangka memiliki per-



• INFO UTAMA

an berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E. "RE melakukan penembakan korban," ungkapnya.

Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.

merlukan waktu yang sama, 10 hari, maka penyerahan berkasnya ke Kejaksaan akan berlangsung pada akhir Agustus 2022.

Ada faktor keluarga Brigadir J juga sebenarnya dalam penetapan Putri sebagai tersangka. Tiga hari sebelum penetapan Putri sebagai tersangka, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mendorong Mabes Polri

lakon keberpura-puraan itu atau Obstruction of Justice itu atau permufakatan jahat juga, maka saya minta tadi kepada pejabat utama polri segera jadikan tersangka pasal 55 56 jo 340 338 351 ayat 3," kata Kamarudin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.

Ia mengemukakan, kesabaran pihak kuasa hukum dan kliennya telah habis karena Putri Candrawathi tak kunjung meminta maaf. Padahal, nama baik Brigadir J telah tercemar karena tuduhan pelecehan seksual tersebut. Ini terkait laporan palsu soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kliennya.

"Saya bilang kesabaran kita sebagai penasihat hukum sudah selesai, sampai jam 24.00 WIB tadi malam maka kita minta supaya orang yang terus menggali kebohongan itu segera tersangka, demi kepastian hukum dan keadilan," jelasnya.

Lebih lanjut, Kamarudin menuturkan pihaknya telah berdiskusi dengan pejabat utama Mabes Polri di Bareskrim Polri. "Ada banyak tadi. Termasuk Kabareskrim, ada Dirtipidum. Ada beberapa lah. Intinya kami minta dia harus tersangka karena saya sudah mau tolong tapi dia nggak mau tolong. Kalau ibu Putri mau ditolong dia harusnya ngomong sama saya atau ngundang saya untuk bicara sama dia. Dan menyingkirkan orang-orang yang mendoktrin dia untuk melakukan kejahatan," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam sebuah unggahan di akun Facebook milik tante Brigadir J, Roslin Emika, ia membuka sebuah isi chat atau pesan yang dikirim Putri Candrawathi kepada Brigadir J.

Roslin mengunggah tangkapan layar chat dari Putri Candrawathi kepada Brigadir J di hari ulang tahunnya. Isi pesan chat WhatsApp tersebut dikirim menggunakan bahasa Inggris. Putri Candrawathi mengatakan beruntung memiliki ajudan seperti Yosua atau Brigadir J.

"Ini adalah pesanku di hari ulang tahunmu. Hari ini berharap apapun yang kamu inginkan akan segera terakumulasi. Aku juga berharap apa yang kamu mau membawa kebahagiaan. Dan aku bersyukur memiliki kamu sebagai pengawal, teman, dan keluarga." terjemahan



Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana



Kamarudin Simanjuntak

Nah, pada hari yang sama dengan penyerahan berkas empat tersangka ke Kejaksaan, isteri Ferdy Sambo menjadi tersangka berikutnya. Jika pemberkas Putri sebagai tersangka me-

menetapkan istri mantan Kadiv Propam Irijen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi menjadi tersangka.

"Karena ibu PC tak mau menyesali perbuatannya, tetapi dia tetap pada

isi chat dari Putri Candrawathi.

"Kamu sungguh staf yang baik. Berharap ulang tahun ini akan menjadi sebaik kamu. Selamat ulang tahun, pengawal terbaikku SUA," lanjut isi chat yang diduga ditulis dan dikirimkan Putri Candrawathi kepada Brigadir J tersebut.

Dalam keterangan unggahannya tersebut, Roslin Emika pun mengaku sakit hati karena dalam isi chatnya, Putri Candrawathi justru terlihat seperti menganggap Brigadir J sebagai anak sendiri, dan tak menyangka Putri Candrawathi dan keluarganya justru menuduh Brigadir J melakukan hal tak senonoh.

"Apalah arti semua pemberian dan ucapan ini nakku klo kamu hanya dijadikan sebagai penyelamat bagi mereka tapi kamu nggak berharga Dimata mereka tubuhmu disiksa,ditembaki dengan dalih apa ni sehingga kamu mendapatkan penderitaan yang begitu tragis nya Kamu dianggap sebagai anak dan ajudan yg terbaik," tulis keterangan unggahan Facebook Roslin Emika, Kamis, 4 Agustus 2022.

"Tapi mana buktinya semuanya hanya manis di bibir Klo memang dari hati yang paling dalam perkataan ini kami mohon buat Bu Putri berikan kesaksian yang jujur karena anda ada di TKP agar Roh anak kami tenang jangan sampai darah nya menjerit kepada Tuhan untuk meminta keadilan," lanjut keterangan tersebut.

Persoalan keluarga Brigadir J juga menjadi jembatan yang menghubungkan Sambo sebagai pribadi dan keluarga serta rumah tangganya dengan persoalan institusi. Antara lain keterangan dari Kamarudin bahwa tabungan Brigadir J dikuras habis Irjen Ferdy Sambo. "Ada HP, ATM-nya di empat bank, dan laptop bermerek ASUS," ungkap Kamarudin, Selasa, 16 Agustus 2022.

Tak tanggung-tanggung, Kamarudin menyebut ada uang tabungan senilai Rp200 juta yang ditransfer ke salah satu tersangka. Hal itu dilakukan usai nyawa Brigadir J melayang. "Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi. Masa orang mati mengirimkan duit. Dari rekening almarhum mengalir ke tersangka 200 juta," ungkapnya

Kamarudin juga sempat menyinggung keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang seharusnya ikut membongkar dugaan aliran dana yang mengalir di antara Ferdy Sambo dan para ajudannya yang terlibat. Ia mempertanyakan keterlibatan PPATK dalam kasus kematian kliennya. Ini tak terlepas dari aliran dana yang mengalir di antara Irjen Ferdy Sambo dan ajudannya.

"Periksalah semua rekening ajudan itu, libatkan PPATK, mereka yang bisa mengungkap itu. Berapa ember uang di rekening-rekening ajudan itu dan ke mana aliran dan dari mana aliran itu berasal," katanya.

Kamarudin menyebut ada aliran dana sebesar Rp600 miliar hingga 1 triliun di antara Ferdy Sambo dan para

nya data dan faktanya, mungkin bisa diserahkan ke kami untuk ditangani," ujar Ivan, Senin 15 Agustus 2022. Ia menjelaskan PPATK akan mendalami dugaan tindak pidana jika mendapat laporan.

Dia menegaskan mekanisme PPATK hanya bisa dilaksanakan sesuai yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. "Mekanisme yang berlaku selama ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

"Semua tugas dan kewenangan yang kami lakukan, baik dalam hal analisis, pemeriksaan (proaktif dan preemtif), termasuk penghentian transaksi, pembekuan rekening, dalam kasus apapun berdadarkan UU tersebut," tambahnya.



ajudannya. Maka dari itu ia mendorong agar PPATK ikut terlibat menyelidiki pusaran uang dalam kasus ini, dikawatirkan ada pula yang mengalir ke sejumlah lembaga.

Sedangkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan belum mendapat laporan apa pun dari pihak kuasa hukum Brigadir J atau melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak. Menurut dia, jika mendapat fakta terkait adanya pelanggaran atau penyelewengan, pihak Brigadir J dipersilakan untuk membuat laporan ke PPATK.

"Jika pengacara almarhum J pu-

Dia menekankan PPATK terus berkoordinasi dengan pihak berwajib sebelum bertindak melakukan wewenangnya melacak transaksi sebuah perkara. "Kami terus koordinasi dengan penegak hukum dalam hal proses analisis atau pemeriksaan yang dilakukan. Itu berdasarkan laporan transaksi dari pihak pelapor yang diterima PPATK," ungkapnya.

Akhirnya Ivan mengakui PPATK memproses soal aktivitas transaksi dari rekening Brigadir J yang telah tewas. "Kami sedang proses," ungkapnya, Rabu, 18 Agustus. Namun ia menegaskan temuan itu akan dilaporkan kepada Bareskrim Polri. ●



DESAKAN UNTUK MEMULIHKAN KEPERCAYAAN

Kasus pembunuhan Brigadir J dapat memicu penurunan kepercayaan publik. Sekaligus menjadi ujian berat bagi Polri. Ada yang berharap perbaikan kinerja, bahkan lebih dari itu.

Survei tentang kepercayaan publik terhadap kepolisian memang ada. Tapi, belum ada tolok ukur, kriteria, maupun perbandingan mengenai tingkat kepercayaan terhadap polisi sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan Brigadir J. Toh gelagat penurunan tingkat kepercayaan sudah tampak dalam pernyataan Presiden Joko Widodo yang membawahkan Polri secara langsung dalam sistem penyelenggaraan negara.

Beberapa saat sebelum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka, Jokowi meminta Polri

tidak ragu dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo. Dia ingin kebenaran diungkap apa adanya.

"Sejak awal, saya sampaikan usut tuntas," kata Jokowi dalam pernyataannya, seperti dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 9 Agustus 2022.

Jokowi menjawab pertanyaan terkait Polri akan mengumumkan tersangka baru di kasus Brigadir J. "Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutupi, ungkap kebenaran apa adanya, ungkap kebenaran apa adanya," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, hal itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. "Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ujar Jokowi.

Toh Kapolri mengakui, peristiwa penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di kediaman mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo beri dampak negatif bagi citra Polri.

"Akibat kasus ini, kepercayaan publik terhadap Polri kian menurun," ungkap Kapolri saat memberikan pengarahan kepada jajarannya, Kamis, 18 Agustus 2022 malam.

Namun, sambungnya, kepercayaan publik perlahan meningkat setelah Korps Bhayangkara menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus itu. Mulai dari pembentukan tim khusus, penonaktifan beberapa anggota dari jabatan sebelumnya hingga menetapkan empat tersangka dalam kasus ini.

Dia menambahkan, secara kelembagaan, ada beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan terkait kasus tersebut. Menurut dia, pengusutan kasus ini adalah pertarungan institusi Polri, pertarungan marwah kita.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Itu yang menjadi pegangan kita," demikian janji Sigit.

Kapolri meminta, tim khusus yang dia bentuk untuk bekerja maksimal. Dengan begitu, polisi bisa menentukan siapa saja pihak yang melanggar pidana, menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dan nama yang melanggar kode etik dalam kasus ini.

Dia meminta, proses hukum yang dilakukan terhadap kasus ini segera disampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi Polri. Terlebih, seluruh pihak mulai dari Komnas HAM, Kompolnas, DPR hingga masyarakat turut mengawasi proses hukum ini.

"Semua menjadi pertarungan kita. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga dan kita perjuangkan bersama ke depan," tambah Sigit.

Ia menjelaskan, meningkatkan lagi kepercayaan publik terhadap Polri

memang mendesak terkait situasi dan kondisi yang menyertainya. "Kenapa ini harus kita lakukan, karena kepercayaan publik terhadap Polri ini menjadi sangat penting. Kita masih menghadapi tugas-tugas ke depan yang luar biasa. Tantangan-tantangan yang saat ini sedang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan untuk mengawal kebijakan pemerintah," kata Sigit.

Tantangan yang saat ini masih dihadapi, kata Sigit, diantaranya adalah masih terjadinya Pandemi Covid-19 di Indonesia dan dunia. Tren positif penanganan dan pengendalian virus corona harus terus dijaga, dan itu membutuhkan peran dari TNI-Polri beserta stakeholder lainnya.

"Kita lihat bahwa sampai sekarang yang namanya Covid-19 dan varian barunya yang saat ini sampai di BA-

kan peran dari TNI-Polri serta pihak terkait lainnya.

"Tentunya peran dari seluruh rekan-rekan untuk betul-betul bisa tampil bisa hadir di masyarakat dan kalau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kita rendah, maka akan berat buat kita menghadapi semua itu," ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengungkapkan, ke depannya terdapat pula kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus terus dikawal Polri terkait dengan terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mengingat Indonesia saat ini telah mengalami kenaikan pertumbuhan perekonomian di kuartal kedua sebesar 5,44 persen. Kemudian, Sigit menekankan, Polri juga harus terus mengawal swasembada beras yang sudah terjadi dalam tiga tahun terakhir untuk kedepannya terus dipertahankan.



275 terus masih ada. Ini tentunya juga berdampak pada aktivitas terkait dengan kegiatan ataupun roda ekonomi," ujar Sigit.

Selain pandemi Covid-19, Sigit memaparkan bahwa, situasi global seperti konflik Rusia dan Ukraina juga mulai berdampak ke Indonesia. Belum lagi, menurut Sigit, dewasa ini, Indonesia sudah masuk ke tahun politik.

Tak hanya itu, Sigit menjelaskan, ancaman potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Semua hal tersebut, ditekankan Sigit, membutuh-

"Ini seiring dengan pembangunan proyek-proyek strategis seperti bendungan, embung, infrastruktur, yang terbangun dengan baik dan ini harus kita jaga karena ini adalah kunci dari semuanya," tutur Sigit.

Program pemerintah lainnya yang harus dikawal, dikatakan Sigit, yakni soal realisasi investasi yang merubah paradigma dari Jakarta sentris menjadi Indonesia sentris. Lebih dalam, Sigit juga menyorot soal daerah yang mengalami inflasi. Ia berharap, personel Polri dapat berkoordinasi dengan

beberapa negara besar untuk memastikan bahwa proses kegiatan G20 ini bisa berjalan dengan baik dan harapan kita ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk mengakhiri terjadinya peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap krisis ekonomi, pangan dan energi," tutup Sigit.

Namun, lebih dari sekadar pemulihan kepercayaan, banyak yang berharap lebih dari Polri terutama untuk berkinerja lebih baik lagi. Dari kalangan wakil rakyat, Ketua DPR Puan Maharani berharap kasus tersebut jadi momentum Polri untuk bekerja lebih profesional. "Ini merupakan salah satu momentum bagi Polri untuk, bukan bersih-bersih, untuk memperbaiki kinerja yang selama ini ada kemudian bisa lebih profesional," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.

Selain itu, ia berharap ke depan Polri bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih humanis. Kemudian ia juga berharap Polri transparan dan lebih dekat dengan rakyat, sehingga masyarakat lebih percaya dan bisa dekat dengan Polri.

Ia mengatakan DPR tidak menutup kemungkinan akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal tersebut mengingat DPR khususnya Komisi III memiliki fungsi pengawasan. "Menurut saya bisa dimungkinkan (karena memang sebagai fungsi pengawasannya itu merupakan ranah dari komisi III untuk melakukan langkah pendekatan kemudian menanyakan akar permasalahan dan apa yang akan dilakukan," ucap Puan.

Puan berpesan agar yang penting jangan sampai citra Polri tercoreng dan membuat kepercayaan masyarakat berkurang akibat kasus tersebut. "Jadi saya ingin ini masalah segera dituntaskan dan segera selesai sehingga tidak berlarut-larut dan berkepanjangan," ujarnya.

Sebelumnya, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengemukakan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri bakal menurun jika penanganan kasus Sambo tidak jelas. Toh ia menilai Polri berupaya untuk memulihkan keper-

cayaan publik dengan mencopot jabatan Ferdy Sambo dan akhirnya menetapkannya sebagai tersangka.

"Itu langkah nyata untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kepolisian benar-benar transparan, profesional, dan akuntabel," ujarnya. Namun ia juga melihat Polri masih harus menangani potensi konflik kepentingan internal dalam penanganan kasus Sambo.

akuntabel, menggunakan scientific crime investigation harus dilakukan dengan benar, secara terukur, dan proporsional. Ketika di perjalanan ini ada yang kembali dinilai janggal, pasti respons publik juga akan negatif lagi," kata Wahyu.

Wahyu juga mengemukakan Polri perlu melakukan perubahan kultural. Antara lain pembinaan personel yang tidak hanya menjunjung tinggi profe-



Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto



Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Albertus Wahyurudhanto

Sedangkan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Albertus Wahyurudhanto mengatakan sebagai pengawas kepolisian RI, Kopolnas sudah meminta kepolisian menerapkan prosedur yang semestinya dalam penanganan kasus Sambo.

"Janji kapolri untuk melakukan proses ini dengan transparan dan

sionalitas, tapi juga menjaga integritas dan patuh terhadap kode etik.

"Perlu menjadi catatan: Polri itu anggotanya 460.000, yang perwira cuma delapan persen, jadi yang bintara dan tamtama itu jumlahnya 92 persen. Maka pembinaan personel, itu PR yang sampai sekarang belum kelar-kelar," ungkap Wahyu. ●

KEMANDIRIAN EKONOMI UNTUK MASA DEPAN BANGSA

Dalam konteks bernegara, konsep kemandirian ekonomi, telah lama digagas terutama oleh para pendiri bangsa (founding fathers). Presiden pertama kita, Soekarno, atau yang populer dipanggil Bung Karno, pada masa-masa awal perjuangan kemerdekaan telah menyuarakan mengenai kemandirian ekonomi.

Gagasan mengenai kemandirian ekonomi tersebut antara lain dapat ditemukan pada pidato pembelaannya 'Indonesia Menggugat' ketika Bung Karno menghadapi pengadilan kolonial di Bandung, 92 tahun yang lalu, tepatnya pada 18 Agustus 1930. Konsep kemandirian ekonomi Bung Karno tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa kolonialisme Belanda telah menimbulkan kesengsaraan rakyat berikut akses lainnya di bidang ekonomi.

Setelah menjadi presiden pun, Bung Karno konsisten mengusung gagasan kemandirian ekonomi. Pada masa pemerintahannya, Bung Karno pernah mengeluarkan gagasan Ekonomi Berdikari yang merupakan penjabaran dari konsep dari kemandirian ekonomi. Yaitu, membangun ekonomi bangsa berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri dan tidak bergantung pada pihak asing.

Namun demikian, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya di depan Sidang Umum ke-IV MPRS pada 22 Juni 1966, Bung Karno menegaskan bahwa konsep Ekonomi Berdikari tidak berarti bahwa kita menolak kerja sama dengan luar negeri. Justru, sebagaimana disampaikan Bung Karno, kita perlu memperluas kerja sama internasional. Yang ditolak oleh Ekonomi Berdikari adalah ketergantungan kepada pihak asing dan kerja sama luar negeri yang tidak saling menguntungkan.

Mohammad Hatta, atau yang populer dipanggil Bung Hatta, juga banyak mengeluarkan gagasan tentang kemandirian ekonomi. Inti dari konsep kemandirian ekonomi yang ditekankan Bung Hatta adalah ekonomi bangsa harus dibangun oleh masyarakat secara gotong royong. Sedangkan tugas pemerintah adalah mengatur perekonomian dan melindungi ekonomi rakyat. Selain itu, pemerintah juga harus membina rakyatnya agar mampu menjalankan perekonomian bangsa secara mandiri.

Konsep kemandirian ekonomi Bung Hatta menekankan dua karakter sekaligus. Pertama, kekeluargaan. Kedua, kedisiplinan dan tanggung jawab. Maksudnya adalah pelaksanaan ekonomi bangsa harus dilandasi oleh semangat kebersamaan. Namun, dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya, tetap harus dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab dari para individu pelaku ekonomi.



SANDIAGA SALAHUDIN UNO

Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Kemandirian Ekonomi di Masa Kini: Memanfaatkan Kekuatan Domestik

Saat ini dan di masa depan, kita sedang dan akan menghadapi kondisi, tantangan, dan peluang yang berbeda dibandingkan di masa lalu. Namun demikian, nilai-nilai dari konsep kemandirian ekonomi yang digagas oleh para founding fathers kita tak akan pernah lekang oleh waktu.

Konsep kemandirian ekonomi akan abadi. Bahkan, dalam konteks kekinian, justru konsep kemandirian ekonomi telah berkontribusi menyelamatkan ekonomi kita dari krisis yang lebih parah ketika pandemi

COVID-19 terjadi.

Kita menyaksikan bahwa selama krisis pandemi terjadi, yaitu pelaku-pelaku UMKM memperlihatkan ketangguhannya (resilience) dalam menghadapi krisis. Salah satunya terlihat dari sektor pertanian yang merupakan sektor yang banyak melibatkan pelaku UMKM dan tenaga kerja, konsisten tumbuh positif selama pandemi di tengah banyak sektor lainnya yang mengalami kontraksi.

Indikator lainnya adalah di perbankan, di mana kredit untuk UMKM selama krisis pandemi juga memperlihatkan persistensinya cepat pulih dan tumbuh positif di tengah kredit untuk sektor lainnya terkontraksi. Kenapa bisa demikian? Karena UMKM banyak mengandalkan pasar lokal atau pembeli lokal (domestic demand). Kekuatan pasar domestik yang menyelamatkan perekonomian kita dari krisis.

Kekuatan domestik lainnya yang turut menyelamatkan ekonomi kita dari krisis yang lebih parah akibat pandemi adalah komoditas. Hari ini kita menyaksikan bahwa dunia menjerit akibat tingginya harga komoditas. Komoditas pangan, energi, dan logam mengalami lonjakan harga hingga puluhan, bahkan ratusan persen. Inflasi pun meningkat tajam.

Hari ini, dunia menempatkan inflasi sebagai salah satu ancaman terbesar di tengah ancaman terjadinya perlambatan ekonomi. Indonesia memang terdampak dari tingginya harga komoditas tersebut. Inflasi kita saat ini juga meningkat. Pada saat tulisan ini dibuat, inflasi kita secara tahunan (yoy) mencapai 4,35 persen pada Juni 2022.

Namun demikian, kita juga memperoleh keuntungan dari lonjakan harga komoditas tersebut. Booming komoditas, istilahnya, telah memberikan keuntungan berupa windfall. Ekspor non-migas, terutama dari komoditas dan industri berbasis pengolahan komoditas, tumbuh signifikan. Booming komoditas inilah salah satu yang turut menghidupkan industri manufaktur kita.

Terlebih, pemerintah juga banyak memberikan insentif kepada industri. Alhasil, produksi manufaktur meningkat, ekspor juga meningkat. Kenaikan produksi dan ekspor tersebut memberikan kontribusi berupa pemasukan devisa dan meningkatkan penerimaan negara (APBN) berupa pajak.

Sementara itu, kenaikan booming komoditas tersebut, selain memberikan pemasukan berupa devisa dan penerimaan pajak, juga berkontribusi pada kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sekali lagi, kekuatan domestik terbukti telah turut menyelamatkan ekonomi kita.

Banyak studi yang membuktikan bahwa ekonomi yang mengandalkan potensi domestik akan lebih tahan dalam menghadapi krisis. Kita sudah memiliki pengalaman, baik di masa lalu maupun yang masih menjadi tantangan di masa kini, bahwa ketergantungan tinggi pada luar negeri telah menyebabkan rapuhnya perekonomian ketika terjadi krisis.

Sebagai contoh, banyak pihak menyebut bahwa industri-industri yang dibangun pada awal 1990-an merupakan *footloose industry*, industri yang kurang mengakar pada kekuatan domestik.

Disebut demikian karena industri-industri tersebut dijalankan dengan banyak mengandalkan bahan baku dari impor, memanfaatkan fasilitas perpajakan, dan kepebeanaan di bidang ekspor. Ekspor non-migas manufaktur kita tinggi saat itu, namun diikuti dengan impor yang tinggi pula.

Nah, ketika krisis moneter terjadi menjelang akhir 1997, industri-industri tersebut banyak yang *collapse* karena tidak mampu menanggung tingginya biaya impor akibat pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (USD).

Kembali kepada konsep kemandirian ekonomi, kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, potensi kekayaan alam yang begitu melimpah. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah di bidang pangan, kelautan dan maritim, energi dan pertambangan, termasuk potensi alam dan kekuatan budaya yang dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi kita.

Nah, potensi kekayaan ini perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun kemandirian ekonomi, terutama untuk masa depan. Kekayaan sumber daya alam, seperti komoditas sebagaimana telah dijelaskan di atas, ke depan harus menjadi basis bagi industrialisasi kita.

Itulah kenapa pemerintah saat ini mendorong pengembangan hilirisasi berbasis kekuatan sumber daya alam (*resourced-based industry*) yang kita miliki sebagai bagian dari langkah-langkah transformasi struktural di bidang industri.

Melalui kebijakan hilirisasi tersebut, nantinya nilai tambah yang kita peroleh dari sumber daya alam menjadi lebih besar. Termasuk juga pengembangan hilirisasi tersebut dalam rangka substitusi impor, karena produk impor yang kita lakukan saat ini bahan bakunya dari Indonesia. Ke depan, Indonesia harus memiliki lebih banyak industri

berbasis agro, industri berbasis mineral hasil tambang, dan industri berbasis migas dan petrokimia.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Salah Satu Pilar Membangun Kemandirian Ekonomi

Selain mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, potensi pariwisata dan ekonomi kreatif (*parekraf*) juga dapat diandalkan sebagai salah satu pilar untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. Sektor *Parekraf* adalah sektor yang boleh dikatakan paling sedikit atau bahkan mungkin nol (*zero*) kandungan (*content*) impornya. Sehingga, sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada devisa yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan usaha di sektor *parekraf*.

Bahkan, *parekraf* menjadi sektor yang menghasilkan devisa masuk ke Indonesia. Pelaku usaha yang terlibat pada sektor *parekraf* sebagian besar pengusaha lokal dan merupakan UMKM. Keberadaan sektor *Parekraf* juga memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar, tidak hanya dari aspek ketenagakerjaan pada sektor tersebut, juga terhadap sektor-sektor lainnya.

Sebagai contoh, gelaran *MotoGP Mandalika* pada Maret 2022, terbukti memberikan *multiplier effect* yang signifikan bagi perekonomian, khususnya sektor *parekraf* di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya.

Perhitungan *Kemenparekraf* menunjukkan bahwa *MotoGP Mandalika* lalu memberikan nilai tambah kepada Indonesia bahkan mencapai Rp4,5 triliun. Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I-2022 sebesar 7,76 persen (*yoy*) lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional yang sebesar 5,01 persen (*yoy*).

Indonesia sangat beruntung dengan keberadaan sektor *parekraf* saat ini. Di saat perekonomian sedang bergerak pulih, Indonesia menjadi *Presidensi G-20*, yang berarti menjadi tuan rumah bagi event *G-20*, yang pastinya akan mendatangkan tamu-tamu internasional dari berbagai negara. Dengan kedudukan tersebut, sektor *parekraf* dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan di daerah-daerah tempat berlangsungnya *G20*, yaitu Bali dan sekitarnya.

Sektor *parekraf* memiliki potensi untuk memperkuat struktur ekonomi dan mendukung percepatan transformasi ekonomi, sekaligus menjadi salah satu pilar untuk membangun kemandirian ekonomi. Ini mengingat sektor *parekraf* memiliki karakteristik yang kuat pada muatan (*content*) lokalnya. Salah satunya tercermin pada perolehan devisa yang cukup tinggi.

Studi *Bank Indonesia* (2019) memperlihatkan bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang memberikan sumbangan devisa yang besar. Tercermin pada perolehan devisa pariwisata yang terdiri dari *travel* dan *transportasi* mencapai USD18,4 miliar pada 2019. Jika dibandingkan dengan ekspor jasa lainnya, pangsa devisa pariwisata merupakan yang tertinggi, yakni mencapai 54 persen terhadap total ekspor jasa. ●



APRESIASI TINGGI UNTUK UMKM SUMSEL

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengapresiasi Sumatera Selatan dan Jawa Barat yang terus mendorong UMKM dengan menampilkan berbagai produk daerah.

Selain memberikan apresiasi khusus kepada Sumsel, Menteri Teten Masduki juga memberi atensi yang sama kepada Jawa Barat pada puncak Hari UMKM Nasional.

"Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Jabar karena kegiatan ini menjadi ajang bagi UMKM dalam mempromosikan produknya," kata Teten saat Peringatan Hari UMKM Nasional di Cihampelas Walk Bandung Provinsi Jawa Barat, Jumat (12/8/2022).

Kedua provinsi tersebut juga diketahui telah melakukan perjanjian kerja sama dalam rangka menguatkan perdagangan antar provinsi.

"Kerja sama perdagangan yang dilakukan antar dua provinsi ini penting dalam upaya mendorong dan menguatkan belanja produk UMKM," katanya.

Teten mengaku bersyukur karena kuartal II-2022 ekonomi Indonesia kembali tumbuh yang ditopang konsumsi rumah tangga.

"Kita terus waspada karena ekonomi global tidak menentu. Untuk itu, kita harus mendorong dan konsumsi masyarakat terus diperkuat melalui pembukaan lapangan pekerjaan serta membeli dan belanja menggunakan produk UMKM," ucapnya.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengaku bangga karena Sumsel mendapat kehormatan bisa menampilkan berbagai produk lokal pada Hari UMKM.

"Atas izin Pak Menteri kami bersemangat dengan Pak Ridwan Kamil bersepakat untuk melakukan hubungan dagang tukar-menukar komoditas melalui penandatanganan perjanjian kerja sama," ungkapnya.

Menurut Bapak Pembangunan



Sumsel itu, dilakukannya kerja sama agar pemerintah lebih intervensi yang maksimal dalam mendorong UMKM.

“Kita tahu bahwa UMKM ini terbukti sangat ampuh

meskipun sempat berkontraksi, namun ini tetap bangkit karena berdaya saing luar biasa dan pasarnya jelas, sehingga membuat Indonesia termasuk negara yang tangguh,” ujarnya.

Selain Sumsel mendorong UMKM, Pemprov Sumsel juga terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

“Ada gerakan kami yang diluncurkan akhir 2021, program GSMP, di mana Presiden sudah mendingungkan penanaman hortikultura di halaman-halaman rumah. Memang gerakan seperti ini terbukti di kuartal terakhir penurunan kemiskinan memang bisa konkret dengan gerakan yang langsung menyentuh ke masyarakat dengan dukungan semua pihak,” ujarnya.

Herman Deru berharap agar Hari UMKM 2023 dapat di gelar di Sumsel sehingga ada kesinambungan.

“Tadi kita sepakat Jabar dan Sumsel berkolaborasi, kita harap Hari UMKM dan Hari Koperasi itu kita satukan dan kami siap menjadi tuan rumah,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengaku bangga atas diselenggarakannya kegiatan Hari UMKM di Jabar, apalagi kegiatan ini primadonanya adalah Sumsel.

Kang Emil juga bersemangat karena peringatan Hari UMKM ini akan melakukan perjanjian kerja sama dengan Sumsel. Menurutnya, kerja sama tersebut sebagai upaya meningkatkan dan mengangkat produk UMKM tanpa harus impor.

“Kita menyepakati kerja sama ini bahwa dunia sedang tidak baik, agar kita tidak terjebak tentu kita perlu kerja sama ini,” katanya.

Kang Emil berharap dengan adanya kerja sama seperti ini dapat saling meningkatkan produk dan menguatkan sektor perdagangan.

“Jadi kalau Sumsel butuh apa, barangnya ada di Jabar nanti kita suplai,

sebaliknya juga jika Jabar butuh apa, Sumsel ada, maka Sumsel akan suplai,” katanya.

Pada kegiatan Hari UMKM 2022 ini dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Gubernur Sumsel Herman Deru dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil disaksikan langsung oleh Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki.

Penandatanganan nota kesepahaman antara

Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan kopi dengan BNI, Mandiri, BJB, Asosiasi dan lembaga keuangan lainnya disaksikan Menteri Koperasi UKM, Gubernur Sumsel dan Gubernur Jabar.

Usai menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Sumsel dan Jabar, Menteri Teten bersama Herman Deru

dan Ridwan Kamil membuka sekaligus meninjau pameran Sumsel Expo 2022.

Pameran Sumsel Expo 2022 ini menampilkan berbagai karya seni dari kabupaten/kota di Bumi Sriwijaya di bawah binaan Ketua Dekranasda Sumsel, Febrita Lustia HD. Sumsel Expo ini dimaksudkan untuk menggenjot produk UMKM sekaligus diharapkan mampu menumbuhkembangkan kualitas UMKM agar mampu bersaing secara global.

Sumsel Expo diikuti 12 peserta seperti ICSB, Kriya Sriwijaya, Bank Sumsel, PT Pupuk Sriwijaya. Beberapa produk UMKM dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Prabumulih, Muara Enim, OKU Timur dan Musi Rawas. ●



TANAMKAN JIWA PRODUKTIF LEWAT GSMP

Berbagai upaya gencar dilakukan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam menumbuhkan sikap kemandirian generasi muda. Seperti mendorong setiap sekolah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menjadikan anak didiknya berjiwa produktif.

“**B**icara soal produktivitas, saya ingin agar ada keselarasan antara kegiatan di sekolah dan program pemerintah. Saya harapkan sekolah membuat suatu kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap kemandirian siswanya. Sehingga nantinya siswa ini dapat menjadi generasi produktif yang mampu bersaing,” kata Herman Deru ketika menghadiri Pengukuhan Peserta Didik Baru dan Peluncuran Program Kelas Tahfiz SMAN 6 Palembang, Sabtu (13/8/2022).

Menurut Herman Deru salah satunya dengan menggali Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Sebagai provinsi lumbung pangan, sudah selayaknya GSMP tersebut dilakukan juga di sekolah-sekolah sehingga dapat memantik produktivitas anak didik.

“Gerakan tersebut juga bisa diterapkan di sekolah. Karena memang gerakan tersebut berdampak baik bagi ekonomi kita. Ini menjadi upaya kita untuk mengubah pola pikir dari pem-

beli menjadi penghasil sejak dini,” paparnya.

Herman Deru menjelaskan, cara itu tentu tidak akan mengganggu pendidikan wajib yang ada di sekolah. “Kegiatan produktif ini dapat menjadi ekstrakurikuler di sekolah, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar,” terangnya.

Dia menyebut, upaya itu mutlak dilakukan sehingga generasi penerus dapat lebih siap bersaing. “Apalagi, 2045 kita mendapatkan bonus demografi. Oleh sebab itu, tanamkan kemandirian sejak dini karena mereka (siswa) ini akan menghadapi persaingan yang lebih ketat,” bebernya.

Selain itu, dia menyarankan agar pihak sekolah juga membuat terobosan lain untuk siswa-siswi, seperti bertukar sekolah. Hal itu bertujuan agar siswa-siswi tersebut dapat lebih memahami kelebihan dan kekurangan di sekolahnya masing-masing.

“Kegiatan itu tentu akan membawa perubahan. Langkah tersebut akan



membuat siswa paham apa kelebihan dan kekurangan sekolahnya masing-masing, mana yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Nantinya, ketika siswa ini menjadi pemimpin tentu akan lebih sensitif dalam membangun daerahnya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk membangun karakter siswa siswi sejak dini," tegasnya.

Kenalkan GSMP ke Gubernur Lemhannas

Gubernur Herman Deru juga mengenalkan program GSM kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto dan jajarannya saat melakukan kunjungan kerja di Bumi Sriwijaya.

Kunjungan tersebut dilakukan guna pengumpulan data dalam rangka memberi sumbang saran pemikiran kepada Presiden RI dalam bentuk rekomendasi kebijakan strategis untuk menyikapi ideologi transnasional dalam rangka konsolidasi demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru memamerkan sejumlah potensi dan keunggulan Sumsel.

"Sumsel ini merupakan provinsi yang masyarakatnya heterogen. Dikenal sebagai batang hari sembilan karena ada sembilan suku, sembilan bahasa, dan sembilan sungai besar ada di Sumsel ini," kata Herman Deru.

Kendati memiliki penduduk heterogen, kerukunan di Sumsel masih tetap terjaga sampai saat ini.

"Keheterogenan itu menjadi modal Sumsel dalam mengelola daerah. Kontrol ego masing-masing penduduk tetap terjaga, sehingga terciptanya Sumsel zero konflik, baik dari konflik agama, ras, dan lainnya," paparnya.

Selain itu, ketahanan pangan di Sumsel juga tak kalah hebatnya, di mana potensi pertanian dan perkebunan memiliki andil terwujudnya ketahanan pangan tersebut.

"Potensi utama yang ada di Sumsel adalah pertanian, baik dari sektor pangan seperti padi, maupun perkebunan seperti karet dan sawit," terangnya.

Terciptanya ketahanan pangan tersebut juga tak lepas dari peran semua pihak yang turut membantu. Termasuk peran TNI dan Polri.

"Di sektor pangan ini, TNI dan Polri juga turut andil dalam menjaganya. Bahkan para petani juga kita bekali ilmu agar memiliki jiwa entrepreneur,

nan di Sumsel ini. Jadi di Sumsel ini masyarakat diubah pola pikirnya dari yang sebelumnya konsumtif menjadi produktif," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, mengapresiasi langkah yang dilakukan Sumsel hingga saat ini. "Yang paling menonjol dan utama di Sumsel ini adalah soal pangan. Hingga saat ini stabilitas pangan di Sumsel mampu dipertahankan. Dilihat dari data, GSMP ini berhasil menga-



sehingga tidak menjadi buruh di lahannya sendiri," bebarnya.

Dia juga mengaku, jika sektor pertanian di Sumsel menjadi salah satu pendorong menurunnya angka kemiskinan. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan disebutnya memiliki potensi besar dalam penekanan angka kemiskinan tersebut.

"GSMP yang dicanangkan cukup berhasil menekan angka kemiski-

tasi kemiskinan di Sumsel ini," katanya.

Andi juga menyebut, saat menjelang pesta demokrasi, tak pernah terpantau terjadinya konflik di provinsi yang beribukota di Palembang ini.

"Meski memiliki penduduk heterogen, selama ini di Sumsel tidak terjadi masalah, baik saat biasa maupun saat pesta demokrasi. Skor Sumsel ini memang selalu baik," pungkasnya. •



SIAPKAN IKON BARU KOTA TANGERANG SELATAN

● Pemkot Buka Sayembara Desain Bundaran Maruga



Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengumumkan secara terbuka Sayembara Desain Bundaran Maruga ke seluruh arsitek di Indonesia di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Senin, 1 Agustus 2022. Bundaran Maruga akan dijadikan sebagai ikon di wilayah termuda di Provinsi Banten itu.

Pada acara yang dibuka langsung oleh Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, juga dihadiri oleh para arsitek Tanah Air, serta para dewan juri yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari akademisi, budayawan, hingga arsitek berpengalaman.

Benyamin menjelaskan, kawasan Bundaran Maruga merupakan salah

satu elemen penting menuju Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Namun, saat ini, kawasan tersebut kondisinya belum memiliki identitas sebagai representatif gerbang kota menuju kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangsel.

Guna menunjang konsep tersebut, maka diperlukan penataan kawasan Bundaran Maruga, sehingga mampu meningkatkan kawasan kota yang rep-

resentatif, menarik dan menyenangkan untuk dihuni dan ditinggali oleh masyarakat kota yang membutuhkan identitas tempat dan lokalitas yang mencerminkan budaya Kota Tangsel.

"Melalui Sayembara Desain Kawasan Bundaran Maruga ini, diharapkan dapat dieksplorasi rancangan desain dari berbagai kalangan masyarakat, sehingga dapat ditemukan rancangan desain yang ideal un-

tuk mewujudkan Kawasan Bundaran Maruga yang mampu memperkuat karakter Kota Tangerang Selatan sebagai pusat hunian, perdagangan dan jasa, serta mencerminkan motto Kota Tangerang Selatan yang cerdas, modern, dan religius,” ungkap Benyamin.

Benyamin menjelaskan, sayembara ini bertujuan untuk menjaring rancangan desain dari kalangan arsitek profesional secara terbuka seluruh Indonesia. Sehingga dapat ditemu-kenali desain Kawasan Bundaran Maruga yang dapat mengartikulasikan dan merepresentasikan karakter kawasan yang telah tumbuh dan berkembang pada masing-masing koridor, sesuai dengan potensi yang membentuk kawasan segitiga budaya.

Benyamin berharap dapat mewujudkan Kawasan Bundaran Maruga sebagai salah satu etalase kota yang dapat mencitrakan Kota Tangerang Selatan. “Sebagai Kota Cerdas, Modern dan Religius yang menjadi pusat hunian, perdagangan dan jasa,” imbuhnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman, memaparkan, sayembara desain penataan kawasan Bundaran Maruga yang berlokasi di persimpangan Jalan Maruga Raya, Kecamatan Ciputat, berlangsung mulai 1 Agustus hingga 30 September 2022.

“Dengan masa pendaftaran peserta hingga proses pembuatan karya sampai 2 Agustus 2022. Kemudian, batas pengumpulan karya softfile pada 12 September dan pengumpulan fisik sampai 18 September 2022,” paparnya.

T a h a p a n pun ber- l a n j u t pada seleksi administrasi karya yang berlangsung pada 19-21 September 2022. Kemudian, penjurian tahap I secara ter-

tutup akan berlangsung pada 22-24 September 2022. Lalu, dilanjutkan dengan pengumuman lima finalis pada 24 September 2022, diikuti penjurian tahap II secara terbuka pada 30 September.

Wahyu menambahkan, untuk pesertanya dapat diikuti oleh seluruh arsitek profesional se-Indonesia, baik itu perorangan maupun kelompok. Bagi peserta perorangan, harus merupakan anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang memiliki STRA/SKA (minimal Ahli Muda). Sementara untuk peserta kelompok, ketua tim harus anggota IAI yang memiliki STRA/SKA (minimal Ahli Muda) dan anggota tim terbuka bagi profesi non arsitek, seperti pematung, seniman, urban designer, landscape architect dan keahlian lain yang diperlukan.

Wahyu menerangkan, dalam sayembara ini juga ada persyaratan yang wajib diikuti oleh para peserta. “Pertama harus mempunyai NPWP, mempunyai SKA/STRA IAI (minimal Ahli Muda)

bagi ketua kelompok dan telah melunasi iuran anggota 2021, melampirkan fotokopi KTP, melampirkan fotokopi kartu anggota IAI, melampirkan surat pernyataan tanggung jawab a t a s

orisinalitas karya bermeterai, dan melampirkan formulir data nama peserta untuk sertifikat,” terangnya.

Para peserta akan memperebutkan total hadiah hingga Rp105 juta. Juara pertama akan meraih Rp40 juta, juara kedua Rp30 juta, juara ketiga Rp20 juta. Sedangkan, untuk harapan satu akan mendapatkan Rp10 juta dan harapan kedua Rp5 juta. Seluruh pemenang juga akan mendapatkan trofi dan juga sertifikat. Untuk info lebih lanjut, dapat dipelajari dan dilihat melalui website resmi <http://sayembarataman.tangerangselatankota.go.id>.

Teladani Perjuangan Veteran

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengajak generasi muda untuk meneladani perjuangan dan pengorbanan para veteran yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Hal itu disampaikan Benyamin saat menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional ke-73 Tingkat Kota Tangerang Selatan di Kantor Sekretariat Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Ciputat, Rabu (10/8/2022).

Benyamin mengatakan, generasi saat ini yang akan meneruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh para veteran. Meski, perjuangan yang dilakukan saat ini tidak akan sebanding dengan para pahlawan.

“Sekarang saatnya generasi ini yang meneruskan perjuangan. Kita hanya mengorbankan waktu, tenaga, sedikit keringat, perasaan, pengorbanan fisik, tetapi tidak sebanding dengan para veteran yang telah mengorbankan nyawa,” kata Benyamin.

Menurutnya, jiwa semangat dan nilai juang tersebut menjadi motor penggerak untuk mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan laju gerak bangsa ini. Kata Benyamin, LVRI sebagai wadah resmi veteran di Tangerang Selatan akan terus bersama memberikan inspirasi dan berkolaborasi dengan Pemkot Tangsel.

“Kami berharap kolaborasi seperti kegiatan ini dapat terus dilakukan. Sebagai wujud gotong royong dan kebersamaan yang merupakan nilai masyarakat Kota Tangsel,” tambahnya. ●





BANGKITKAN UMKM LEWAT DIGITALISASI

Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya membangkitkan kembali perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir. Salah satunya adalah dengan memberdayakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui berbagai program.

Pada Jumat (12/8/2022), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tangerang Selatan mengadakan kegiatan Tangsel Digifest 2022 yang dibuka oleh Wakil Wali Kota, Pilar Saga Ichsan, bersama Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, di Teraskota, Serpong.

Tangsel Digifest 2022 menjadi ajang pencarian produk unggulan terbaik di Kota Tangerang Selatan dengan berbagai rangkaian acara, mulai dari pameran dan bazar UMKM, FGD dan seminar perkoperasian, bisnis corner, fashion show, dan pembuatan NIB.

Pilar mengatakan, Tangsel Digifest sebagai salah satu usaha untuk membangkitkan kembali perekonomian di Tangerang Selatan pasca pandemi. Selain itu, juga sebagai komitmen Pemkot dalam pemberdayaan UMKM di Tangsel, yang merupakan upaya melahirkan ketahanan ekonomi yang kokoh.

"Perdagangan ini momentum, jangan sampai Pemkot Tangsel kehilangan

momentum untuk memberikan dukungan dan support untuk UMKM," ujar Pilar.

Menurut Pilar, saat ini juga momentum yang tepat untuk bangkit karena laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat pasca pandemi. Pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan kini berada di atas 4 persen.

"Saat pandemi, di daerah tetangga, pabrik-pabrik kita lihat banyak yang tutup. Kalau di Tangerang Selatan basis kuatnya ada di UMKM. Alhamdulillah masih bisa bertahan walaupun terjadi penurunan ekonomi," ungkapnya.

Pilar mengatakan, Tangsel Digifest juga menjadi ajang untuk mensosialisasikan produk pelaku usaha melalui platform digital. Sehingga, ini akan memudahkan nantinya sebagai data bagi pemilik usaha, baik berapa besar pendapatan maupun karakter dari pembeli produk tersebut.

"Termasuk, Pemkot Tangsel bisa memantau pergerakan ekonomi. Mana yang perlu didukung, didorong

dan sebagainya, karena database ini penting," ujar Pilar.

Pilar menambahkan, pihaknya juga sudah mencoba melakukan digitalisasi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Digitalisasi itu dilakukan melalui pembayaran non tunai yang menggandeng beberapa platform digital yang ada.

Saat ini, produk UMKM dari Tangsel juga sudah go international dengan tujuan seperti Jepang, Italia dan Amerika. Produk yang sudah ekspor itu di antaranya kerajinan batik, syal batik yang menggunakan eko print, serta beberapa produk elektronik.

"Dan produk kita akan lebih optimal lagi dengan adanya dukungan dari Pemprov Banten," ucapnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkot Tangsel yang telah menggelar Tangsel Digifest. Menurutnya, acara tersebut merupakan bentuk fasilitas dan dukungan Pemkot kepada UMKM

di Tangerang Selatan.

"Tangsel Digifest ini mampu mengembangkan ekonomi kreatif. Selain itu, UMKM berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Al Muktabar juga mendorong digitalisasi UMKM Tangsel karena di era perkembangan teknologi saat ini, transformasi ke arah digital menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan dunia usaha.

Al Muktabar mengungkapkan, saat ini pertumbuhan ekonomi di Banten mengalami peningkatan yang cukup baik, mencapai 5,7 persen. Sedangkan, di Kota Tangsel sendiri mencapai 4 persen. Saat ini perekonomian baru melakukan recovery pasca dua tahun dihadapkan pada pandemi COVID-19.

"Untuk itu, sektor UMKM yang berbasis kemasyarakatan harus terus kita dorong. Salah satunya dengan gerakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam Bela Pengadaan, Pemprov Banten sudah mengalokasikan 40 persen dari APBD untuk dibelanjakan kepada produk lokal," kata Al Muktabar.

Dengan gerakan ini, diharapkan seluruh UMKM yang ada di Banten, utamanya di Kota Tangsel, bisa ikut berpartisipasi agar produk yang diperdagangkan bisa bersaing dalam Bela Pengadaan. "Kami sudah menyiapkan platform digital untuk itu yang diberi nama Plaza Banten. Di platform ini sudah ribuan UMKM yang terdaftar, baik dari Banten maupun luar daerah. Pemasarannya juga lebih luas lagi," ucap Al Muktabar.

Dia menambahkan, pada momen seperti ini, sosialisasi pentingnya digitalisasi itu harus digalakkan karena pemasaran produk UMKM sudah tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu atau sudah tidak ada batasan. Ini bisa menjadi salah satu peluang baru yang bisa dimanfaatkan.

"Maka dari itu, saya menyarankan kepada para pelaku UMKM di Kota Tangsel ini untuk akrab kepada kemajuan teknologi. Karena saat ini, itu kunci untuk mendapatkan nilai tambah," tegasnya.

Dukungan Dari Swasta

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, memberikan apre-

siasi kepada Telkom Indonesia Witel Tangerang yang telah menggelar pesta rakyat dan UMKM di Grha Telkom BSD, Serpong, Jumat (12/8/2022). Apalagi, hal itu sejalan dengan komitmen Pemkot Tangsel yang terus mendorong pemberdayaan UMKM di Tangerang Selatan.

"Saya bangga dan senang, di mana Telkom juga peduli terhadap UMKM di

Tangsel memiliki kemampuan intelektual yang tinggi yang dibuktikan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan UMKM.

Dengan modal masyarakat Tangerang Selatan yang melek teknologi, maka akan memudahkan pelaku UMKM dalam pengembangan sekaligus meningkatkan promosi produk. Sehingga, UMKM di



Tangsel. Bagaimana mendorong promosi pengenalan produk-produk di Tangerang Selatan ke tingkat nasional, bahkan juga internasional," kata Pilar.

Pilar mengatakan, Tangerang Selatan memiliki pasar yang bagus untuk UMKM. Selain memiliki masyarakat yang banyak, Tangsel memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Banten. Menurutnya, masyarakat

Tangerang Selatan sangat besar peluangnya untuk maju.

Dia menjelaskan bahwa Produk-produk UMKM di Tangsel sangat beragam, mulai dari kuliner, fashion, kriya hingga bidang-bidang digital teknologi. "Kemarin, saya ikut Apeksi, kami memamerkan Virtual Reality (VR) ini dari Ciputat dan ternyata sangat diapresiasi di sana," ucap Pilar. ●



MENPAREKRAF PUJI POTENSI WISATA DAN UMKM KOTA BEKASI

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menilai bahwa Kota Bekasi, Jawa Barat, memiliki berbagai sektor dan tempat wisata unggulan. Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri Event Pesta Rakyat Kota Bekasi yang berlangsung di Bekasi Junction, baru-baru ini.

Sandi mengungkapkan bahwa Kemenparekraf siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bekasi sebagai pendorong peningkatan ekonomi kreatif di bidang pariwisata dan UMKM.

"Saya melihat potensi Kota Bekasi di sektor wisata. Kami akan kembangkan dari segi itu," kata Sandi usai membuka bazar yang menjadi bagian dari Event Pesta Rakyat Kota Bekasi tersebut.

Sandi berharap, bazaar yang dibukanya mampu mendorong pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bekasi untuk menggiatkan penyelenggaraan event. Sehingga, pada ujungnya nanti bisa membangkitkan ekonomi dan terciptanya kesempatan kerja di masyarakat.

"Kegiatan seperti ini akan sangat berdampak kepada masyarakat karena ekonomi bergerak. Peluang penciptaan usaha dan lapangan kerja

juga terbentuk. Saya mengapresiasi kehadiran pesta rakyat bersama Jawa," kata Sandi.

Dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, saat ini, Indonesia dan negara-negara dunia juga sedang dihadapkan dengan tantangan ekonomi global.

Harga-harga bahan pokok diperkirakan akan naik akibat perang Rusia-Ukraina, sehingga menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan yang menjadi semakin tidak terhindarkan.

"Secara total inflasi itu (diperkirakan) 10 persen naiknya, kita harus waspada, kita harus mulai mengantisipasi inflasi," kata Sandiaga.

Karenanya, dia mendorong pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di Kota Bekasi agar dapat meningkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan semangat gerak cepat (gercep), gerak bersama (geber), dan garap semua potensi lapa-

ngan kerja (gaspol). Salah satunya dengan menghadirkan event-event yang melibatkan pelaku usaha, khususnya UMKM.

"Harapannya kita semua bangkit. Caranya dengan menguatkan ekonomi dari masyarakat, kegiatan event seperti ini akan sangat berdampak karena ekonomi bergerak. Kita harus kompak, kita enggak boleh terpecah-belah," kata Sandiaga.

Dengan kolaborasi yang kuat, dia berharap target penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun ini dan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 dapat terwujud.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, membenarkan banyaknya sektor pariwisata yang dapat digarap Kemenparekraf.

"Ini kesempatan baik untuk kita. Potensi Kota Bekasi sebagai role model dari berbagai sektor patut kita jaga dan kita kembangkan. Ditambah, pe-

nilai menteri yang menjadi spirit kita untuk terus mengembangkan sektor-sektor tersebut,” ungkap Mas Tri, sapaan akrabnya.

Pemerintah Kota Bekasi, lanjut Mas Tri, berupaya menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor andalan. Pemkot Bekasi akan terus mengembangkan destinasi-destinasi pariwisata dan sentra ekonomi kreatif. Seperti Kampung Bali, Kampung Pancasila, dan lainnya.

Selain itu, dia juga menerangkan Pemkot Bekasi akan bangkit dari sektor pariwisata. “Kita punya hutan bambu, klenteng bersejarah, tujuh sumur mata air dan berbagai tempat wisata kearifan lokal budaya,” ujarnya.

Mas Tri menyebut, pengembangan sektor pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dari sisi ekonomi yang mampu mensejahterakan warga sekitar.

“Kami juga telah merancang agar lokasi ini (kawasan pasar proyek) menjadi daerah pecinaan yang memang menjadi destinasi yang kaya akan sejarah dan berbau budaya berbagai budaya masyarakat Kota Bekasi. Bukti Kota Bekasi dengan masyarakatnya yang harmonis,” kata Mas Tri.

Dia juga menyebut, Kota Bekasi merupakan kota perdagangan dan jasa yang difokuskan untuk meningkatkan perekonomian. “Banyak UMKM kita yang produknya sudah mampu bersaing, dari rasanya yang enak, kualitas yang baik, serta kemasan yang kekinian, kreatif dan sangat menarik. Kami menyambut baik kehadiran Pak Menteri di Kota Bekasi dan sangat mengapresiasi,” terangnya.

Mas Tri menambahkan, Pemkot Bekasi melalui Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) serta Dinas Koperasi dan UKM gencar melakukan berbagai event dan pemasaran yang bisa menjadi daya ungkit agar produk lokal memiliki tempat dan sejajar dengan produk lainnya.

Pemkot juga secara konsisten melalui dinas terkait melakukan, menciptakan event kreatif dan menggen-carkan pemasaran melalui berbagai sarana media, diharapkan ini menjadi

daya ungkit.

“Saat ini, produk UMKM kita sudah hadir di swalayan-swalayan dan mal, kita lakukan kolaborasi supaya produk lokal dapat sejajar dengan produk lainnya. Ini merupakan tugas dari seluruh ekosistem ekonomi dan pemerintah hadir memberikan fasilitas agar masyarakat semakin bahagia, menjadi kota yang makin optimis, bangkit dan keren,” katanya.

Selain itu, Mas Tri juga berharap

wilayah melalui program-program kreatif seperti ini dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Dia meyakini pengembangan batik khas daerah akan mampu membuat perekonomian Kota Bekasi terus tumbuh dan tangguh hingga dikenal sampai ke mancanegara. Seperti halnya kesenian tari ronggeng yang tadinya dinilai memiliki perspektif negatif, namun kini menjelma menjadi sebuah prestasi seni yang patut



batik Kota Bekasi bisa menjadi salah satu warisan budaya leluhur yang wajib untuk terus dilestarikan. Menurut, warisan budaya leluhur ini penting untuk dilestarikan sekaligus dikembangkan sebagai salah satu bentuk perwujudan visi daerah yang cerdas dan kreatif.

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus membangun

dibanggakan karena telah diterima secara luas.

“Tarian ronggeng kini telah beken dan diterima hingga di kancah nasional sebagai peninggalan seni dan budaya khas Bekasi. Kami akan berupaya maksimal membantu pemasaran Batik Bekasi sebagai produk warisan dalam negeri yang siap bersaing di pasar dunia,” pungkasnya. ●boy

VANILI TEMBUS PASAR INTERNASIONAL

Produk pertanian Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kemajuan dalam tiga tahun terakhir. Salah satu yang paling menonjol adalah hasil pertanian vanili yang mampu menembus pasar ekspor hingga ke Amerika Serikat.

Ekspor komoditas vanili NTB ke Amerika Serikat pada 2022 meningkat dua kali lipat menjadi 6,5 ton dari 2,4 ton pada 2021. Pada Agustus 2022, NTB mengirimkan 2,5 ton vanili ke Amerika Serikat melalui ekspor yang dilakukan oleh UD Rempah Organik yang merupakan binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB.

Pengiriman dilakukan secara ber-

bahan ekonomi NTB, khususnya dari sektor non-tambang terus berangsur membaik selama beberapa tahun terakhir.

"Kalau kita lihat grafik sekarang bagaimana ekspor di luar tambang ketika 2020 angkanya terus menurun, sekarang angka tersebut sudah bisa naik, di mana 2021 kita nikmati kenaikan yang begitu tinggi. Kalau kondisi ini terus kita pelihara, pere-

selama 2022. Tahun berikutnya akan berada pada kisaran 9 ton per tahun. Kalau dari sisi hulu siap, maka pasar akan secara terbuka untuk menyerap," terang dia.

Untuk menjaga keberlanjutan dari kegiatan ekspor NTB, Bank Indonesia melaksanakan pendampingan secara end-to-end process, yaitu pendampingan dari hulu ke hilir dengan menyertakan program community development di dalamnya.

"Mulai dari melakukan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas di sisi hulu sampai ke pendampingan untuk mengolah dan memproduksi produk turunan vanili di sisi hilir yang saat ini sedang diawasi oleh BI NTB," papar Heru.

Kepala Balai Karantina Kelas I Mataram, Arinaung, menyampaikan jumlah ekspor vanili selama tiga tahun terakhir yaitu sebanyak 1,4 ton di 2020, 2,4 ton di 2021, dan 6,5 ton di 2022.

"Keberhasilan peningkatan jumlah ekspor vanili tidak terlepas dari kerja sama dan pendampingan yang dilakukan oleh Tim Genjot Ekspor terhadap pertumbuhan komoditas vanili organik di NTB yang sudah dilakukan sejak 2020," kata dia.

Arinaung memaparkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan vanili sebagai komoditas unggulan yang strategis untuk dikembangkan di NTB. Salah satunya karena komoditas tersebut memiliki potensi dan peluang pasar yang sangat besar, apalagi kualitasnya yang sudah diakui oleh pasar internasional.

Kualitas vanili dari NTB telah diakui



tahap hingga akhir 2022 hingga mencapai target 6,5 ton. Pada 2023, ditargetkan ekspor vanili ke Amerika Serikat akan naik menjadi 9 ton.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Heru Saptaji, Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, Kepala Balai Karantina Kelas I Mataram, Arinaung, melepas ekspor pertama vanili organik NTB di 2022 sebanyak 2,5 ton dengan tujuan Amerika Serikat.

Heru mengatakan kondisi pertum-

konomian akan semakin membaik," kata Heru kepada Info Indonesia.

Heru menjelaskan, komoditas vanili akan menjadi new source engine of growth (sumber pertumbuhan ekonomi baru) di NTB pada tahun ini. Ekspor vanili NTB ditargetkan akan mencapai angka 6,5 ton, meningkat seratus persen atau dua kali lipat dari angka ekspor vanili di tahun sebelumnya.

"Tahun ini Mr. Bill membeli 6.5 ton

sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Selain itu, nilai ekonomi dari vanili juga terbilang menggiurkan, di mana petani dapat menghasilkan Rp25 juta perbulan jika memiliki seribu pohon vanili.

"Kita sudah mulai bergerak mendorong bagaimana vanili bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani," ulas Arinaung.

Direktur PT Singing Dog Vanilla, Bill Weidman menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terjalannya kerja sama ekspor ini. Ia berharap kerja sama tersebut akan terus berjalan dalam jangka panjang karena adanya persamaan tujuan untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kami memiliki tujuan yang sama, kami memiliki petani, kami merawat, kami mendukung untuk menanam vanili," ujar Bill.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menjelaskan bahwa dalam program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), potensi ekonomi NTB sebagian besar memang bersumber dari sektor pariwisata dan pertanian.

"Namun, dengan adanya ekspor vanili, kini NTB memiliki alternatif tambahan potensi unggulan yang akan membantu agar angka pertumbuhan ekonomi daerah tidak terjun bebas," terangnya.

Lalu Gita juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur PT Singing Dog Vanilla selaku pembeli yang diharapkan akan memiliki komitmen ke depan untuk terus bermitra dengan NTB. Sehingga dapat dipastikan potensi pasar vanili di daerah akan terus tersedia.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BI NTB atas komitmen tinggi yang sudah dilakukan untuk mengedepankan vanili sebagai persona dan unggulan baru di daerah.

"Mudah-mudahan dengan adanya komitmen pasar vanili beserta fasilitasi pemerintah dari aspek hulu hilirnya dapat terus ditingkatkan di daerah, agar produk unggulan kita tidak hanya tembakau, tidak hanya kelapa, tapi komoditi-komoditi unggulan

lain akan berkembang dengan baik. Kisah sukses ekspor vanili ini harus disebarluaskan agar masyarakat kita akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, termasuk menanam vanili," ujar Lalu Gita

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Baiq El Badriati, mengapresiasi terobosan Bank Indone-

BI NTB dalam mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya yang ada di wilayah NTB. Di tengah krisis dunia yang melanda, warga NTB dapat melakukan hal-hal yang positif dan menghasilkan. Tentu ini semua karena pendampingan perwakilan BI NTB kepada masyarakat untuk tetap melakukan hal-hal yang



sia Perwakilan NTB yang membidik pangsa pasar Amerika Serikat.

"Kita harus apresiasi terobosan baru Perwakilan Bank Indonesia NTB. Amerika ini sesuatu yang tidak mudah, namun BI NTB berhasil melakukan hal tersebut," ujarnya.

El Badriati menilai komitmen besar

produktif.

"Hal ini terbukti dengan melakukan ekspor vanili yang menembus internasional. Tentu ini adalah program yang harus terus dikembangkan, sehingga ke depan NTB benar-benar menjadi pengekspor vanili," kata El Badriati. ●



TINGKATKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN NTB

Penanganan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak hanya menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetapi juga lintas sektoral. Kuncinya adalah kolaborasi dalam mengedukasi dan mendiseminasi info agar warga bisa mengakses kesempatan kerja di luar negeri secara benar dan prosedural.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi, menegaskan aparat pengawas ketenagakerjaan bersama stakeholder terkait lainnya, termasuk pemerintah desa dan dusun, harus terus masif mengedukasi warga dan tidak boleh kalah dari calo atau mafia.

Untuk mencegah terjadinya kasus PMI non prosedural, pemerintah perlu secara masif memberikan informasi dan edukasi tentang bekerja di luar negeri kepada masyarakat. Fungsi bidang pengawasan dan penempatan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan.

"Harus ada kolaborasi yang kuat antara Disnaker provinsi dan kabu-

paten/kota hingga desa dan dusun, melibatkan stakeholder terkait, yaitu BP2MI, TNI/Polri, Dinas Sosial, BP3A-KB, Imigrasi dan NGO yang konsens terhadap buruh migran Indonesia," ujar Aryadi.

Peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting, terutama di desa dan dusun, dalam memberikan edukasi kepada warganya agar tidak berangkat dengan jalur non-prosedural. Orang yang berangkat ke luar negeri seringkali tidak diikuti informasi yang memadai.

Bahkan di 2022, muncul modus baru di mana calo dalam merekrut CPMI ke desa-desa dengan menggelontorkan uang fit sebesar Rp5-10 juta per orang.

Modus Calo datang membawa uang menjadi strategi ampuh untuk menarik minat dari para CPMI dan keluarganya. Terlebih tanpa memerlukan dokumen administrasi perjalanan, karena semuanya diurus oleh calo dan jaringannya, ditambah iming-iming gaji tinggi yang akan diterima setelah bekerja nanti sangat menggijurkan bagi CPMI.

Modus ini membuat CPMI lebih percaya kepada calo daripada petugas, terlebih bagi mereka yang belum memiliki informasi yang memadai tentang peluang kerja luar negeri berikut prosedur dan perusahaan resmi yang punya izin merekrut dan job order serta risiko yang akan dihadapi di negara penempatan nantinya.

Sebaliknya, dengan uang yang diterima di awal, CPMI malah beranggapan mendapatkan majikan yang baik dan royal, karena belum kerja saja sudah dapat uang.

Padahal uang fit tersebut merupakan jerat awal bagi CPMI, karena kenyataannya nanti setelah di negara penempatan, mereka akan dieksploitasi dan disiksa, bekerja tanpa mengenal batas waktu, bahkan tidak digaji karena majikan sudah membayar upah/gaji kepada calo/mafia di awal.

"Permasalahan PMI ini menyangkut nyawa manusia. Karena itu kita harus bersinergi bersama untuk mencari solusi setiap permasalahan PMI, baik dari hulu hingga ke hilir, termasuk bagaimana kita bisa mengampunasi langkah para calo ini dengan membentengi warga kita pemahaman yang baik tentang kesempatan kerja luar negeri," kata Aryadi.

Di hulu, informasi terkait pasar kerja luar negeri, data mengenai job order dan P3MI yang resmi akan dibuat lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat dengan cara membentuk fasilitas Pusat Informasi Migran pada Desa Desmigratif Mandiri.

"Kami akan bentuk Pusat Informasi Migran di Desmigratif Mandiri sebagai pionier untuk mensosialisasikan dan mengedukasi warga mengenai informasi tentang pasar kerja luar negeri. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah desa yang tercantum di UU 18/2017," ujarnya.

Berdasarkan data, PMI prosedural saat ini berjumlah 535.000 orang di 108 negara penempatan, di mana 70 persen PMI bekerja di Malaysia, lalu ke negara-negara Timur Tengah. Jumlah remitansi yang diterima oleh NTB setiap tahunnya mencapai Rp1,5 triliun.

Dari Januari hingga Mei 2022, tercatat sebesar lebih dari Rp500 miliar, dengan rincian melalui Western Union sebesar Rp271 miliar dan melalui bank milik pemerintah sebesar Rp240 miliar.

Di hilir, permasalahan PMI di negara penempatan timbul karena adanya izin konversi visa. Adanya kebijakan konversi visa yang berlaku di beberapa negara penempatan inilah yang dimanfaatkan oleh calo.

Biasanya, PMI non-prosedural berangkat dengan menggunakan visa kunjungan, visa umrah atau visa suaka. Kemudian, setibanya di negara penempatan, dengan adanya kebijakan konversi visa, mereka mendapatkan visa kerja dan izin tinggal, sehingga menjadi legal menurut aturan di negara tersebut.

"PMI yang berangkat dengan jalur non-prosedural tidak akan mendapatkan perlindungan yang memadai, karena semuanya diurus oleh mafia TPPO. Bahkan, PMI tersebut tidak mengetahui isi perjanjian kerjanya," ungkap Aryadi.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sudah menerapkan One Channel System (OCS) untuk mengurangi PMI ilegal.

rangkat secara non-prosedural.

"Saya berharap kepada pihak imigrasi agar lebih selektif untuk menerbitkan paspor, khususnya bagi warga desa yang mengajukan paspor atau visa kunjungan. Karena paspor kunjungan inilah yang seringkali digunakan untuk bekerja secara non prosedural," ungkapnya.

Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker, Muhamad Nico, mengapresiasi Disnakertrans NTB. "Saya melihat Kadisnaker yang sangat kompeten dan benar-benar paham luar dalam tentang permasalahan PMI dari hulu hingga hilir," pujiannya.

Nico menyarankan agar pemerintah desa seharusnya lebih peka terhadap warganya yang akan berangkat ke luar negeri. Jangan sampai pemerintah



"Kita harap Pemerintah Indonesia dapat membuat sistem yang sama di negara lain yang masih mengizinkan konversi visa, dengan harapan kita bisa ikut mengawasi," ujarnya.

Aryadi mengungkapkan, permasalahan PMI ini terdiri dari empat kasus. Pertama, PMI ilegal yang direkrut secara ilegal melalui calo. Kedua, PMI legal berangkat secara prosedural, tetapi setelah di negara penempatan melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk bekerja sehingga menjadi ilegal.

Ketiga, PMI legal berangkat secara prosedural tetapi memperpanjang kontrak tidak melalui prosedur sehingga menjadi ilegal. Terakhir, PMI yang memiliki track record tidak bagus, sudah di blacklist negara penempatan, tetapi mencari banyak cara untuk be-

desa ikut dalam pola permainan yang dilakukan oleh calo.

"Pengawas ketenagakerjaan berhak untuk memverifikasi apakah ada potensi bahwa penempatan PMI tersebut non-prosedural," ujar Nico.

Sub Koordinator Pemeriksaan Norma Pelatihan dan Penempatan Direktorat Jenderal Binwasnaker Kementerian Ketenagakerjaan, M Rizki, mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya, selama melakukan sidak di penampungan CPMI non-prosedural dengan negara tujuan Timur Tengah, rata-rata PMI tersebut ditempatkan di kamar ukuran 3x4 meter yang diisi belasan ibu-ibu.

"Jadi, rumah tipe 36 akan diisi sebanyak 59 orang dengan dua kamar mandi, bahkan carport pun dijadikan tempat tidur," ujarnya. ●



MEMBANGUN SDM UNGGUL KEBUTUHAN IKN NUSANTARA



Terpilihnya Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan berkah sekaligus peluang besar. Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi sudah menyiapkan langkah strategis untuk menangkap peluang besar itu dengan membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Salah satunya melalui program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT). Melalui Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur (BPBKT), Pemprov Kaltim sudah menyalurkan beasiswa bagi putra putri asal Benua Etam yang menempuh pendidikan dari pendidikan dasar 12 tahun (SD, SMP dan SMA) hingga pendidikan tinggi (S-1, S-2 dan S-3).

Program BKT sudah berjalan sejak 2019 atau sudah dimulai pada tahun pertama periode Gubernur Isran Noor

dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.

"Program beasiswa ini memang tidak bisa kita rasakan langsung dampaknya terhadap pembangunan sekarang, namun 10-20 tahun ke depan akan kita lihat generasi muda sebagai penerus tongkat estafet pembangunan di Kaltim dan IKN Nusantara nantinya," tegas Gubernur Isran Noor dalam berbagai kesempatan.

Generasi muda yang dimaksud adalah putra putri Kaltim yang awalnya disiapkan mampu bersaing dengan SDM

dari daerah lainnya di Indonesia. Namun, seiring dengan dibangunnya IKN Nusantara di Kaltim, maka generasi muda inilah yang diharapkan mampu mengisi SDM yang dibutuhkan di IKN Nusantara yang pembangunan awalnya direncanakan pada Agustus tahun ini.

"Karena memang IKN Nusantara ini dibangun secara bertahap, tepatnya lima tahap, yaitu tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua 2025-2029, tahap ketiga 2030-2034, tahap keempat 2035-2039 dan tahap kelima 2040-

2045. Sehingga, nantinya generasi muda kita sekarang inilah yang akan berperan dalam lanjutan pembangunan dan berjalannya IKN Nusantara nantinya,” urai Isran Noor.

Dijelaskan, bahwa menyiapkan SDM Kaltim berkualitas juga seiring dengan misi pertama visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat. Yaitu berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Dalam misi tersebut, sangat jelas Pemprov Kaltim tidak membeda-bedakan masyarakat Kaltim. Selama mereka (putra putri) yang lahir dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kalimantan Timur, maka berhak untuk mengikuti dan mendapatkan program Beasiswa Kalimantan Timur, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, Pemprov Kaltim melalui BPBKT membuka beberapa kategori untuk 2022. Yaitu kategori tuntas, terdiri dari tuntas prestasi akademik, tuntas prestasi non-akademik, tuntas khusus miskin, tuntas khusus hafiz, tuntas khusus 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), tuntas khusus anak berkebutuhan khusus, dan tuntas khusus anak/cucu veteran.

Selanjutnya, kategori stimulan, yaitu stimulan prestasi akademik, stimulan prestasi non-akademik, stimulan khusus miskin, stimulan khusus hafiz, stimulan khusus 3T, stimulan khusus anak berkebutuhan khusus, stimulan anak/cucu veteran, stimulan KDRT, stimulan khusus tugas akhir, stimulan profesi, spesialisasi dan sertifikasi.

“IKN ini tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah bersama masyarakatnya. Kami memberikan bekal pendidikan dan keterampilan kepada masyarakat melalui program Beasiswa Kalimantan Timur yang sudah berjalan di tahun keempat ini. Sehingga ketika masanya IKN sudah berpindah, maka

sumber daya manusia Kaltim sudah siap bersaing dan berkompetisi,” terang Isran Noor.

Sejak 2019 hingga 2021, setidaknya 62.295 putra-putri Kalimantan Timur, baik pelajar maupun mahasiswa, telah menerima beasiswa dari Pemrov Kalimantan Timur di bawah duet kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Total anggaran yang telah dikucurkan (2019-2021) kurang lebih sebesar Rp496,8 miliar.

Pada tahun keempat, Pemrov Kaltim kembali mengalokasikan anggaran untuk beasiswa Kaltim sebesar Rp156,4

daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas,” terang Kepala Badan Pengelola Beasiswa Kaltim (BPBKT), Iman Hidayat.

Iman Hidayat menyebut setidaknya 84.189 pelajar dan mahasiswa Benua Etam telah mendaftar BKT pada 2022. Dari jumlah tersebut, terbagi dalam tiga kategori yaitu kategori Tuntas Mahasiswa sebanyak 14.212 pendaftar, Stimulan Mahasiswa (17.150 pendaftar) dan Stimulan Siswa (52.827 pendaftar).

“Hasil seleksi tahap pertama telah diumumkan pada 10 Agustus 2022 lalu di laman resmi beasiswa.kaltimprov.go.id.



Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Riza Indra Riadi

miliar dalam APBD Murni 2022.

“Sejak awal masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Isran Noor-Hadi Mulyadi memang telah berkomitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Timur, sebagaimana yang tertuang dalam misi pertama visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat, yaitu berdaulat dalam pembangunan sumber

Bagi yang sudah dinyatakan sebagai calon penerima, maka akan dibuatkan rekening baru oleh bank penyalur (BTN, BRI, Mandiri) sesuai pilihan. Kami (BPBKT) juga masih memberikan masa pengaduan bagi mahasiswa terhadap hasil seleksi yang sudah diumumkan sampai dengan Selasa, 17 Agustus 2022,” jelas Iman.

Mantan Plt Kepala Bappeda Kaltim ini menambahkan, Beasiswa Kalimantan Timur baru akan cair setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur dan kesiapan bank penyalur. Calon penerima beasiswa pun diwajibkan untuk terus memantau informasi di laman Beasiswa Kalimantan Timur agar tidak ketinggalan tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dilakukan.

“Bagi pelajar dan mahasiswa yang masuk daftar tunggu, yang akan diseleksi atau diverifikasi di tahapan berikutnya,

• INFO KALIMANTAN TIMUR

maka silakan menunggu pengumuman beasiswa tahap II," tambah Iman.

Untuk target penerima beasiswa, Iman menyebut belum bisa menetapkan. Hal ini karena tim verifikasi dan validasi masih akan menghitung jumlah penerima beasiswa disesuaikan dengan besaran uang kuliah tunggal (UKT/SPP) masing-masing calon penerima beasiswa.

Komitmen Tingkatkan SDM

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mengatakan, Pemprov Kaltim berkomitmen tinggi atas pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat local. Salah satunya melalui program kerja sama

Program yang dilaksanakan Australian Awards Indonesia di Doubletree by Hilton Hotel Jakarta.

Australia Awards Indonesia sendiri sudah melaksanakan kegiatan ini secara penuh sejak 2016, di mana sebelumnya sejak 2012-2014 masih melaksanakan tahapan uji coba.

Dalam pertemuan ini membahas tiga poin utama, di antaranya mengenal sesama Lembaga, baik dari Australia maupun Indonesia, memastikan semua yang bekerja sama memahami tujuan dari Split Site Master Program (SSMP) yang dijalankan, dan membahas apa saja dampak dari kerja sama yang dilaksanakan.

warman dan tim dari Beasiswa Kaltim Tuntas.

Update Kompetensi Diri

Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Riza Indra Riadi, mengatakan, era globalisasi menuntut masyarakat untuk dapat bersaing dan adaptif serta memiliki inovasi. Kemampuan untuk mengupdate kompetensi diri harus dimiliki jika ingin mampu bertahan.

"Kita harus mampu membaca dan adaptif terhadap perubahan yang bergerak dinamis di era globalisasi ini," tutur Riza mewakili Gubernur Kaltim saat memberi arahan pada Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Swiss Bell Inn, Samarinda, Sabtu (7/8/2022).

Riza mengatakan, dalam upaya peningkatan SDM Kaltim, Pemprov Kaltim pun melakukan berbagai upaya mulai peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa hingga bantuan sarana bagi tenaga pendidik. Hal tersebut seiring dengan misi pertama visi Kaltim Berdaulat yaitu berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama bagi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

"Salah satu implementasinya yaitu pemberian Beasiswa Kaltim dengan skema beasiswa tuntas dan stimulan," sebut Riza.

Selain pemberian beasiswa, Pemprov Kaltim juga memberikan bantuan komputer jinjing (laptop) kepada guru setingkat SMA/SMK melalui program one teacher one laptop. Selain sebagai upaya peningkatan sarana pembelajaran jarak jauh, juga sebagai program menuju revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

Ketua DPD ADRI Kaltim, Husni Thamrin, mengatakan jajarannya akan melakukan konsolidasi guna menyusun program-program kegiatan sesuai hasil muskernas di Surabaya beberapa waktu lalu.

"Kita akan susun program bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM unggul di Kaltim. Terlebih Kaltim ditunjuk menjadi IKN," kata Husni. ●



pendidikan antara Pemprov Kaltim dengan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

"Kami harapkan kerja sama di bidang pendidikan antara Indonesia dan Australia melalui lembaga khusus antar negara dapat semakin mempererat hubungan kedua negara, termasuk Kaltim yang memang sudah sejak lama bekerja sama dengan beberapa universitas di Australia melalui program Beasiswa Kaltim Tuntas," kata Hadi Mulyadi, Kamis, 11 Agustus 2022.

Hadi Mulyadi didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menghadiri acara Consultation Workshop For Split Site Master

Adapun penawaran kerja sama yang diberikan untuk program Magister dan PhD serta kursus singkat. Dengan tujuan untuk mendukung pembangunan Indonesia melalui kontribusi positif dari para profesional berkualitas Australia dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Australia, yang fokus pada tiga bidang prioritas, yaitu keamanan, kesehatan, stabilitas dan pemulihan ekonomi.

Beberapa lembaga yang turut hadir pada kegiatan ini di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, Badan Pusat Statisti (BPS), beberapa perwakilan universitas di Indonesia dan Australia, di mana untuk Kalimantan Timur turut hadir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Universitas Mula-

TETAP TAAT PROKES, SEGERA LENGKAPI VAKSINASI

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menghadiri secara langsung undangan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada acara peluncuran Buku Laporan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia dan Diskusi Panel Evaluasi Vaksinasi COVID-19 di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Kamis (11/8/2022).

Airlangga mengungkapkan, walaupun kondisi perekonomian sudah relatif baik, di mana pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2022 tumbuh 5,01 persen (yoy), tetapi pada masa awal pandemi pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mengalami kontraksi sebanyak 4 kali berturut-turut sejak kuartal II-2020. Bahkan pernah mencapai -5,32 persen. Kondisi inilah yang mengharuskan pemerintah menyusun strategi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 melalui program vaksinasi yang diharapkan sebagai game changer penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah menyusun berbagai strategi kebijakan untuk melaksanakan percepatan distribusi vaksin dan pemberian vaksinasi dalam kondisi berpacu melawan laju transmisi virus dan situasi krisis. Upaya percepatan vaksinasi didukung semua sektor dari pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Hingga saat ini capaian vaksinasi adalah 97,17 persen untuk dosis 1, serta sekitar 81,61 persen untuk dosis 2 dan kisaran 26,64 persen untuk dosis 3 (booster). Diperlukan konsolidasi kembali untuk dapat meningkatkan capaian vaksinasi, karena vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional," kata Airlangga.

"Dan buku laporan vaksinasi COVID-19 ini berisi pencatatan linimasa kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir dalam penanganan COVID-19, sekaligus evaluasi dalam kebijakan-kebijakan publik yang telah dibuat untuk penanganan COVID-19 di Indonesia," sambungnya.

Gubernur Isran Noor mengapresiasi

peluncuran buku laporan vaksinasi COVID-19 oleh Kemenko Perekonomian sebagai bentuk cakupan penanganan virus corona di Indonesia yang sudah berlangsung sejak Maret 2020.

Untuk Kaltim, kata Isran, capaian vaksinasi hingga 11 Agustus 2022 adalah 90,70 persen untuk dosis 1, 79,68 persen untuk dosis 2, kisaran 40,9 persen untuk dosis 3 dan ada 18,58 persen untuk dosis 4.

"Kami terus melakukan percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi sebagai

"Masker itu penting karena dia melindungi diri kita sendiri sekaligus juga menjaga orang lain," ujarnya.

Orang nomor satu di Benua Etam ini juga menyinggung tingginya kasus positif aktif di Kota Balikpapan yang telah mencapai 281 kasus. Bahkan, telah ditetapkan zona merah sejak Juli 2022. Karenanya, ia mendorong agar Satgas maupun Pemkot Balikpapan untuk genjar melakukan testing dan tracing sebagai langkah pencegahan dini.

"Balikpapan melakukan pemeriksaan



Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menerima secara simbolis Buku Laporan Vaksinasi COVID-19 dari Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Kamis (11/8/2022). (Humas Pemprov Kaltim)

upaya untuk mencegah dan menekan penularan COVID-19 di wilayah Benua Etam yang memang kondisi geografisnya berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Buku ini tentu dapat menjadi acuan bagi kami untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan penanganan COVID-19, khususnya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi," kata Isran Noor.

Isran Noor meminta masyarakat untuk menaati protokol Kesehatan, seperti selalu menggunakan masker, mengingat kasus COVID-19 di Kaltim yang meningkat.

Mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) itu mengatakan, menggunakan masker akan mencegah penularan kasus COVID-19. Apalagi di Kaltim telah ditemukan subvarian baru COVID-19.

sangat ketat. Makanya kasus positifnya banyak. Bagus itu, tidak usah kecewa. Justru itu prestasi. Tapi kita patut bersyukur karena fatality ratelynya nol," tuturnya.

Terhitung hingga 16 Agustus 2022, terkonfirmasi positif virus corona masih terjadi dengan 27 kasus, menurun dibanding sehari sebelumnya yakni 32 kasus.

Isran Noor juga mengingatkan bahwa COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Komitmen masyarakat, seluruh elemen dan pemerintah juga dibutuhkan untuk terus bisa bekerja sama dalam mengendalikan serta mencegah terjadinya penyebaran. Karena, masih ada negara-negara besar yang kondisi COVID-19 mengkhawatirkan. ●



PEMANGKASAN HONORER BIKIN PUSING WALI KOTA

Kebijakan penghapusan tenaga honorer yang tercantum dalam PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi isu utama yang diangkat pada Rapat Kerja Nasional ke-XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 8 Agustus 2022.

Selain masalah pemangkas tenaga honorer, Rakernas Apeksi yang mengangkat tema "Kota Kita Bangkit, yang Maju yang Bersinergi", tantangan lain yakni pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

Ketua Apeksi, Bima Arya, menyebutkan para wali kota di Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan yang berat ke depannya.

"Tantangannya cukup berat. Ada reformasi birokrasi, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemangkas tenaga honorer hingga tahapan Pilkada," kata Bima Arya dalam acara pembukaan.

Bima Arya menyebutkan, semua wali kota saat ini memiliki beban dan tantangan yang sangat berat. Mereka dihadapkan beragam tantangan seperti melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Kami diminta untuk memangkas

karyawan. Staf honorer kami dipangkas, jabatan fungsional diminta diterapkan, lalu kami diminta meningkatkan komponen penggunaan di dalam negeri. Belum lagi ada tahapan Pilkada yang anggaran belanja dicicil untuk membiayainya," ujarnya.

Menurut Bima Arya, jika pemerintah pusat tidak serius dan tidak memiliki komitmen yang sama dengan wali kota atau peraturan turunannya tidak tepat, maka yang akan dirugikan adalah daerah. Setiap daerah berpotensi kehilangan pendapatan bahkan

kewalahan merespons aduan dari masyarakat.

“Kami siap *fight* untuk menunaikan tugas, tapi kami minta pemerintah pusat bersama-sama. Jangan kita yang ada di depan, pemerintah pusatnya tidak komitmen,” ujarnya.

Bima Arya juga menilai ada kementerian yang sejalan dengan pemerintah daerah, meski ada beberapa di antaranya belum sejalan, terutama perihal melahirkan peraturan turunan.

Ia meminta kepada seluruh kementerian agar bersama pemerintah kota mengamankan itu semua.

“Jadi tugas yang berat ini menurut saya harus diselesaikan bersama-sama. Masalah honorer ini tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan kepada pemerintah kota saja. Kami akan bicarakan itu di sini,” tutur Bima Arya.

Menurut Wali Kota Bogor ini, semua persoalan itu tidak bisa wali kota sendiri menyelesaikannya, tapi butuh bantuan pemerintah pusat.

Wali Kota Serang, Syafrudin, menyikapi rakernas kali ini yang membahas hal-hal yang tidak sesuai aspirasi wali kota se-Indonesia. Terutama kaitannya dengan honorer yang akan dihapus oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian peningkatan ekonomi, infrastruktur dan suksesi kepemimpinan, kebijakan regulasi UU Cipta Kerja. Lalu perizinan yang tergerus kewenangannya selama ini oleh pusat diminta dikembalikan ke daerah.

Menurut Syafrudin, yang terpenting bagi Pemkot Serang adalah tentang tenaga honorer dan regulasi UU Cipta Kerja yang membuat pemerintah daerah tidak diberi kewenangan.

Sedangkan, selaku tuan rumah, Wali Kota Padang, Hendri Septa, menuturkan, rakernas kali ini menjadi pertemuan kerja sama berbagai bidang antar kota.

“Selain menjadi ajang silaturahmi dan tukar pikiran antar kota di Indonesia, rakernas diharapkan menjadi pertemuan untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang antar kota, yang pada gilirannya menjadikan momentum peningkatan ekonomi daerah,” tutur Hendri.

Diharapkan hasil Rakernas kali ini

bisa diterima oleh pemerintah pusat dan ditanggapi dengan serius, sehingga permasalahan yang dihadapi pemerintah kota bisa diselesaikan dengan baik.

Rakernas Apeksi yang diikuti 98 wali kota se-Indonesia itu dibuka Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, di Hotel Truntum, Padang.

Zulhas mengajak seluruh wali kota untuk saling bersinergi dan berkolaborasi, khususnya di bidang perdagangan.

ranya adalah optimalisasi transformasi digital serta peningkatan ekspor. Saatnya go internasional. Kami di kementerian bikin jalan tolnya, daerah serbu pasar internasional,” harap Zulhas.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyambut baik harapan Zulhas untuk menjalin sinergi dan kerja sama antar pemerintah daerah dan membidik pasar perdagangan ekspor.

“Saatnya Indonesia tampil lebih baik lagi secara internasional, karena



“Keadaan pangan sangat menentukan stabilitas negeri kita. Wali kota harus memantau terus. Peran wali kota sangat menentukan, khususnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan surplus perdagangan,” ujar Zulhas.

“Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh wali kota, Insya Allah Indonesia akan mampu bangkit dan maju sesuai tema kemerdekaan RI tahun ini. Poin penting yang harus dilakukan di anta-

kita memang punya potensi besar, seperti produksi pertanian, Indonesia harus jadi pengendali. Dengan kekuatan bersama kota dan kabupaten, kami yakin Indonesia bisa tampil lebih baik,” kata gubernur.

“Dengan bersinergi, kerja sama kita akan saling melengkapi kekurangan dan kebutuhan masing-masing, menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan dengan lebih cepat dan mudah,” sambungnya. ●

TIDAK ADA LAGI TENAGA HONORER

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan rencana penghapusan tenaga honorer di pemerintah pusat maupun daerah mulai 2023. Keputusan ini bukan merupakan kebijakan yang tiba-tiba.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023 dan akan menentukan nasib 400.000 tenaga honorer yang 120.000 di antaranya merupakan tenaga pendidik, 4.000 tenaga kesehatan, dan 2.000 tenaga penyuluh.

Masalah penghapusan tenaga honorer bukan pertama kali terjadi. Setidaknya, pasca pemberlakuan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, keberadaan honorer semakin menjadi tanda tanya. Sebab, UU ASN hanya merumuskan dua jenis hubungan kerja pegawai pemerintah, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sedangkan, kedudukan tenaga honorer tak kunjung diatur dasar hukumnya hingga menyebabkan ketidakjelasan status dalam sistem kepegawa-

ian negara. Selama ini, keberadaan tenaga honorer kerap kali membawa dilema kebijakan. Bila berkaca dari sisi regulasi, jelas tenaga honorer tidak lagi dimasukkan dalam skema kepegawaian pemerintah. Namun, dalam proses implementasi di lapangan, aturan tersebut masih jauh panggang dari api.

Mayoritas instansi, khususnya di daerah tetap saja membuka keran penerimaan tenaga honorer, lantaran jerat kebutuhan organisasi untuk menutupi beban kerja yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya oleh ASN.

Penataan SDM aparatur

Cita-cita reformasi birokrasi salah satunya bermuara pada upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas dan berdaya saing. Langkah pencapaiannya dilakukan dengan menerapkan proses manajemen ASN dengan baik dan konsisten, termasuk penguatan pada aspek perencanaan

dan pengadaan ASN di lingkup pemerintahan.

Pada tahap perencanaan, kebutuhan organisasi akan disusun oleh masing-masing instansi pemerintah yang menghasilkan rincian kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun jenis jabatan. Kebutuhan organisasi ini sepenuhnya mengacu pada prioritas kebutuhan berdasarkan rencana strategis instansi pemerintah dan dinamika lingkungan yang berkembang. Namun, jika melihat fenomena yang terjadi, jelas perencanaan kebutuhan ASN seringkali tidak berjalan dalam koridor.

Maraknya perekrutan tenaga honorer di luar ketentuan yang berlaku seolah menjadi pertanda, jika jalan pintas mengisi kekosongan peta jabatan cenderung dilakukan secara spontan ketimbang memperhatikan perencanaan yang solid. Tidak hanya dalam konteks perencanaan, anomali berikutnya juga kerap terjadi dalam proses pengadaan pegawai pemerintah.

Alih-alih melakukan pengadaan melalui rekrutmen dan seleksi terbuka dan adil dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi, namun kenyataannya keputusan mengangkat tenaga honorer selalu menjadi pilihan utama.

Belum lagi mayoritas perekrutan masih jauh dari keterbukaan yang mempertemukan potensi dan kompetensi. Dampaknya, tak sedikit ruang dalam birokrasi hanya diisi oleh para pencari kerja semata berkapasitas medioker.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Alex Denni, mengatakan, kebijakan itu direncanakan sejak 2005 di mana terjadi pembengkakan tenaga kerja honorer. Keputusan tersebut tertuang dalam surat Menpan RB No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.

"Sebetulnya ini bukan ujug-ujug. Tapi sudah dari 2005. Itu sudah inven-



tarisir," kata dia.

Dia menjelaskan, awalnya pada 2005 hanya ada 900 ribu tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Lalu sekitar 860 ribu tenaga honorer tersebut diangkat sebagai PNS.

Dengan demikian, maka sisanya seharusnya menjadi 40 ribuan tenaga honorer di instansi pemerintah. Namun, begitu didata ulang, terjadi pembengkakan, sehingga jumlah tenaga honorer menjadi 600 ribuan atau meningkat lebih dari 10 kali lipat jumlah awal.

Sejak saat itu, pemerintah pun melarang instansi untuk merekrut tenaga honorer. Artinya, pemerintah sudah lama menyusun rencana proses penghapusan tenaga honorer ini.

"Sebenarnya instansi pemerintah sudah dilarang merekrut tenaga honorer dan sejenisnya sejak 2005, melalui PP 48/2005 di pasal 8. Jadi sudah sangat lama prosesnya," kata Alex.

Kemudian, pembengkakan jumlah tenaga honorer di tiap instansi ini juga akhirnya mendorong pemerintah menerbitkan UU 5/2014. Dalam aturan, ditetapkan hanya ada dua kategori ASN, yakni PNS dan PPPK. UU ini kemudian diturunkan menjadi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam aturan ini disebutkan bahwa tenaga honorer menyelesaikan tugasnya paling lambat hingga 2023. Setelah itu, diharapkan tidak ada lagi honorer di instansi pemerintah.

"PP itu kan turunan dari UU yang harus dijalankan," kata dia.

Honorer diberikan pilihan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Akan tetapi, apabila tidak lulus, ada opsi lain yaitu menjadi tenaga outsourcing sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.

Menanggapi keputusan itu, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, meminta Kemenpan RB menyiapkan skema yang jelas guna memastikan nasib ratusan ribu tenaga honorer yang tersebar di instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

"Kemenpan RB harus punya rencana yang jelas untuk kelanjutan kerja tenaga honorer itu sebelum batas waktu 2023. Jika posisi tenaga honorer di-

hapus Kemenpan RB, maka harus ada kepastian mereka mau diapakan. Apakah akan dijadikan outsourcing atau tenaga kontrak atau ada alternatif lain," ujar Doli.

Sementara, anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan, jika tidak segera di-

jadi salah satu sebab pengangguran masih cukup tinggi di Februari 2022 yang tercatat 8,4 juta orang.

Kurniasih mengatakan, perlu koordinasi lintas kementerian, termasuk antara Kemenpan RB, Kemendagri dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan strategi agar tenaga



carikan solusi, ratusan ribu tenaga honorer akan menambah angka pengangguran terbuka dan pasti berdampak pada aktivitas ekonomi nasional.

Menurut data Kemenpan RB, per Juni 2021 ada 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Pada seleksi CASN 2021, sekitar 51.492 lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Sementara, 358.518 pegawai honorer lain berpotensi tidak memiliki pekerjaan alias menganggur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tidak ada lowongan CPNS men-

honer di pemerintahan mendapatkan solusi.

"Kami minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Ketenagakerjaan juga ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker. Maka sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini," ucap Kurniasih.

Sejauh ini, baru ada solusi bagi tenaga honorer di bidang pendidik. Sementara, tenaga honorer lain seperti di bidang kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi konkret. ●rhd/***



KENAIKAN TARIF OJEK DARING ANTARA HARAPAN DAN KEKHAWATIRAN

Harapan para pengemudi ojek daring atau ojol agar mendapatkan kenaikan pendapatan bisa jadi segera terwujud setelah Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan terbaru tentang biaya jasa ojek daring. Namun, ada kekhawatiran bahwa aturan itu tak berdampak signifikan bagi pendapatan para mitra ojol.

Selama tiga tahun terakhir, tarif ojek daring yang dinilai terlalu rendah mendapatkan protes dari para mitra pengemudi karena menurunnya pendapatan. Problem tersebut mendorong sejumlah pengemudi melakukan aksi protes di berbagai daerah.

Demi mendorong peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi di tengah lonjakan harga energi, pada 4 Agustus 2022, Kemenhub mengeluarkan aturan terbaru tentang biaya jasa ojek online. Aturan dalam bentuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 itu menetapkan biaya jasa ojol terbaru yang harus diikuti oleh perusahaan aplikasi ojek daring 10 hari setelah ditetapkan. Namun, Ke-

menhub memberikan kesempatan untuk penerapan penyesuaian itu 25 hari setelah aturan ditetapkan.

Tarif ojol yang baru ini diatur dalam 3 zona berbeda dan terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan bawah, serta biaya jasa minimal per 5 km pertama.

Berdasarkan KM 564/2022 itu, Zona I meliputi Sumatera, Bali, dan Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Biaya jasa batas bawah Rp1.850 per kilometer dan biaya jasa batas atas Rp2.300 per km. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.250-11.500 dari sebelumnya Rp7.000-10.000.

Kemudian, Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan biaya jasa

batas bawah Rp2.600 per km dari sebelumnya Rp2.000, dan biaya jasa batas atas Rp2.700 per km dari sebelumnya Rp2.500. Lalu, biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp13.000-13.500 dari sebelumnya Rp8.000-10.000.

Selanjutnya, Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Biaya jasa batas bawah Rp2.100 per km dan biaya jasa batas atas Rp2.600 per km. Lalu, biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp10.500-13.000 dari sebelumnya Rp7.000-10.000.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno, menjelaskan, pihaknya baru saja melakukan peninjauan kem-

bali terhadap waktu penerapan aturan tarif ojol ini. Hasilnya, butuh waktu lebih lama untuk melakukan sosialisasi sebelum KM 564 bisa diterapkan.

"Semula dalam KM Nomor KP 564/2022 tertulis bahwa pemberlakuan efektif dilakukan maksimal 10 hari kalender. Kemudian, berdasarkan hasil peninjauan kembali diperlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan sosialisasi terhadap tarif baru ini bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat moda angkutan ojol berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas," papar Hendro dalam keterangannya, Minggu (14/8/2022).

Dia menyatakan, penambahan waktu sosialisasi tarif ojol yang baru ini berdasarkan masukan dari seluruh pihak. Hendro berharap terkait waktu penyesuaian tarif di aplikasi, maka aplikasi juga dapat segera menerapkan tarif baru serta meningkatkan pelayanan bagi penumpang, termasuk menjamin keselamatan penumpang.

Perubahan biaya jasa tersebut memang sangat diperlukan untuk saat ini. Mengingat adanya perubahan harga bahan bakar minyak yang sangat berdampak bagi pengemudi ojek online. Pengeluaran operasional meningkat seiring dengan bertambahnya harga-harga barang kebutuhan lainnya akibat kenaikan harga energi. Akibatnya, pendapatan riil mitra pengemudi menurun.

Kebijakan kenaikan tarif tersebut menuai respons beragam baik dari masyarakat maupun dari mitra ojol sendiri. Masyarakat sebagai pengguna menilai kenaikan tarif itu dirasa kian memberatkan. Pasalnya, layanan ojek daring sudah menjadi kebutuhan mobilitas sehari-hari, sehingga akan menambah biaya pengeluaran.

Di sisi lainnya, pengemudi ojol merasa lega dengan adanya kenaikan tarif tersebut. Sebab, harapan penyesuaian tarif itu sudah disuarakan sejak lama. Bahkan, sejak pemerintah pertama kali menetapkan aturan tarif dasar layanan ojek daring pada 2019. Kenaikan tarif itu menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pendapatan harian pengemudi ojol.

Pendapatan Dalam Tren Menurun

Dikutip dari Litbang Kompas, tren pe-

nurunan pendapatan pengemudi ojek daring cukup signifikan terjadi dalam kurun 2014-2019. Penurunan pendapatan itu dirasakan oleh 63 persen dari 200 orang responden pengemudi ojek daring Gojek dan Grab di wilayah DKI Jakarta.

Dalam survei itu, penurunan pendapatan dihitung dari selisih rata-rata pendapatan awal responden yang bekerja sebagai pengemudi ojol dengan pendapatan terkini saat survei berlangsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin lama responden bekerja sebagai mitra ojek daring, semakin besar penurunan pendapatannya.

Rata-rata pendapatan tiap responden saat survei berlangsung pada 2019 adalah Rp3,9 juta. Nominal

run 2014-2018, rata-rata penurunan penghasilan pengemudi ojek daring per tahun mencapai 29 persen. Penurunan pendapatan itu setidaknya dipengaruhi sejumlah factor, di antaranya perang tarif antarperusahaan aplikasi ojek daring, skema bonus atau insentif, serta persaingan kian ketat antarpengemudi ojek daring.

Perang tarif antarperusahaan penyedia jasa ojek daring dilakukan dengan menawarkan tarif lebih rendah demi bersaing mendapatkan konsumen. Hal ini jelas-jelas merugikan pengemudi ojol karena semakin rendah tarif yang dipasang semakin rendah pula pendapatannya. Begitu pula skema bonus yang bergantung pada kebijakan dan aturan dari perusahaan penyedia jasa



Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno

ini timpang sangat jauh karena umumnya responden yang sudah mulai bekerja pada masa-masa awal 2014 rata-rata bisa menerima penghasilan hingga Rp10,9 juta. Artinya, dalam kurun waktu 2014-2019, responden mengalami penurunan pendapatan hingga sekitar Rp7 juta.

Selisih pendapatan yang diterima antara 2018-2019 hanya sekitar Rp82.000. Selisih susut angka ini jauh berbeda dengan responden yang sudah menjadi pengemudi ojol sejak 2014. Perbedaan selisih nilai tersebut disebabkan nilai pendapatan yang kian menurun.

Menurut hasil survei, dalam ku-

ojek daring. Meskipun nilai semakin besar, pengemudi merasa skema baru itu menyulitkan mereka untuk mendapatkan insentif.

Kian banyaknya pengemudi ojol seperti saat ini turut mendorong kompetisi yang tinggi dan berakibat pada turunnya pendapatan para pengemudi. Sebagai perbandingan, pada 2017 Gojek memiliki sekitar 250.000 mitra pengemudi dan Grab memiliki 150.000 mitra pengemudi. Pada 2022, jumlah pengemudi ojol yang bermitra dengan Gojek dan Grab mencapai lebih dari 4 juta orang. Banyaknya jumlah driver itu membuat persaingan untuk mendapatkan penumpang semakin

ketat.

Susutnya pendapatan tersebut membuat para pengemudi bergantung harapan pada kebijakan pemerintah dan perusahaan penyedia jasa. Tuntutan untuk menaikkan tarif pun menjadi solusi yang diharapkan dapat mengurangi beban pengemudi ojol. Oleh sebab itu, aturan biaya jasa terbaru yang ditetapkan pemerintah diharapkan memberi kelegaan bagi para pengemudi.

Meskipun demikian, masih ada satu hal yang diperjuangkan oleh pengemudi, yakni terkait biaya sewa penggunaan aplikasi. Biaya sewa ini memang menjadi komponen yang dihitung untuk menetapkan tarif dasar baru ojek daring. Tarif dasar yang ditetapkan dalam peraturan juga sudah dipotong biaya sewa tersebut, sehingga tidak memengaruhi nilai yang diterima pengemudi.

Menurut peraturan, biaya sewa penggunaan aplikasi ditetapkan perusahaan maksimal 20 persen. Kendati sudah ditetapkan demikian, para pengemudi tetap khawatir regulasi itu tidak benar-benar dijalankan perusahaan.

Menurut beberapa komunitas ojek daring yang berunjuk rasa di sejumlah daerah, potongan biaya jasa dinilai memberatkan. Pasalnya, besaran potongan biaya sewa bila dihitung melebihi 20 persen, sehingga ada kekhawatiran jika tarif dinaikkan, maka besaran potongan juga ikut bertambah. Alhasil, hal itu cenderung menguntungkan perusahaan dari pada pengemudi.

Mengerek Inflasi

Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rumayya Batubara, menilai niat baik pemerintah untuk mensejahterakan pengemudi ojol melalui kenaikan tarif perlu diapresiasi. Namun, kenaikan tarif ojol tidak selalu berhubungan dengan kesejahteraan pengemudi.

Dia mencontohkan, ketika konsumen memilih moda transportasi lain saat tarif ojol tinggi, maka potensi pendapatan driver akan

menurun. Hal itu dikarenakan karakter pengguna ojol yang sangat sensitif terhadap harga. Ketika ada perubahan harga, mereka akan mencari alternatif moda transportasi lain, atau bahkan mengurangi mobilitasnya.

"Misalkan jika sebelumnya bisa mendapatkan 10 penumpang, dengan adanya kenaikan ini penumpangnya turun jadi 7 atau bahkan hanya 5. Perlu diingat, jumlah driver tetap sama, tapi penumpang berkurang," ujar Rumayya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Dari sisi konsumen, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), lebih dari 50 persen konsumen pengguna ojol adalah masyarakat menengah bawah. Konsumen memilih menggunakan ojol dikarenakan harganya yang terjangkau.

Apabila kenaikan tarif ojol terlalu tinggi, hal itu bisa menjadikan ojol tidak terjangkau lagi oleh sebagian besar konsumen. Akibatnya, konsumen akan memilih opsi transportasi lain. Salah satunya kendaraan pribadi yang akan menimbulkan masalah lain, seperti kemacetan lalu lintas.

"Ketika tarif ojol naik di 2019, sebanyak 75 persen konsumen menolak kenaikan harga ojol. Persentase penolakan tersebut t e r -

golong tinggi, meski kenaikan tarif pada saat itu tidak sebesar di 2022 ini. Tahun ini kami memang belum melakukan studi terbaru, tapi kemungkinan besar akan ada lebih dari 75 persen konsumen yang menolak, karena kenaikan tarifnya jauh lebih tinggi," kata Rumayya, yang juga Ketua Tim Peneliti RISED.

Secara keseluruhan, kenaikan tarif ojol yang tinggi akan menekan daya beli masyarakat dan turut menaikkan inflasi. Terlebih, saat ini, pemerintah tengah berupaya untuk menekan inflasi melalui program subsidi di berbagai sektor.

"Kita lihat saat ini inflasi sedang tinggi. Bahkan untuk inflasi pangan tertinggi sejak 2015. Jika inflasi tinggi, maka daya beli konsumen tergerus," ujar Rumayya.

Rumahyia mengatakan, terkait keputusan Kemenhub yang menunda pemberlakuan tarif baru ojol hingga 29 Agustus 2022, perpanjangan waktu tersebut dapat menjadi momentum dalam menjaring masukan dari para pemangku kepentingan dalam menetapkan tarif baru ojol.

"Penundaan pemberlakuan ini bagus, walaupun tambahannya hanya 15 hari. Sehingga ada waktu lebih panjang untuk menghitung lagi dampaknya, apakah ada solusi yang lebih baik. Jika memang harus naik, maka berapa besaran tarif yang sesuai. Jadi perpanjangan waktu ini bisa digunakan untuk mencari masukan dan tambahan data agar bisa mengambil kebijakan publik lebih tepat. Kami sangat dukung untuk itu," kata Rumayya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai, kenaikan tarif ojol sebaiknya dilakukan secara moderat alias kenaikannya tidak langsung tinggi.

Menurut Piter, kenaikan tarif ojol yang mencapai lebih dari 30 persen memang relatif tinggi dan berpotensi mengerek inflasi di Tanah Air semakin meningkat.

"Angka wajar

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah

menurut saya itu ya maksimal 10 persen. Saya juga bertanya-tanya mengapa naiknya setinggi itu, kalkulasinya seperti apa,” ujar Piter.

Menurut Piter, jika kenaikannya setinggi itu, maka tarif ojol nantinya akan mendekati tarif taksi. Sehingga, membuat minat masyarakat menggunakan ojol kemungkinan akan mengalami penurunan. Apabila itu yang terjadi, maka akan berdampak terhadap pendapatan pengemudi ojol yang berpotensi berkurang.

Sementara itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tergabung dalam aplikasi seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, juga berpeluang mengalami penurunan pendapatan jika pemesanan makanan via aplikasi berkurang akibat tingginya tarif ojol.

“Perlu jadi perhatian bahwa masyarakat bawah itu sangat sensitif dengan kenaikan harga. Apalagi daya beli masyarakat sudah tergerus akibat pandemi, banyak PHK, penurunan gaji, kenaikan harga-harga bahan pangan, harga barang, dan sebagainya,” kata Piter.

Hal yang sama juga dikatakan ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Nailul Huda, yang menilai tarif baru ojek daring yang ditetapkan Kemenhub dapat mengerek laju inflasi nasional yang saat ini dalam tren meningkat.

“Biaya transportasi yang kemungkinan meningkat bisa menyebabkan inflasi secara umum. Inflasi transportasi per Juli 2022 sudah cukup tinggi, di mana secara year on year sudah di level 6,65 persen, tertinggi kedua setelah makanan, minuman, dan tembakau,” ujar Nailul.

Saat ini, pemerintah tengah berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga inflasi tetap rendah, mulai dari menjaga subsidi BBM hingga subsidi pangan. Hal itu dilakukan agar pemulihan ekonomi tetap terjaga.

Kendati demikian, selain akan mendorong inflasi, kenaikan tarif ojol juga akan mendorong masyarakat pengguna ojol pindah ke moda transportasi lain atau bahkan kendaraan pribadi.

“Jika menggunakan kendaraan pribadi akan menambah kemacetan dan kerugian ekonomi akan bertambah,”

kata Nailul.

Nailul menyampaikan, transportasi daring, termasuk ojol, adalah multisided-market di mana ada banyak jenis konsumen yang dilayani oleh sebuah platform. Sehingga, seharusnya yang dilihat bukan hanya dari sisi mitra driver saja, namun juga dari sisi konsumen atau penumpang.

“Sesuai hukum ekonomi, dari sisi konsumen penumpang akan ada penurunan permintaan. Sudah pasti mitra driver yang akan rugi karena secara total pendapatan akan menurun. Maka hal ini kontradiktif dengan kesejahteraan mitra driver yang ingin dicapai dengan adanya perubahan tarif ini,” ujar Nailul.

Tidak hanya sampai di situ, kenaikan

“Jadi saya rasa pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan kenaikan tarif ojek online ini dan melihat sebesar besar elastisitas dari produk atau layanan. Jangan juga kebijakan ini menimbulkan perang harga antar platform yang akan membuat industri tidak sehat,” kata Nailul.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, juga menilai kenaikan tarif ojek daring bisa memicu inflasi sektor transportasi secara signifikan. Jika nantinya diberlakukan, maka akan semakin memberatkan masyarakat karena kenaikan harga pangan dan energi.

“Ini bisa berpengaruh ke inflasi, khususnya di perkotaan, ditambah dengan kenaikan harga pangan maupun



Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira

biaya transportasi juga bisa mendatangkan efek berganda lain, yaitu membebani usaha UMKM. Misalnya, industri makanan-minuman di skala UMKM yang bisa menaikkan harga. Peralnya, penggunaan transportasi ojol sudah menjadi moda transportasi sehari-hari yang banyak digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun usaha.

Kenaikan biaya hidup tersebut dinilai ujung-ujungnya dapat menurunkan daya beli masyarakat. Terlebih, rata-rata kenaikan upah minimum nasional pada 2022 hanya berkisar di angka 1,09 persen, tidak dapat menutup potensi kenaikan inflasi.

energi, maka perkiraan inflasi umum bisa mencapai 5,5-5,7 persen year on year sepanjang 2022,” ujar Bhima.

Menurut Bhima, imbas dari naiknya tarif ojol juga tidak berkorelasi dengan naiknya pendapatan para mitra driver. Kenaikan tarif akan membuat masyarakat kembali ke kendaraan pribadi.

“Kalau tarif naik tinggi, konsumen akan kaget dan mencari alternatif transportasi lain. Misalnya dari rumah ke kantor, mungkin ujungnya konsumen kelas menengah akan naik motor sendiri dibanding membayar jasa ojol yang dipersepsikan mahal,” terang Bhima. ●



SEDERHANAKAN REGULASI TINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaksanakan uji publik materi muatan Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022.

Anggota KPU RI, Mochammad Affuddin, menyampaikan, uji publik tersebut mengundang sejumlah pemerhati pemilu, organisasi masyarakat, lembaga serta partai politik. Rancangan PKPU Partisipasi Masyarakat ini merupakan penggabungan antara PKPU 8/2017 dan PKPU 10/2018.

Gagasan utama penggabungan ini bertujuan untuk penyederhanaan regulasi, pengaturan yang lebih komprehensif, dan mendorong efektivitas peningkatan partisipasi masyarakat.

Rancangan PKPU Partisipasi Masyarakat ini mengatur bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dan KPU tingkat provinsi serta daerah dalam upaya peningkatan partisipasi tersebut. Bentuk partisipasinya di anta-

ranya sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat, dan partisipasi lainnya.

Adapun materi sosialisasi dan pendidikan pemilih, meliputi tahapan program dan jadwal pemilu, proses dan tata cara teknis penyelenggaraan pemilu, tugas dan wewenang teknis KPU, muatan lokal, upaya menumbuhkan sikap kesukarelawanan, hingga manajemen konflik.

"RPKPU mengatur apa saja bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dan apa saja yang dapat dilakukan KPU," terang Affuddin.

KPU berharap partisipasi masyarakat tidak hanya pada hari pencoblosan saja. Tetapi, masyarakat bisa berpartisipasi pada seluruh tahapan yang akan di gelar oleh KPU.

"Sebenarnya ini juga tidak hanya kaitannya dengan partisipasi di hari H saja, tetapi bagaimana setiap tahapan," kata Aff.

Mantan Anggota Bawaslu RI itu mengatakan, kesadaran masyarakat dalam mengikuti atau mengawasi seluruh tahapan pemilu menjadi hal yang sangat penting. Hal itu juga akan semakin mendekatkan penyelenggara dengan masyarakat dan seluruh unsur pemilu lainnya.

Affif menyebutkan, untuk sukseskan seluruh tahapan pemilu, seluruh unsur harus turut terlibat dan bekerja sama. Partai politik sebagai peserta pemilu dengan penyelenggara, maupun masyarakat umum dengan partai politik dan penyelenggara.

"Semuanya harus bekerja sama, ada

yang domainnya peserta pemilu, seperti partai politik, ada domainnya sebagai penyelenggara, ada yang mengawasi seperti teman-teman di Bawaslu, juga ada masyarakat pada umumnya," tegas Afif.

Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU, August Mellaz, menyampaikan gagasan utama dalam penyusunan PKPU ini adalah upaya KPU melakukan penggabungan terhadap PKPU yang sebelumnya yang memisahkan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan. Tidak hanya untuk menyederhanakan regulasi, tetapi juga membuat aturan semakin komprehensif membantu efektivitas peningkatan partisipasi masyarakat.

Mellaz pun menyampaikan substansi rancangan PKPU terdiri 6 bab, yakni ketentuan umum; tujuan dan prinsip partisipasi masyarakat; pelaksanaan partisipasi masyarakat terdiri bentuk partisipasi masyarakat, pelaksanaan oleh masyarakat, pelaksanaan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; pemantauan yang terdiri dari pemantauan pemilu dan pemantauan pemilihan; sistem informasi dokumentasi dan monitoring pelaksanaan partisipasi masyarakat, laporan pelaksanaan kegiatan, mengukur tingkat partisipasi masyarakat; dan 6 ketentuan penutup.

Mellaz memaparkan isu strategis dalam rancangan PKPU ini di antaranya pelaksana partisipasi masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat, sasaran partisipasi masyarakat dari sisi subjek dan lokasi, dan isu terakhir terkait penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.

Terkait pelaksana, Mellaz menekankan bahwa rancangan PKPU ini dirancang memiliki semangat untuk menjamin hak masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan. Oleh karena itu, masyarakat sebagai subyek diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi.

"Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, diperlukan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna dalam setiap tahapan," ujar Mellaz.

Untuk bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dan apa saja yang dapat dilakukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Mellaz menyampaikan bentuknya dapat sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat, dan/atau partisipasi masyarakat lainnya.

"Harapannya segala inisiatif diambil masyarakat, baik di organisasi maupun perorangan maupun non kelompok, KPU dan jajarannya dapat memfasilitasi peningkatan peran serta dengan melakukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif," ujar Mellaz.

sebelum Pemilu 2024. Dia juga menyampaikan, sumber dana lembaga survei peserta Pemilu 2024 maupun parpol tidak diizinkan bersumber dari pihak asing.

"Ini kan dari norma (Pemilu) yang sebelumnya juga. Jadi kelumrahan bagi Indonesia ya pemantau Pemilu, misalnya sumber pendanaan parpol yang berasal dari pihak asing, kan enggak boleh. Kan ini urusannya political margin kita, termasuk survei," kata Mellaz.

"Kalau survei dalam konteks sehari-hari yang memotret perilaku orang atau apa pun itu ya monggo saja. Tapi kan ini dalam konteks partisipasi Pemilu 2024," sambungnyaa.



Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU, August Mellaz

Dia menambahkan, Rancangan PKPU tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 rencananya akan mengatur tentang lembaga survei yang mendaftarkan diri ke KPU tidak boleh dibiayai oleh asing. Selain itu, lembaga survei yang mendaftarkan ke KPU nantinya juga harus berbadan hukum di Indonesia.

Hal itu diatur dalam Rancangan PKPU tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Pasal 20 yang berbunyi: Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh lembaga berbadan hukum di Indonesia dan memiliki sumber dana yang tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.

Mellaz mengatakan ketentuan ini merupakan norma yang telah ditera-

KPU meminta agar lembaga survei peserta pemilu transparansi soal sumber pendanaan. Kemudian, lembaga survei yang mendaftarkan diri ke KPU juga perlu melampirkan penjelasan sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit yang harus dilakukan oleh akuntan publik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang akuntan publik.

"Soal transparansi ya sumber pembiayaannya dari mana? Itu yang diungkap. Itu saja, enggak ada ini (khawatir soal kepentingan), kok," ungkap Mellaz.

Adapun lembaga survei dapat mendaftarkan diri ke KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Salah satu syarat lembaga survei yang ingin mendaftar ke KPU harus terdapat surat keterangan telah terdaf-

• INFO NASIONAL

tar minimal satu tahun pada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Sementara itu, pengecualian syarat penyertaan surat keterangan telah terdaftar dalam asosiasi bagi media massa, lembaga penelitian atau lembaga lainnya. Diketahui media massa, lembaga penelitian atau lembaga lainnya dapat mendaftar untuk melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Ketentuan penyertaan surat keterangan telah terdaftar dalam asosiasi dikecualikan sepanjang media massa, lembaga penelitian atau lembaga lainnya, telah bekerja sama dengan KPU.

Mellaz juga mengatakan, KPU bakal menggandeng sejumlah influencer dan partai politik untuk mengedukasi terkait pemilu. Hal ini dilakukan untuk menyiarkan perkembangan informasi

Namun, hingga saat ini, masih belum ada instrumen hukum yang dibangun oleh KPU untuk menjangkau perkembangan ke depan. Edukasi kepada masyarakat ini akan dilakukan oleh para influencer dalam bentuk kegiatan.

"Nanti bentuknya seperti apa kan itu konteksnya dalam kegiatan. Bentuknya seperti apa? Misalnya ternyata nanti sejumlah warganet yang misalnya saya enggak sebut famous, tapi ya jaringannya luas, dampaknya signifikan mungkin bisa ketemu sama kita untuk saling berbagi informasi, dan tukar menukar perkembangan," ucap Mellaz.

Namun, hingga saat ini KPU masih belum membicarakan terkait endorsement tersebut. "Ini kan ada perkembangan masyarakat di luar kita yang memang harus kita jangkau. Paling enggak itu dijangkau dulu. Paling eng-

dari parpol lebih banyak.

"Termasuk selama ini kita tidak pernah menjangkau partai yang ini kontribusinya besar. Kan begini parpol, caleg itu berkepentingan untuk konstituennya memilih pada hari H, memilih secara benar. KPU kan juga menghadapi situasi suara tidak sah kita besar," jelas Mellaz.

"Kelompok-kelompok masyarakat sipil, kemudian media juga tentu diharapkan untuk bisa menyebarluaskan itu. Tetapi partai politik juga. Oleh karena itu, di PKPU ini salah satunya juga sosialisasi, kita buka ruang untuk KPU dengan peserta pemilu, KPU tidak mungkin ada jika tidak melayani peserta pemilu. Mereka lah yang akan berkompetisi," terangnya.

Merdeka Pemilu

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengajak jajaran penyelenggara pemilu untuk menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh bertepatan dengan tahapan pemilu, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang merdeka. Kemerdekaan bagi rakyat pemilih menentukan pilihan dan kebebasan peserta pemilu untuk berkompetisi di setiap tahapan kepemiluan.

"Oleh karena itu, hikmah yang harus kita ambil dari Peringatan Hari Kemerdekaan 77 Tahun Republik Indonesia ini adalah bagaimana KPU sebagai pemimpin kepemiluan, memberikan jaminan pada dua hal. Yang pertama rakyat pemilih dapat memerdekakan dirinya untuk mengekspresikan secara bebas pilihan-pilihan dalam pemilihan umum. Kedua memberikan jaminan kepada peserta pemilu kepada calon untuk mengekspresikan dirinya dalam Pemilu 2024," kata Hasyim pada Peringatan HUT Ke-77 RI di lingkungan KPU, Rabu (17/8/2022).

Hasyim sebelumnya mengingatkan sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, KPU adalah pemimpin kepemiluan di setiap tingkatan. KPU di pusat adalah pemimpin di tingkat nasional, KPU provinsi adalah pemimpin di tingkat provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah pemimpin kepemiluan di tingkat kabupaten/kota ●



Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari

terkait pemilu lewat media sosial.

"Nah, karena itu yang paling penting kita berusaha jangkau warganet ini, untuk kemudian kita libatkan dalam konteks partisipasi masyarakat itu dalam rangka membantu KPU untuk menyebarluaskan juga informasi-informasi yang sebenarnya tentang pemilu dan tentu mereka kan punya kluster-kluster pemilih kan," ujar Mellaz.

Menurut Mellaz, saat ini, masyarakat lebih sering membaca informasi melalui media sosial karena media mainstream masih menggunakan mekanisme untuk memfilter setiap informasi yang akan disebarluaskan.

gag bagian PUU akan mengkaji secara mendalam. Karena setelah PKPU ini akan dikeluarkan lagi pedoman teknisnya. Misalnya, dengan pemantau, dengan lembaga survei," jelasnya.

"Selepas uji publik ini, yang pasti kita mau tampung dulu (aspirasi dari publik). Selepas tampungan ini selesai dan kita bahas di internal mana yang bisa diakomodasi atau tidak, atau tetap dengan draf yang ada, kita akan segera ajukan surat ke DPR," sambungnya.

Kemudian, berkaca dari Pemilu 2019, sosialisasi terkait pemilu ini, KPU juga akan menggandeng sejumlah partai politik. Ini dikarenakan massa



Info Sumsel

INOVASI UNTUK NEGERI

Network

www.infosumsel.id



INFO PASANG

KIKI IBRAHIM

+62 818 931 562

IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel



Social media

- WEBSITE:** @infosumsel.id
- facebook :** @infosumsel.id
- twitter :** @id_infosumsel
- Instagram :** @infosumsel_id
- YouTube :** info sumsel

Palembang
 Jl. Puncak Sekuning, Lorong Sahabat
 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I
 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30126

Telp : 0711-7442344
 Email : infosumsel.redaksi@gmail.com



KAPOLRI DIUJI, KAPOLRI TERUJI

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mendapatkan ujian besar dan berat atas insiden pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J yang diduga dilakukan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dan melibatkan Irjen Pol Ferdy Sambo. Kasus ini pun menyita perhatian dan informasinya menjadi bola liar yang beredar di tengah masyarakat Tanah Air.

Setelah memerintahkan agar dilakukan penyelidikan oleh tim khusus, Kapolri Listyo Sigit akhirnya mengumumkan status tersangka Ferdy Sambo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8/2022) malam.

Ferdy Sambo diduga memberi perintah pembunuhan terhadap Brigadir J. Mantan Kepala Divisi Propam Polri itu juga diduga menskenariokan seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinas pada saat terjadinya pembunuhan.

"Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara E atas perintah saudara FS (Ferdy Sambo)," kata Sigit.

Saat memberikan pengumuman itu, ada empat orang yang berstatus tersangka pembunuhan Brigadir J. Selain Ferdy Sambo, ada Bharada E, Bripka RR, dan KM yang merupakan warga sipil. Keempatnya dijerat dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.



Dijelaskan pula peran keempat tersangka. Tersangka Bharada E melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Tersangka KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Ferdy Sambo yang menyuruh melakukan dan menyusun skenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak menembak sesama polisi.

Peristiwa tewasnya Brigjen J terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022, di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Awalnya Brigadir J dilaporkan tewas akibat baku tembak antaranggota melibatkan Bharada E. Namun, dari hasil penyidikan timsus, skenario tembak-menembak itu tidak terbukti. Yang terjadi adalah Bharada E menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo, dengan senjata Brigadir RR. Sementara, senjata Brigadir J digunakan oleh Ferdy Sambo untuk menembak dinding rumah tempat kejadian perkara (TKP).

"Saya ulangi tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan di awal," terang Jenderal Sigit.

Kendati demikian, Sigit belum bisa mengungkap motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dia menegaskan, timsus masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada termasuk kepada istri tersangka Ferdy Sambo, yakni Putri Candrawathi.

"Motif atau pemicu terjadinya penembakan tersebut saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap ibu PC," kata dia.

Di waktu terpisah, Listyo Sigit menjawab soal kabar kedekatan hubungan antara dirinya dengan Ferdy Sambo. Menurutnya, posisi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan itu memang selalu mendampingi Kapolri dalam bertugas.

"Kami bukan sahabat. Kepala Divisi Propam memang selalu mendampingi Kapolri dalam menjalankan tugas, termasuk saat kunjungan ke berbagai tempat," ujar Listyo dikutip dari Tempo.co, Sabtu (13/8/2022).

Kata Listyo, kebersamaan itu juga berlaku di era Kapolri Jenderal Idham

Azis. Dia menegaskan bahwa dirinya dengan Ferdy Sambo hanya sebatas hubungan struktural. "Kami sebatas pimpinan dan anak buah," ujarnya.

Moncernya karir Ferdy Sambo dikabarkan karena dekat dengan tiga Kapolri, mulai dari Tito Karnavian, Idham Aziz, dan Listyo Sigit Prabowo.

Berdasarkan pemberitaan Majalah Tempo, orang dekat Sambo yang tidak ingin disebut namanya bercerita bahwa jenderal bintang dua itu kerap sowan ke para mantan Kapolri. Karirnya menanjak sejak dekat dengan Tito Karnavian dan makin terlihat dekat dengan petinggi Polri lainnya ketika Markas Besar membentuk Satuan Tu-

pam pada 18 Juli 2022. Langkah itu untuk memuluskan penyidikan kematian ajudannya di rumah dinas di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

"Untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyidikan yang berjalan," tuturnya.

Kemudian, Kapolri resmi mencopot Ferdy Sambo dari jabatannya berdasarkan Surat Telegram Nomor: ST/1628/VII/KEP./2022 tanggal 2 Agustus 2022. Sambo dimutasikan sebagai perwira tinggi di Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasmu), Komjen Pol Agung Budi Maryoto, yang memimpin Inspektorat



gas Merah Putih yang berisi perwira-perwira reserse pilihan.

Selama perjalanan karir Sambo, dia terlibat menangani sejumlah kasus besar, seperti bom bunuh diri di Jalan MH Thamrin Jakarta, dan kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Lalu, dia memimpin penyelidikan kasus kebakaran Kejaksaan Agung dan berperan menyelesaikan perkara penerbitan surat jalan palsu Djoko Tjandra.

Kemudian kasus kematian Brigadir J mencuat. Bintara polisi yang merupakan ajudan Sambo itu tewas setelah ditembak oleh Bharada E atas perintah Sambo pada 8 Juli 2022. Listyo Sigit akhirnya menonaktifkan Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Pro-

husus (Irsus), mengungkapkan, saat menjalani pemeriksaan mendalam oleh tim khusus, Bharada E mengungkapkan ingin menulis sendiri kejadian sebenarnya terkait kematian Brigadir J.

"Tidak usah ditanya, Pak. Saya menulis sendiri," kata Agung meniru ucapan Bharada E ketika menjalani pemeriksaan. Pengakuannya dilengkapi dengan cap jempol dan materai.

Karena sudah ada unsur pidana, Mabes Polri melimpahkan kasus ini kepada Bareskrim Polri untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Operasi Sesar

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengapresiasi Polri, khususnya Kapolri

• COVER STORY

Jenderal Listyo Sigit, karena telah mengungkap tersangka utama yaitu Ferdly Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

"Pemerintah mengapresiasi Polri, khususnya Kapolri yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang," kata Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta, dipantau melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (9/8/2022).

Mahfud mengibaratkan pengusutan kasus ini dengan penanganan terhadap perempuan yang hendak melahirkan, tapi mengalami kesulitan, sehingga tim dokter terpaksa melakukan operasi sesar.

Melalui penggambaran itu, Mahfud menilai Kapolri Sigit bersama Timsus dan Irsus telah berhasil mengeluarkan

lagi ke (Pasal) 231, 221, 233. Itu tentang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Ini masih banyak, tetapi bayinya, pelaku atau terduga pelaku utamanya sudah ditemukan, yaitu tersangka Ferdly Sambo," ucap Mahfud.

Mahfud menilai penetapan Ferdly Sambo Cs sebagai tersangka dan pengusutan lebih lanjut terhadap 28 personel Polri adalah bukti Polri menjalankan amanat dan menjaga kepercayaan masyarakat.

"Polri adalah anak kandung republik yang bersungguh-sungguh mendingar aspirasi publik. Pemerintah berharap agar penyelesaian kasus ini terbuka dan tanpa pandang bulu serta bisa menjadi babak baru dalam upaya membangun institusi Polri yang bersih dan terpercaya," lanjutnya.

ga-lembaga penegak hukum di Tanah Air, yakni Polri, Kejaksaan dan Pengadilan.

Mahfud menegaskan bahwa pemerintah selalu mendengarkan keluarga korban, terutama ayah dari almarhum Brigadir J yang begitu berharap kasus ini benar-benar terungkap.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga meminta Polri memberi perlindungan proporsional kepada keluarga Brigadir J. Selain itu, meminta Polri memfasilitasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi Bharada E agar selamat dari kemungkinan dibunuh karena kesaksiannya.

"Agar nanti Bharada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya. Mungkin saja kalau dia menerima perintah, dia bisa saja bebas. Tetapi pelaku dan instrukturnya saya rasa tidak bisa bebas," ucapnya.

Berdarah-darah

Pengamat kepolisian, Alfons Loemau, menyebutkan kasus pembunuhan Brigadir J menjadi momentum Polri untuk menyingkirkan anggota yang nakal. Meskipun pahit, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus membersihkan institusi dari sejumlah orang yang mencoreng nama baik institusi.

"Apabila Jenderal Sigit membuat keputusan tegas, mungkin sekali berdarah-darah, mungkin sekali ini pil pahit, tapi sangat penting bagi polisi," kata Alfons dalam keterangan tertulis.

Alfons menyatakan Polri telah berupaya bekerja profesional menangani sejumlah kasus. Namun, harus diakui bahwa kasus kematian Brigadir J berdampak persepsi negatif masyarakat karena penanganan yang lamban.

"Ada orang sekitar situ, banyak saksi kok bisa lambat? Inilah saatnya kalau mau, political will, ini waktu yang tepat untuk melakukan the right job," ucap purnawirawan Polri berpangkat terakhir Komisariss Besar itu.

Praktisi hukum, Petrus Selestinus, menambahkan, Polri harus segera merampungkan perkara ini secara transparan. Kapolri harus bisa memaknai perintah Presiden Jokowi, yang sudah disampaikan empat kali, untuk



Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD

bayi, dalam hal ini adalah tersangka Ferdly Sambo.

"Kasus ini memang agak khusus, seperti kasus orang menangani orang hamil yang mau melahirkan, tapi sulit melahirkan, sehingga terpaksa dilakukan operasi sesar. Operasi sesarnya agak lama, kontraksinya terjadi terus. Malam ini, Kapolri berhasil mengeluarkan bayinya, dalam kasus ini, yaitu Ferdly Sambo sebagai tersangka dalam kasus penyusunan skenario dan memerintahkan pembunuhan, mungkin juga berencana," jelas dia.

Mahfud mengatakan pengusutan kasus ini mungkin akan berlanjut dengan mengungkap upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum.

"Mungkin, nanti akan bersambung

Katanya, pemerintah melalui Kemenkopolkum akan terus mengawal kasus ini sampai ke tangan kejaksaan, lalu pendakwaan di pengadilan, hingga dilakukan penuntutan yang sungguh-sungguh.

Menurutnya, Kejaksaan harus benar-benar profesional dalam menangani kasus ini dengan konstruksi hukum yang kuat agar mudah bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus penembakan Brigadir J sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan.

"Kita mengawasi Kejaksaan dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan Polri," ujar Mahfud.

Dia pun meminta pihak keluarga korban agar tetap bersabar dan terus memberi kepercayaan kepada lembaa-

mengungkap tuntas kasus kematian Brigadir J. Ia meminta Polri membuka latar belakang dan mengklarifikasi isu persaingan elite Polri di balik perkara ini.

"Kalau semata-mata (penanganan) kasus ini sebatas 31 orang, maka persoalan yang sudah akut dalam Polri tidak akan terselesaikan," ucapnya.

Petrus berharap Polri mampu membeberkan motif sebenarnya pembunuhan Brigadir J dan memproses kasusnya secara tuntas dan transparan. "Agar masyarakat dapat mengetahui motif sebenarnya kasus penembakan terhadap Brigadir J," tuturnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengharapkan, kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret mantan Ferdy Sambo sebagai tersangka menjadi bahan introspeksi bagi jajaran Kepolisian.

"Atas peristiwa yang banyak mendapat sorotan publik itu, kami mengajak agar menjadikan kasus ini sebagai bahan introspeksi buat seluruh jajaran, sehingga tidak ada lagi perkara serupa pada masa mendatang," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Dalam situasi seperti ini setelah kasus Ferdy Sambo terbongkar, Edi meminta seluruh jajaran Polri semakin kompak dan mendukung penuh kebijakan Kapolri Listyo Sigit demi Polri yang semakin baik.

"Kami ajak seluruh jajaran Polri meningkatkan kinerja, pelayanan dan profesionalisme di tengah masyarakat. Insya Allah, Polri akan semakin baik dan dipercaya masyarakat," kata pakar hukum Kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Edi juga tidak meyakini adanya isu perlawanan kubu Ferdy Sambo setelah jenderal bintang dua ini menjadi tahanan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan terancam dengan hukuman mati atas sangkaan pembunuhan berencana.

"Justru, seluruh jajaran Polri solid. Hasil pemantauan kami, seluruh anggota Polri yang jumlahnya sekitar 470 ribu sangat solid mendukung Kapolri," katanya.

Edi juga meminta Polri agar segera

menyelesaikan kasus Ferdy Sambo sampai tuntas dan menindak seluruh anggota yang terbukti membantu kejahatan ini.

Lulus Ujian Terberat

Ketua Setara Institute, Hendardi, menyebutkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah lulus ujian terberat dengan menetapkan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka utama tewasnya Brigadir J.

"Kasus ini sungguh menjadi ujian terberat bagi Kapolri, meskipun akhirnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo lulus dari ujian tersebut," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (9/8/2022).

Menurut dia, penetapan mantan Kadiv Propam Polri sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J oleh Tim Khusus yang dibentuk Kapolri telah membuktikan bahwa diplomasi kejujuran, transparansi, dan kinerja berbasis data telah mengantarkan pada kesimpulan

dan fakta dengan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pembunuhan atas Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo.

"Pada awalnya Polri sempat terkesan sangat berhati-hati, karena peristiwa tersebut menyangkut perwira tinggi Polri yang juga berprestasi dan adanya suatu upaya menghalangi proses penegakan hukum (obstruction of justice)," katanya.

Belum lagi semburan informasi menyangkut kasus ini yang sangat massif membuat proses penyidikan sempat terhambat.

Hendardi menuturkan, keterlibatan Ferdy Sambo dalam peristiwa pembunuhan ini menjadi pembelajaran sangat penting bahwa oleh faktor-faktor tertentu, anggota Polri dan juga penegak hukum lainnya, dapat saja terlibat suatu perbuatan yang melanggar hukum.

"Dalam sebuah korps, 'naughty cop' dan 'clean cop' akan selalu ada. Tetapi,



Ketua Setara Institute, Hendardi

● COVER STORY

sebagai sebuah instrumen penegakan hukum, institusi Polri tetap harus menjalankan tugas legal dan konstitusionalnya menegakkan keadilan. Polri harus diawasi dan dikritik, tetapi sebagai sebuah mekanisme tentu harus dipercaya," paparnya.

Langkah maju Polri dalam penanganan kasus ini, tambah Hendardi, telah memutus berbagai spekulasi dan politisasi yang mengaitkan peristiwa ini dengan banyak hal di luar isu pembunuhan itu sendiri.

ini masih bekerja dan dipercaya.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, pun mengapresiasi Kapolri dan segenap pihak di kepolisian yang telah mampu membongkar kasus pembunuhan Brigadir J sampai ke akar-akarnya.

"Sebagai orang yang cinta kebenaran dan keadilan, kita tentu patut memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan pihak kepolisian yang telah dapat membongkar kasus pembunuhan

"Syukur alhamdulillah, berkat sikap tegas dan profesionalitas dari Kapolri dan pihak kepolisian, kasus ini bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya dengan menangkap dan menersangkakan siapa yang telah menjadi aktor utama dan atau otak intelektual dalam kasus terbunuhnya Brigadir J," ujar Anwar.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini mengharapkan kasus Brigadir J dapat dijadikan oleh Polri sebagai momentum untuk berbenah atau memperbaiki diri agar kepercayaan masyarakat terhadap salah satu lembaga penegak hukum di Tanah Air ini semakin meningkat.

Dengan demikian, Polri pun diharapkan dapat menjadi salah satu agen perubahan bangsa dan negara agar Indonesia mampu menjadi negeri yang maju, berakhlak, berkeadilan.

"Diharapkan pihak kepolisian akan bisa menjadi salah satu agen dalam perubahan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini ke arah yang jauh lebih baik. Sehingga diharapkan negeri ini akan bisa menjadi negeri yang maju, berakhlak, dan berkeadilan, di mana rakyatnya hidup dengan aman, tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia," ucap Anwar.

Komisi III DPR menilai langkah Kapolri Listyo Sigit mengungkap kasus penembakan terhadap Brigadir J hingga menjerat Ferdy Sambo sudah tepat. Diharapkan, kasus tersebut dapat diurus hingga tuntas hingga ke akarnya.

"Sampai sejauh ini, saya mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap kasus kematian Brigadir J. Langkah dan Progresnya terus berjalan," kata anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto, Senin (15/8/2022).

Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau ini juga menyambut baik sikap tegas Listyo Sigit dan jajaran yang menjerat puluhan anggota Polri yang terlibat dalam kasus penembakan Brigadir J. Menurutnya, itu merupakan langkah yang sangat tepat dalam rangka menjaga marwah Korps Bhayangkara.

"Langkah Kapolri untuk melakukan mutasi dan pemeriksaan terhadap personil polri terkait dengan kasus ini adalah langkah tepat. Selain untuk mempermudah pengungkapan kasusnya, juga memastikan agar tidak ada poten-



Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas

"Meskipun, motif pembunuhan itu mungkin belum terungkap, tetapi penetapan tersangka atas FS telah memusatkan kepemimpinan penyidikan Polri mengalami kemajuan signifikan, dan memutus politisasi oleh banyak pihak yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan," kata Hendardi.

Capaian itu, kata dia, juga bukan hanya ditujukan untuk menjaga citra Polri semata, tetapi yang utama menunjukkan bahwa kinerja instrumen keadilan

terhadap Brigadir Nofriasnyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sampai ke akar-akarnya," kata Anwar dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Menurut dia, meskipun pada awalnya masyarakat pesimistis dan memperkirakan penyelesaian kasus ini hanya akan menyentuh bagian ranting-ranting, melalui sikap tegas dan profesionalitas Listyo Sigit, mampu membongkar kasus pembunuhan Brigadir J dan menetapkan status tersangka pada Ferdy Sambo.

si tindakan yang tidak profesional yang bisa menghambat dan menghalang-halangi penyidik dalam mengungkap kasus ini," terangnya.

Oleh karena itu, Didik menilai pemeriksaan terhadap anggota yang diduga tidak profesional juga harus dilakukan termasuk pelanggaran kode etiknya. "Dan jika ditemukan proses pidananya, jangan ragu-ragu untuk segera memproses pidananya," tegasnya.

Polri Profesional

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi, Monisyah, mengatakan, pengungkapan kasus kematian Brigadir J sekaligus penetapan tersangka Ferdy Sambo oleh Kapolri Listyo Sigit mencerminkan profesionalitas Polri.

"Ini menjadi cermin kerja profesional jajaran kepolisian serta sikap tegas dan tidak pandang bulu," kata Monisyah.

Atas sikap tegas dan profesionalitas Polri, Seknas Jokowi mengapresiasi kerja keras Kapolri, Wakapolri Gatot Eddy Prabowo, dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam mengungkap kasus terbunuhnya Brigadir J. Menurut dia, hal itu sekaligus menyelamatkan wajah institusi Polri yang selama beberapa pekan terakhir mendapat pandangan miring, terutama di media-media sosial.

Langkah Kapolri, kata dia, juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar mengusut kasus tersebut secara tuntas. Instruksi Kapolri kepada Tim Khusus dan Irsus yang menyelidiki kasus tersebut juga berjalan baik.

"Kapolri telah membuktikan bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Tidak ada yang diistimewakan," sambungnya.

Dia menambahkan, keberanian, kerja keras, dan profesionalitas Kapolri dan jajarannya juga menjadi bukti implementasi dari program Presisi yang dicanangkan oleh mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal tersebut. Diharapkan dengan penetapan tersangka baru pada kasus terbunuhnya Brigadir J, masyarakat tidak lagi mendiskreditkan kepolisian.

"Kita sama-sama percayakan penanganan kasus ini kepada polisi. Kita

yakini polisi akan secara profesional menangani kasus hingga tuntas," katanya.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Poengky Indarti, menilai, Polri telah bersikap profesional dan mandiri dengan menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J.

"Penetapan tersangka dalam kasus ini juga menunjukkan Kapolri tidak segan memproses hukum bawahannya yang berpangkat irjen polisi," kata Poengky.

"Kopolnas sangat memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi tim khusus dalam mengungkap kasus meninggalnya Josua. Ternyata diduga otak dibalik kasus ini adalah seorang

desa' berupa mutasi dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat menghalang-halangi keadilan, maka tim khusus dapat menetapkan tersangka dalam kasus ini," ujarnya.

Meski telah ditetapkan tersangka dan terungkap fakta bahwa Brigadir J dibunuh, kata Poengky, upaya penegakan hukum terus berjalan hingga proses pengadilan. "Kopolnas tetap akan mengawal proses penyidikan kasus ini hingga kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan," kata Poengky.

Loyalitas Kepada Jokowi

Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, menyatakan Kapolri Listyo Sigit membuktikan loyalitas kepada Presiden Joko Widodo dalam



Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Poengky Indarti

jenderal bintang dua yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kadiv Pro-pam, yang merupakan polisinya polisi," katanya.

Terungkapnya kasus ini, kata Poengky, dengan penyidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Pada awalnya, pengungkapan kasus sempat terhambat karena diduga ada upaya menghalang-halangi keadilan oleh Ferdy Sambo dan orang-orang yang diperintah olehnya.

Namun, Tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Listyo Sigit bekerja secara marathon mengedepankan pembuktian secara ilmiah. Sehingga meskipun ada upaya pengaburan, tetapi tetap dapat diungkap dugaan kejahatan para pelaku.

"Apalagi setelah adanya 'bedhol

menyelesaikan kasus tewasnya Brigadir J.

"Apa yang telah dilakukan oleh Kapolri adalah bentuk dari loyalitas dan tegak lurus kepada arahan dan perintah Presiden," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Guru Besar politik dan keamanan itu berharap Polri harus mengusut tuntas kasus pembunuhan yang telah menjerat Ferdy Sambo sebagai tersangka. Setelah itu, Polri melimpahkan kasus ini untuk disidangkan.

"Pada konteks ini, Kapolri tetap melakukan pengawalan dan memastikan agar proses hukumnya berjalan semestinya agar efek jera dan harapan publik juga terjawab dengan baik," tegasnya. ●



Bamsoet Apresiasi Gelar Profesor Kehormatan UPI Untuk Kajati Jabar

HADIRKAN PARADIGMA BARU PENEGAKAN HUKUM

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Nana Mulyana, diangkat sebagai Profesor Kehormatan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dalam bidang Ilmu Hukum.

Gelar Profesor Kehormatan tersebut diberikan atas ide dan gagasan orisinal Asep dalam menghadirkan suatu paradigma baru penegakan hukum di tengah perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat.

Pemberian gelar tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo, yang menghadiri pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Hukum kepada Asep Nana Mulyana di UPI Bandung, Jumat (19/8/2022).

Menurut Bamsoet, sapaannya, sebagai seorang praktisi hukum dengan jabatan Kajati Jawa Barat, Asep telah menunjukkan perhatian besar terhadap perkembangan hukum pidana, khususnya dalam proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan.

"Perhatian mengenai perkembangan penuntutan terkini tersebut telah berkembang di Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon, serta negara-negara Eropa Kontinental lainnya," ujar Bamsoet.

Ketua DPR ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Asep juga telah memberikan perhatian atas konsep penuntutan dalam perkara pidana terkini yang dikenal sebagai Deferred Prosecution Agreement (DPA).

Konsep tersebut yaitu penundaan penuntutan dengan syarat-syarat tertentu berupa pengakuan bersalah dari entitas korporasi dan pelaku bisnis, pembayaran denda penalty kepada

negara, serta perbaikan business process dan tata kelola sebagai bentuk munitigasi terjadinya pelanggaran hukum.

Bamsoet mengatakan, konsep yang relatif baru tersebut merupakan perkembangan terkini yang telah menjadi perhatian serius Asep. Harapannya ada perubahan besar dalam rangka pembaruan hukum di negeri ini.

Pertanyaan utama yang diajukan Asep, kata Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini, adalah bagaimana seharusnya penegakan hukum, khususnya langkah penuntutan yang benar, layak dan sepatutnya dilaksanakan.

“Agar tujuan hukum, yaitu adanya kepastian, keadilan, kedamaian dan kemanfaatan, dapat tercapai tanpa harus mengalami penderitaan yang tidak setimpal dengan derajat kesalahannya dan tidak sesuai dengan karakteristik pelanggaran hukum yang dilakukannya,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pertanyaan yang dibangun Asep tersebut merupakan hakikat dari tuntutan reformasi yang telah dikemukakan pada 1998. Serta sebagai implementasi nilai-nilai filosofis Pancasila yang menjadi dasar dan fondasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Saudara Asep mengupas secara kritis politik pembedaan non-penal yang berbasis efisiensi, keseimbangan, dan maksimisasi yang dikenal dan dianut negara-negara maju sejak 1970-an, yang dipelopori Richard Posner, serta dikembangkan oleh John Braithwaite, Robert Cooter, dan Thomas Ulen,” terang Bamsoet.

“Pendekatan yang relatif baru tersebut berbanding terbalik dengan pendekatan klasik dalam hukum pidana yang dianut Indonesia selama ini. Yaitu penuntutan pidana dengan tujuan penjeraan melalui penjeraan/perobatan. Sedangkan, pendekatan baru pembedaan non penal sesungguhnya cocok dengan nilai kesusilaan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila,” sambungnya.

Dalam pidato ilmiahnya, Asep Mulyana menyatakan sumbangsih pemikirannya demi menjawab tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kejahatan korporasi dan bisnis. Sumbangsih pemikiran tersebut dilandasi prinsip efisiensi demi terciptanya tertib sosial dan hu-

harap pemikiran Asep Mulyana ke depan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi legislatif dalam menyusun arah politik hokum, khususnya untuk pembangunan dan pembahasan hukum di Indonesia. Selain itu, pemikiran Asep Mulyana juga dapat menjadi sumber kajian untuk kemu-



kum.

Bagi Asep, pemberian gelar kehormatan ini merupakan amanah yang harus dirawat, dikembangkan, dan dipertanggungjawabkan.

“Pemberian gelar ini juga menjadi tantangan untuk membangun prinsip hukum yang lebih baik dan berkeadilan bagi masyarakat,” kata Asep.

Jaksa Agung ST Burhanuddin ber-

dian dapat diejawantahkan oleh para akademisi dan praktisi hukum.

Dalam pengukuhan Profesor Kehormatan itu juga hadir Ketua Fraksi MPR dari PDIP TB Hasanudin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolda Jawa Barat Irijen Pol Suntana, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, Rektor UPI M Solehuddin, beserta civitas akademika lainnya. ●



MENTERI BIKIN GADUH SOAL GANDUM

Konflik geopolitik antara Rusia dengan Ukraina berdampak pasokan pangan dunia, terutama gandum, di mana Ukraina merupakan penghasil terbesar komoditas tersebut. Pasokan yang terhambat membuat harga gandum mengalami kenaikan yang dampaknya terasa sampai Indonesia.

Kenaikan harga gandum jelas akan membuat beberapa produk turunannya ikut mengalami kenaikan, seperti mi instan, tepung terigu, roti dan lainnya. Bahkan, kenaikan harga mi instan sempat disampaikan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

“Saat ini kita dihadapkan konflik perang Ukraina-Rusia, di mana ada 180 juta ton gandum enggak bisa keluar, jadi hati-hati yang makan mi banyak dari gandum, besok harganya (naik) 3 kali lipat,” kata Syahrul dalam webinar Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Senin (8/8/2022).

Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa pada 2022, ada sembilan negara yang melarang ekspor gandum. Yakni Serbia, Aljazair, Kazakhstan, Kosovo, India, Afghanistan, dan Ukraina.

Airlangga mengatakan, gandum adalah bahan pangan kaya protein yang bisa menjadi sumber karbohidrat alternatif. Gandum biasanya diolah menjadi roti dan biskuit.

Rusia dan Ukraina menyumbang 30-40 persen dari pasokan gandum dunia. Inflasi dan krisis ekonomi juga menjadi ancaman di beberapa negara di dunia.

India adalah salah satu negara yang melarang ekspor gandum. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk melindungi kebutuhan gandum di negara tersebut.

Indonesia sebetulnya tidak membeli gandum dari Rusia melainkan dari Australia. Selama 2020-2021, impor gandum dari Australia mencapai USD1,2 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor gandum dan meslin mencapai 10,74 juta ton sepanjang Januari-November 2021 yang nilainya mencapai USD3,3 miliar. Impor gandum dan meslin terbesar Indonesia berasal dari Aus-

tralia dengan volume mencapai 4,42 juta ton (41,09 persen) dengan nilai USD1,37 miliar pada periode Januari-November 2021.

Impor gandum dan meslin terbesar Indonesia berikutnya berasal dari Ukraina dengan volume 2,76 juta ton (25,68 persen) dengan nilai USD821 juta. Lalu, impor lainnya dari Kanada dengan volume 1,88 juta ton (17,52 persen) dengan nilai USD623,35 juta.

Kemudian, ada Argentina dengan volume impor gandum dan meslin 586 ribu ton (5,45 persen) dengan nilai USD162 juta, serta dari Amerika Serikat 441,35 ribu ton (4,1 persen) senilai USD131,31 juta. Sedangkan impor gandum dan meslin dari negara lainnya mencapai 662,52 ribu ton (6,16 persen) dengan nilai USD182,98 juta.

Saat ini, banyak negara pengespor gandum mulai membatasi penjualan guna menghindari krisis pangan dalam negeri mereka. Kebijakan itulah yang membuat harga gandum dunia mengalami lonjakan yang cukup tajam dan berimbas besar terhadap Indonesia.

Terkait pernyataan Mentan Syahrul soal kenaikan harga mi instan, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, memastikan tidak akan terjadi kenaikan yang signifikan, apalagi sampai tiga kali lipat.

"Mi instan tidak akan naik tiga kali lipat karena gandum memang trennya naik, karena gagal panen di Australia, sekitar 67 juta ton gagal panen," kata Zulkifli Hasan usai meninjau harga kebutuhan pangan di Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (11/8/2022).

Zulhas mengatakan, kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ke Rusia membawa dampak baik terhadap ketersediaan dan pasokan gandum di Indonesia.

"Presiden pergi ke Rusia dan ternyata berhasil, gandum bebas sekarang. Jadi pasar gandum akan dibanjiri oleh Ukraina. Kemudian, Australia panennya berhasil, Kanada berhasil, Amerika berhasil. Justru menurut saya, gandum pada September akan turun harganya, trennya akan turun. Jadi kalau tiga kali tidak lah, kalau ada

kemarin naik sedikit iya. Sehingga, inflasi kita 4 persen, 5 persen, jadi naiknya segitu, tapi cenderung September akan turun," kata Zulhas.

Direktur Utama PT Indofood Sukses

hasilkan dari biji gandum bukan satu-satunya komponen utama.

"Kalau tahu costing mi instan baru orang mengerti bahwa mi instan bukan hanya terigu, komponen ter-



Makmur Tbk (INDF), Franky Welirang, mengakui, harga gandum yang masuk pada Agustus hingga September bisa saja menjadi harga gandum tertinggi. Namun, kenaikan tersebut tak terlalu berdampak terhadap harga mi instan.

Menurutnya, kenaikan harga mi tak akan signifikan. Sebab, terigu yang di-

igunya juga tidak besar-besarnya amat," ungkapnya.

Dia mengatakan, Indonesia mengimpor gandum ke banyak negara. Apalagi, saat ini beberapa negara yang dimaksud juga sedang panen gandum. Jadi, pasokan gandum dalam negeri tak akan banyak terpengaruh. ●

GANDUM TERGUNCANG, BERAS KONDISI AMAN

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, memastikan ketersediaan pangan tahun ini dalam kondisi aman, khususnya beras, meski dunia tengah dihadapkan pada kenaikan harga gandum akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina.

Syahrul menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu melakukan impor beras karena akan memasuki masa panen raya yang diperkirakan mencapai 15 juta ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, Indonesia tercatat sudah sembilan kali melakukan ekspor ke luar negeri, di antaranya ke Uni Emirat Arab, Filipina, Amerika Serikat, dan China.

Menurut Syahrul, upaya ini akan terus didorong untuk saling menjajaki dan menghitung berapa total kebutuhan dan surplus produksi yang ada.

"Ini yang terus kita dorong, walau-

pun tahap pertama baru saling menjajaki biasanya. Kita akan uji coba berapa ratus ton dulu, minimal kita sudah mendapatkan pasar dari luar untuk kelebihan-kelebihan yang kita miliki," katanya.

Sementara itu, dari data lain menyebutkan, Indonesia masuk sebagai negara yang paling besar produktivitas padi atau gabah. Hal ini menjadikan posisi Indonesia terbesar kedua setelah negara Vietnam, yaitu di atas 5,2 ton per hektare.

Dengan berbagai data tersebut, Syahrul memastikan bahwa kondisi beras Indonesia pada 2022 dalam

kondisi aman dan terkendali. "Semua data yang sudah kita validasi sudah sangat aman. Insya Allah tidak akan asal. Begitu juga dengan 12 kebutuhan bahan pokok seperti daging, telur dan ayam potong dalam kondisi aman," ujarnya.

Produksi padi Indonesia tercatat cukup stabil dalam tiga tahun terakhir, meskipun angkanya turun tipis pada 2021. Berdasarkan data BPS, produksi padi nasional pada 2021 berjumlah 54,42 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah ini turun 233,9 ribu ton atau 0,43 persen dibanding tahun sebelumnya.

Jika dikonversi menjadi beras, volume produksinya mencapai 31,36 juta ton pada 2021, turun 140,73 ribu ton atau 0,45 persen dari tahun sebelumnya.

Penurunan ini dipicu oleh melemahnya produksi di lumbung padi nasional pada 2021, seperti produksi padi Jawa Timur yang turun 1,56 persen, Sumatera Selatan turun 6,95 persen, dan Lampung turun 6,22 persen.

Pada skala global, Food and Agriculture Organization (FAO) memperkirakan cadangan beras dunia mencapai 191,4 juta ton pada akhir periode 2020/2021. Sementara, produksi beras dunia periode 2021/2022 diperkirakan mencapai 520,8 juta ton, dan jumlah yang digunakan mencapai 521 juta ton.

Adapun sepanjang semester I-2022, harga pangan di pasar global mengalami kenaikan hingga memicu inflasi tinggi di banyak wilayah. Harga komoditas pangan dunia yang naik, diiringi nilai tukar dolar Amerika Seri-



Gandum

2019



Rangking	Negara Importir	Total Impor 2019 (Ton)
1	Indonesia	10.962.191
2	Mesir	10.424.423
3	Turki	10.004.830
4	Italia	7.474.381
5	Filipina	7.153.747



kat yang cenderung menguat, membuat biaya impor bahan pangan menjadi lebih mahal, sehingga makin sulit diakses penduduk miskin di berbagai negara.

Sementara, berdasarkan data BPS, produksi padi mencapai 25,4 juta ton pada periode Januari-April 2022. Produksi itu meningkat 7,7 persen atau 14,63 juta ton dari tahun sebelumnya. Pada Januari-April 2021 produksi padi tercatat sebesar 23,58 juta ton.

Musim panen padi tahun ini melanjutkan pola 2021. Pada 2020, terjadi pergeseran musim panen, sehingga produksi padi memuncak pada April.

Sepereti diketahui, kenaikan produksi padi tak bisa dilepaskan dari kenaikan potensi luas panen. Pada musim panen Januari-April 2022, BPS memperkirakan luas panen padi mencapai 4,81 juta hektare, lebih besar 8,58 persen dibanding tahun sebelumnya.

Andalkan Daerah Penghasil Beras

Terjaganya produksi beras nasional tidak terlepas dari stabilnya produk pertanian di beberapa daerah di Indonesia yakni Lampung, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan dan Jambi. Sedangkan, untuk kabupaten yaitu, Cilacap, Brebes, Ngawi, OKU Timur dan Gresik. Masing-masing mendapatkan penghargaan Bidang Pertanian 2021 sebagai wilayah dengan peningkatan produksi padi tertinggi.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, penerima peringkat 1 untuk kategori peningkatan produktivitas provinsi tertinggi. Peningkatan produksi padi Lampung 2019-2020 sebesar 486.200 ton, Jawa Timur 363.604 ton, Banten 184.667 ton, Sumatera Selatan 139.663 ton dan Jambi 76.481 ton.

Berbeda dengan penghargaan tingkat provinsi yang hanya mempertimbangkan kenaikan produksi, kriteria penghargaan tingkat kabupaten dilihat juga faktor luas baku sawah serta produktivitas.

Pertimbangan pertama adalah wilayah dengan luas baku sawah di atas 40.000 hektare sebagai representasi luasan wilayah berbasis komoditas padi.

Kriteria selanjutnya adalah produktivitas kabupaten yang di atas 6 ton per hektare. Selanjutnya tidak hanya secara agregat provitas di atas 6 ton per hektare, namun juga harus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Dari seleksi beberapa kriteria ini kemudian di ranking 5 besar kabupaten

Peringkat kedua adalah Kabupaten Brebes yang memiliki provitas sebesar 6,09 ton per hektare (meningkat 0,66 ton per hektare) dengan peningkatan produksi sebesar 67.537 ton.

Peringkat ketiga Kabupaten Ngawi yang memiliki provitas sebesar 6,65 ton per hektare (meningkat 0,31 ton per hektare) dengan peningkatan



dengan peningkatan produksi padi tertinggi 2020. Kabupaten Cilacap menempati peringkat pertama dengan memiliki provitas sebesar 6,75 ton per hektare (meningkat 0,39 ton per hektare) dengan peningkatan produksi sebesar 93.942 ton.

produksi sebesar 60.583 ton.

Peringkat keempat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memiliki provitas sebesar 6,36 ton per hektare (meningkat 0,11 ton per hektare) dengan peningkatan produksi sebesar 58.288 ton. ●

PENGHARGAAN UNTUK DAERAH PENGHASIL BERAS

Kementerian Pertanian memberikan penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah kepada provinsi dengan produksi padi tertinggi tingkat nasional (Januari-Desember 2021).

Penghargaan diberikan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam acara Tasyakuran dan Penyerahan Penghargaan Pertanian 2022 di Lapangan Upacara, Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Lima daerah penghasil padi tertinggi di Indonesia yaitu Jawa Timur di urutan pertama dengan produksi padi 9.789.588 ton. Kedua, Jawa Tengah dengan produksi padi sebanyak 9.618.657 ton. Ketiga, Jawa Barat dengan produksi padi 9.113.573 ton.

Keempat, Sulawesi Selatan dengan produksi padi 5.090.673 ton. Kelima, Sumatera Selatan yang memproduksi 2.552.443 ton padi.

Tasyakuran dan Penyerahan Penghargaan Pertanian 2022 itu juga meliputi kategori lainnya yakni Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah pada Komoditas Padi 2021 Tingkat Kabupaten, Penghargaan Kinerja Provinsi Menuju Nol Kasus Penyakit Mulut dan Kuku, dan lainnya.

Mentan Syahrul sangat mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Perta-

nian, gubernur, bupati dan para petani atas capaian ini.

Karena kontribusi dari berbagai daerah ikut berperan dalam upaya pemerintah menekan impor beras sejak 2019-2021, sehingga mendorong Indonesia mendapatkan penghargaan yang luar biasa.

"Ini bukan hari biasa, karena hari ini kita berhasil mengulang kejayaan bangsa 36 tahun lalu. Hari ini International Rice Research Institute (IRRI) memberikan Penghargaan kepada Presiden Joko Widodo karena berhasil



melakukan swasembada beras. Ini juga berkat kerja keras jajaran Kementerian Pertanian, gubernur/bupati dan para petani,” jelasnya.

Menurut Syahrul, penghargaan ini bukan abal-abal, namun sangat prestisius karena IRRI yang menjustifikasi langsung bahwa ketahanan pangan Indonesia adalah ketahanan pangan terbaik di dunia. Namun keberhasilan ini menurutnya tak boleh membuat semua yang terlibat cepat berpuas diri.

“Penghargaan ini mencambuk kita untuk tidak bangga dan tidak puas. Jangan kebanggaan kota hanya sampai di sini tapi harus dipertahankan, dikonsepsikan dan programkan agar terstimulasi menjadi tantangan, sehingga anak cucu kita bisa ikut merasakan hasilnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya, mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Sumsel. Sehingga ke depan Pemprov lebih gencar melakukan peningkatan produksi padi,



pangan dan teknologi pertanian di Bumi Sriwijaya. Apalagi saat ini Sumsel masuk dalam lima besar provinsi dengan produksi padi tertinggi nasional.

“Bangga sekali kita dan ini pastinya menjadi motivasi juga buat kita di daerah untuk lebih meningkatkan produksi padi serta meningkatkan sistem perta-

nian dan pangan yang sudah kita lakukan selama ini. Sehingga bisa naik lagi peringkatnya,” jelas Mawardi.

Sebelumnya, Wagub Mawardi Yahya juga menghadiri acara pemberian penghargaan oleh IRRI kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. ●





HANURA PERCAYA DIRI KEMBALI KE PARLEMEN

Oesman Sapta: Fokus Garap Pemilih Milenial

Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura bertekad untuk kembali ke Parlemen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berbekal pengalaman pengurus dan kader, Hanura memulai langkah dengan mendaftarkan diri sebagai partai peserta Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dipimpin langsung sang Ketua Umum, Oesman Sapta, pengurus dan kader Hanura mendaftarkan ke Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2022).

Hanura menjadi partai politik ke-16 yang mendaftarkan ke KPU sebagai calon peserta Pemilu Serentak 2024. Sebelumnya ada sudah ada 15 partai politik yang melakukan pendaftaran, yakni PDIP, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Reformasi, Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai),

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gerakan Perubahan (Garuda), Partai Demokrat, Partai Gelora, dan Partai Republik Indonesia.

Usai mendaftarkan ke KPU, Partai Hanura siap untuk mengikuti tahapan selanjutnya yakni verifikasi administrasi dan faktual.

"Hari ini Partai Hanura melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024," kata Oesman Sapta.

Dia menjelaskan, secara internal Partai Hanura telah berbulan-bulan mempersiapkan diri untuk mencapai 100 persen semua persyaratan yang bersifat admin-

istratif sebagaimana diatur oleh Peraturan KPU.

"Partai Hanura 100 persen telah siap untuk dilakukan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar Oesman Sapta.

Dia berharap pilihan mendaftarkan diri pada 8 Agustus 2022 menjadi hari yang baik bagi Partai Hanura dan juga seluruh rakyat Indonesia.

Oesman Sapta menyatakan bahwa Hanura adalah partai yang sejak kelahirannya dipersiapkan untuk kepentingan bangsa Indonesia, bukan bagi kepentingan orang per orang yang menjadi elite partai dan pengurusnya.

"Maka totalitas pengabdian dan per-

juangan Partai Hanura sepenuhnya kami berikan untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Kami memahami bahwa secara politik setiap partai didirikan untuk merebut kekuasaan, tapi secara ideologis Partai Hanura paham dan sadar bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir dari partai politik," paparnya.

Kekuasaan sejatinya, lanjut Oesman Sapta, adalah alat perjuangan politik untuk mewujudkan cita-cita tertinggi rakyat, yaitu kedamaian, keadilan dan kesejahteraan.

"Semoga Pemilu 2024 menjadi pemilu bersejarah yaitu pemilu yang menggembarakan, bukan pemilu menegangkan. Pemilu yang menjadi ajang adu gagasan, bukan pemilu saling menjatuhkan, pemilu yang saling menguatkan persatuan nasional, bukan pemilu yang memecah belah dengan menyebarkan kebencian," jelasnya.

Oesman Sapta juga berharap partainya lolos parlemen pada Pemilu 2024. "Harapannya kita menang, harapannya kita berjuang lillah ta'ala," kata OSO, sa-paan Oesman Sapta.

OSO meminta para kader dan jajaran pengurus pada semua tingkatan untuk bekerja keras agar bisa memenuhi angka parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen.

Politikus Kalimantan Barat itu menargetkan partainya untuk fokus menggarap pemilih milenial pada Pemilu 2024. Sebab, menurut dia, terdapat 60 persen suara kaum milenial pada Pemilu 2024. Dia berpesan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu mendatang.

"Kita ingin maju dan adik-adik kita milenial-milenial itu harus memilih pemimpinnya di masa mendatang. Karena 60 persen pemilih 2024 itu milenial. Jadi, anak-anak muda itu sangat penting," kata Ketua DPD periode 2014-2019 itu.

Setelah pendaftaran, Tim Verifikasi Faktual DPP Partai Hanura melaksanakan rapat bersama seluruh DPD dan DPC membahas garis-garis besar pelaksanaan, pendaftaran, verifikasi hingga penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu 2024.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Tim Verifikasi Faktual DPP Partai Hanura, Jakarta, Sabtu (9/4/2022), Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kader dan

Keanggotaan (OKK) DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani, menegaskan bahwa DPP, DPD dan DPC harus melakukan kerja-kerja politik untuk mempersiapkan seluruh kepesertaan Pemilu 2024, serta melakukan proses input dari wilayah masing-masing.

"Kita sudah bekerja sejak bulan Maret. Kerja-kerja yang harus kita lakukan (tim verifikasi), baik pusat maupun provinsi atau kabupaten/kota dari Maret hingga Juni adalah melakukan persiapan seluruh persyaratan kepesertaan Pemilu 2024," jelasnya.

Benny juga mengingatkan sekaligus

memberikan motivasi kepada pengurus Partai Hanura di seluruh daerah untuk memenuhi syarat verifikasi faktual, sebagai bagian dari tahap menjadi peserta Pemilu 2024.

"Kami DPP Partai Hanura percaya bahwa saudara adalah para pejuang di lapangan. Saudara-saudara yang hari ini terus bekerja melakukan kerja politik di lapangan. Saudara-saudara adalah garis terdepan yang akan menentukan partai kita lolos atau tidak dalam verifikasi partai yang akan dilakukan nanti," ungkapnya.

Benny pun yakin dan percaya bahwa DPD dan DPC sedang menyusun



• INFO POLITIK

kepengurusan. Tentu progres kepengurusan ini harus dikabarkan ke DPP. Untuk itu, dia meminta agar semuanya dapat mempersiapkan termasuk perangkat yang dibutuhkan.

"Saya sering mengatakan, tidak ada orang hebat di partai ini dan tidak ada satu pun manusia di partai ini, yang dia tahu semua urusan dan menyelesaikan semua masalah. Sehingga kerja bersama dan sama-sama kerja menjadi penting bagi kita," ujarnya.

"Kita bisa bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kuncinya jika kita memiliki semangat sebagai keluarga besar dan soliditas yang harus kita kuatkan. Saya yakin juga jajaran DPD dan DPC sudah melakukan itu di level bawah,"

Efriza, mengatakan, Pemilu 2024 dapat menjadi titik balik bagi Partai Hanura. Namun, Oesman Sapta selaku ketua umum harus membuat langkah-langkah strategis.

"Hanura dapat melakukan berbagai langkah-langkah positif untuk menjadi titik balik dari terperosok, sehingga diperhitungkan kembali di kancah politik nasional," kata Efriza saat dihubungi Info Indonesia, Senin (15/8/2022).

Menurut dia, Ketua Umum Partai Hanura harus membuat gebrakan-gebrakan dan para kadernya perlu melakukan kerja-kerja nyata yang langsung menyentuh masyarakat. Hal ini bisa mempengaruhi perolehan suara Partai Hanura di pemilu mendatang.

juga karena OSO memiliki rekam jejak yang cemerlang di perpolitikan nasional dengan pernah menjabat sebagai Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR.

"Momentum titik balik ini besar karena OSO punya kekuatan finansial. Rekam jejaknya yang jelas, kepemimpinannya yang juga sudah diakui dalam kancah nasional," ujarnya.

Pengamat politik, Ujang Komarudin, menilai Partai Hanura punya peluang besar untuk kembali lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu 2024.

Hanura punya potensi untuk lolos ke Senayan, namun, mesin partai yang dikomandoi Oesman Sapta itu harus bekerja keras untuk merebut hati dan



Pengamat politik, Ujang Komarudin



Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza

terang Benny.

Terkait hal itu, Benny pun menyampaikan pesan yang selalu dikatakan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, yang menurutnya terus memberikan inspirasi dan semangat kepada para jajarannya di internal partai.

"Jangan pernah menyerah pada keadaan, jangan merasa kalah pada kegagalan. Jika kita solid dan mau bekerja keras, kita masih punya harapan dan sukses itu akan kita genggam," ujar Benny membacakan pesan OSO.

Titik Balik

Pengamat politik dari Citra Institute,

"Untuk membangun kekuatan Partai Hanura di daerah-daerah," ujar Efriza.

Selain itu, kata Efriza, OSO perlu melakukan langkah-langkah politik. Salah satunya menjalin komunikasi dengan parpol lainnya. Dikatakan Efriza, Hanura memiliki daya tarik untuk menjadi parpol besar.

"OSO juga harus melakukan langkah-langkah kerja politik membangun hubungan baik dengan partai-partai di tingkat nasional," jelas Efriza.

Di satu sisi, Efriza menilai jika OSO memiliki kekuatan finansial yang bisa digunakan untuk mendongkrak perolehan suara partainya di Pemilu 2024. Selain

suara rakyat. Apalagi, Hanura punya pengalaman gagal menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2019.

Belajar dari 2019, kata Doktor Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia itu, sudah cukup untuk dijadikan bekal Hanura untuk berlaga di pesta demokrasi 2024.

"Hanura punya instrumen. Tetapi persaingan semakin berat. Partai-partai baru juga makin banyak, agresif dan progresif dalam menantang partai lama. Jadi butuh kerja keras," ujar pendiri Indonesia Political Review (IPR) ini saat diwawancarai Info Indonesia, Kamis (11/8/2022). ●

MENANTI BERKAH DAN ELEKTORAL TGB ZAINUL MAJDI DI PARTAI PERINDO

Partai Perindo semakin serius menyiapkan diri untuk menghadapi pesta demokrasi nasional pada Pemilu 2024. Manuver berani dan mengejutkan adalah menunjuk Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo.

Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (6/8/2022), berdasarkan SK DPP Partai Perindo No. 1800/SK DPP Perindo/VIII/2022 tentang Pengangkatan Ketua Harian Nasional Partai Perindo yang dibacakan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq.

Hary Tanoesoedibjo menjelaskan, TGB memiliki pengalaman yang cukup mumpuni untuk menjadi Ketua Harian Nasional DPP Perindo. Selain seorang tokoh, ulama, nasionalis, juga sangat mumpuni di birokrat. TGB diketahui 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pernah menjadi anggota di DPR.

"Jadi mungkin tadi belum disampaikan latar belakang beliau, bahwa umur 23 tahun sudah menjadi anggota DPR,

RI," kata Hary Tanoe di MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat.

"Dan untuk menjadi anggota DPR itu melalui satu perjuangan, tidak serta-merta menjadi anggota DPR. Kalau tidak salah, pada 2004, pada saat Indonesia sudah mulai terbuka di pilpres yang dipilih langsung oleh rakyat. Setelah itu mengikuti Pilgub dan menjadi gubernur 2008 sampai dengan 2018. Jadi singkatnya umur 23 tahun sudah anggota DPR, umur 36 tahun sudah menjadi gubernur," sambungnya.

Dia juga mengatakan kepemimpinan TGB tidak perlu diragukan lagi, sehingga TGB memahami arti perjuangan Partai Perindo.

"Saya mendengarkan pidato beliau tadi sudah sangat memahami jiwa daripada partai kita, sangat memahami. Jadi saya rasa terhitung mulai sejak hari ini,

kepemimpinan beliau saya rasa sudah tidak usah diragukan lagi. Dalam memimpin perlu leadership. Saya rasa kita tidak perlu ragukan sebagai gubernur 10 tahun itu udah teruji leadershipnya, tapi leadership juga harus dalam konteks pemahaman daripada tujuan. Saya simak tadi Pak TGB memahami betul esensi dari perjuangan Partai Perindo," tuturnya.

Sementara itu, TGB Muhammad Zainul Majdi menyampaikan rasa terima kasih atas penunjukan dirinya. Dia berharap dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan baik.

"Dengan mengucap bismillah, pada hari baik di tempat baik ini, saya berdiri di depan Bapak Ibu semua sebagai anggota kader Perindo. Yang memegang amanah dari Ketua Majelis Persatuan Partai, Ketua Umum Perindo Bapak Hari



• INFO POLITIK

Tanoë, sebagai Ketua Harian Nasional DPP Perindo. Atas nama pribadi dan keluarga, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan,” ujar TGB Muhammad Zainul Majdi.

TGB juga bersyukur karena momentum pelantikan dirinya sebagai Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo bertepatan dengan satu tahun lahirnya logo baru Partai Perindo.

Momentum yang istimewa ini diharapkan menjadi pertanda kerja keras Partai Perindo untuk meraih target kemenangan di Pemilu 2024. TGB menargetkan

Mudah-mudahan diridhai oleh Allah SWT,” ujar dia.

TGB mengatakan Partai Perindo merupakan ruang amaliah yang istimewa dalam mempertemukan anak bangsa dengan berbagai latar belakang untuk menghadirkan ruang politik yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat.

“Mengapa saya memilih berkhidmat melalui Partai Perindo? Partai politik insya Allah semuanya baik, saya dan semua yakin bahwa semua pemimpin parpol berkhidmat maksimal untuk kemajuan Indonesia,” kata dia.

gan semangat persatuan, marwah Indonesia akan terjaga.

TGB menyebut bahwa Partai Perindo merupakan partai yang hanya berlandaskan Pancasila. Dengan berpedoman kepada Pancasila, Partai Perindo membuka ruang seluas-luasnya untuk seluruh anak bangsa berjuang bersama untuk Indonesia.

“Alasan lainnya, partai ini tidak berpanjang mengumbar janji. Hanya ada satu kata, tapi banyak makna, yakni politik untuk kesejahteraan. Sehingga Partai Perindo telah menangkap esensi dari harapan masyarakat,” kata dia.

Berkah Bagi Perindo

Politikus Partai NasDem, Akbar Faizal, mengaku terkejut dengan langkah politik TGB Zainul Majdi setelah masuk Partai Perindo.

“Perindo mendapat jackpot (berkah). Terus terang saya terperangah dengan langkah politiknya,” kata dia, Kamis (11/8/2022).

Bagi Partai Perindo, masuknya TGB Zainul Majdi sebagai Ketua Harian Nasional jelas menjadi berkah. Terlebih TGB memiliki track record yang publik ketahui tak hanya sebagai ulama, tapi juga politisi. “Jelas, orang menjadi berpikir untuk pemilu 2024,” ucapnya.

Menurut pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power, Ikhwan Arif, Bergabungnya TGB ke Partai Perindo menambah kekuatan baru bagi partai. Hal ini adalah sebuah keputusan yang tepat bagi partai Perindo untuk memilih TGB sebagai Ketua Harian Partai Perindo.

“Ada kekuatan baru dalam internal partai Perindo. Apalagi TGB adalah sosok yang dinilai religius, ketokohnya tidak hanya populer di wilayah timur Indonesia, tapi secara nasional TGB dikenal sebagai figur yang religius dan peduli terhadap kemajemukan,” ungkapnya.

“Dengan bergabungnya TGB ke Partai Perindo, akan muncul stigma positif di lapisan masyarakat bahwa Partai Perindo sangat terbuka dengan tokoh-tokoh religius. Tentunya akan berpengaruh terhadap elektoral dan elektabilitas partai Perindo, terutama berpengaruh terhadap para pemilih yang orientasinya kepada tokoh yang religius,” papar Ikhwan.



Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo



Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi

Partai Perindo mampu meraih 60 kursi di DPR sebagaimana yang dicanangkan Hary Tanoë.

“Alhamdulillah, pada hari ini, 6 Agustus 2022, persis satu tahun setelah Partai Perindo memunculkan logo barunya. Semoga ini menjadi penanda ikhtiar kita semua. Sesuai yang dicanangkan Ketua Partai Perindo, 60 kursi di DPR RI.

Namun di tengah kesamaan itu, menurutnya, Partai Perindo memiliki beberapa keunikan. Ada hal-hal yang fundamental yang menyebabkan dirinya tertarik untuk berkiprah dan berkhidmat melalui Partai Perindo.

Menurutnya Partai Perindo sesuai namanya diharapkan mampu menjaga persatuan bangsa karena hanya den-

Ikhwan mengatakan, faktor ketokohan dalam internal partai sangat penting untuk membangun citra positif partai di tengah masyarakat. Tugas berat TGB di Perindo adalah menghilangkan stigma bahwa partai politik hanya untuk mengeruk suara rakyat ketika pemilu berlangsung.

“Dengan menyamakan visi dan misi partai, secara otomatis akan seirama dengan tujuan umum partai politik dibentuk, yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mensejahterakan seluruh rakyat dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang berbasis Pancasila dan menghargai keberagaman,” kata Ikhwan.

“Terakhir menurut saya, semakin kokohnya ketokohan di internal partai, maka semakin bagus langkah partai politik sebagai wadah penampung aspirasi dan tuntunan rakyat. Ketokohan dalam partai juga berpengaruh terhadap salah satu fungsi partai politik, yaitu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. TGB dikenal sebagai seorang guru yang peduli terhadap keberagaman dan kebhinekaan, kehadiran beliau dapat mengubah mindset politik masyarakat terhadap perkembangan politik di Tanah Air,” terangnya.

Daya Tarik Masyarakat

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, daya magnet TGB akan membuat Partai Perindo semakin disukai masyarakat. TGB disebut jaminan masa depan yang baik bagi Partai Perindo

Pangi menyebut TGB tidak mungkin masuk ke partai tanpa memiliki perhitungan. “Kalau mau bergabung pasti ada harapan. Itu yang membuat sekelas TGB yang pernah menjadi gubernur masuk di Partai Perindo,” kata Pangi dikutip dari MNC Portal.

Dia menilai dengan masuknya TGB ke Partai Perindo secara tidak langsung akan menjadi daya tarik masyarakat. Hal itu dinilai karena sejauh ini sistem politik Indonesia masih berdasarkan ketokohan.

“Memang idealnya yang bergerak mesin partai. Tapi semakin banyak tokoh yang bergabung akan meningkatkan elektabilitas partai. Efek tokoh sangat mempengaruhi,” jelasnya.

Dia menilai jika nantinya banyak tokoh yang bergabung, maka akan memberi

kan peluang besar Partai Perindo lolos pada ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Dia menilai partai politik harus memilih kandidat yang tepat dan mampu untuk menjadi calon anggota DPR. “Partainya harus lolos ke parliamentary threshold. Sayang nanti kalau salah satu tokoh besar suaranya, tapi partainya tidak lolos. Buang-buang suara. Maka sulit memang untuk lolos ke parliamentary threshold,” jelasnya.

Sementara, pengamat politik, Surokim Abdus Salam, menilai penempatan TGB Zainul Majdi sebagai Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo akan mem-

tuhkan daya ungkit tokoh. “Keberadaan tokoh-tokoh lintas agama dan wilayah yang lebih banyak diyakini dapat menguatkan misi sebagai partai inklusif,” ujar dia.

Dia mengakui, tokoh-tokoh nasional yang memiliki kapasitas dan reputasi tersebut akan mampu mendongkrak daya pilih Partai Perindo. Terlebih, TGB mempunyai kapasitas baik struktural maupun simbolik untuk menjadikan Partai Perindo menarik dukungan lebih luas.

Dengan begitu, Partai Perindo mempunyai peluang membangun basis wilayah dukungan lebih kuat di Indonesia Timur. “Hal ini akan bisa menjadi



Pengamat Politik Citra Institute, Yusa Farchan

bawa dampak cukup signifikan bagi Partai Perindo sebagai partai inklusif dan modern. Sejauh yang dia amati, Partai Perindo selama ini masih dipersepsi eksklusif dibenak para pemilih Indonesia. Namun, dengan TGB bergabung, Partai Perindo akan mampu menggeser persepsi tersebut.

“Ini strategi cerdas dan strategis bagi Partai Perindo menuju 2024,” kata Surokim.

Surokim menjelaskan, TGB adalah tokoh nasional yang memiliki pengalaman luas dan reputasi positif serta akan mampu mengangkat citra Partai Perindo lebih masif dan meluas.

“Apalagi TGB juga dikenal sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki pengikut yang cukup kuat secara kultural,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan merekrut TGB, Partai Perindo harus mampu lolos parliamentary threshold dan itu jelas membu-

modal elektoral simbolik yang bisa menguatkan citra Partai Perindo sebagai partai nasionalis dengan daya pilihnya lebih luas,” ujar Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) ini.

Pengamat Politik Citra Institute, Yusa Farchan, berpendapat, dipilihnya TGB sebagai ketua harian merupakan langkah progresif Partai Perindo dalam membangun sistem kepartaian yang inklusif.

“Pelantikan TGB menunjukkan bahwa Perindo adalah partai inklusif dan terbuka untuk semua kalangan,” ujar Yusa.

Menurut Yusa, salah satu tantangan bagi proses rekonsolidasi demokrasi saat ini adalah bagaimana membangun sistem kepartaian yang sehat dan inklusif. Partai politik merupakan pilar utama sistem demokrasi perwakilan, sehingga prinsip inklusifitas perlu dibangun berdasarkan pluralisme politik dan fakta keragaman yang menjadi ciri masyarakat Indonesia. ●



Kembalinya Porsche di GIIAS 2022

PAMERKAN PERFORMA, KEMEWAHAN, DAN E-MOBILITY



Porsche Indonesia kembali hadir di pameran otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-29 di International Convention and Exhibition Center di Bumi Serpong Damai (ICE BSD City), 11-21 Agustus 2022. Tiga model unggulan yang dipajang yakni Porsche Taycan Turbo, Cayenne Turbo S E-Hybrid, dan 718 Cayman GT4.

Tema GIIAS tahun ini adalah "The Future is Bright", di mana Porsche menyoroti perkembangan positif industri otomotif di Indonesia, karena terus berkembang dan menyambut kemajuan teknologi lebih lanjut di tahun-tahun mendatang.

Managing Director Porsche Indonesia, Michael Vetter, menyebutkan, elektrifikasi adalah masa depan pengembangan otomotif. Porsche juga menoreh kesuksesan dalam penjualan mobil listrik di Indonesia, terutama sejak diperkenalkannya mobil sport all-electric pertama mereka, yaitu Taycan. Serta model Plug-in Hybrid Elec-

tric Vehicle (PHEV) yang baru-baru ini diperkenalkan, yakni model Cayenne dan Panamera E-Hybrid.

"Kami sangat antusias untuk memperkenalkan serangkaian karakter Porsche kepada audiens yang lebih luas di pameran mobil terbesar di Indonesia. Kami juga bangga mendukung komitmen pemerintah Indonesia terhadap elektrifikasi dengan menghadirkan Porsche E-Performance yang kuat di dalam line-up kami," ungkap Vetter dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (12/8/2022).

Porsche Taycan Turbo

Mobil sport elektrik pertama yang dikenalkan Porsche adalah Taycan. Mobil ini adalah penerus kisah sukses yang telah mempesona dan menggetarkan orang di seluruh dunia selama lebih dari 70 tahun. Taycan

menawarkan performa Porsche murni dengan nol emisi lokal, baik dalam gaya bodi Sport Saloon atau Cross Turismo.

Taycan Turbo menampilkan dua motor listrik cerdas yang menghasilkan tenaga hingga 680 PS/500 kW yang dikombinasikan dengan Launch Control. Mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 kilometer per jam hanya dalam 3,2 detik, dengan kecepatan tertingginya 260 kilometer per jam. Hal ini berkat transmisi dua kecepatan pertama di dunia yang dipasang di gardar belakang yang merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Porsche.

Gigi pertama difokuskan untuk akselerasi dari kondisi stasioner. Sementara gigi kedua, dengan rasio gigi yang lebih panjang, memastikan efisiensi tinggi. Selain itu, Porsche mengklaim motor listrik depan Taycan dapat dipisahkan secara cerdas. Dengan demikian jarak tempuh mobil ini mencapai 512 kilometer (menurut WLTP).

Pengisi Daya Cepat

Sebagai kendaraan produksi pertama dengan voltase sistem 800 volt, bukan 400 volt biasa untuk mobil listrik, Taycan mendapat man-





faat dari pengisian daya yang sangat cepat. Waktu pengisian daya dari 5-80 persen SoC (status pengisian daya) hanya membutuhkan waktu 22,5 menit di bawah kondisi ideal. Lalu, hanya dengan 10 menit pengisi daya cepat, pemilik dapat dengan mudah mencapai jangkauan lebih dari 100 km.

Dengan desain eksterior dan interior yang bersih dan murni, Taycan menandakan awal dari era baru. Pada saat yang sama, ia mempertahankan bahasa desain Porsche yang tidak mungkin salah.

Seperti semua model dari Porsche, Taycan menampilkan ratusan opsi personalisasi, dari palet Paint to Sample untuk eksterior, hingga elemen Porsche Exclusive Manufaktur kerajinan tangan yang dapat ditambahkan ke interior.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

Cayenne Turbo S E-Hybrid menggabungkan kekuatan, inovasi, dan utilitas dalam paket yang tak tertandingi. Seperti semua hibrida plug-in Porsche, ini adalah salah satu kendaraan paling sporty di segmen premium karena tidak terlepas dari powertrain hibridanya.

Output sistem gabungan sebesar 500 kW (680 PS) berasal dari interaksi cerdas mesin V8 empat liter (404 kW/550 PS) dan motor listrik yang ter-



integrasi ke dalam transmisi Tiptronic S delapan kecepatan (100 kW/136 PS). Torsi sistem maksimum 900 Nm tersedia tepat di atas idle.

Terlepas dari perawakannya, Cayenne Turbo S E-Hybrid berakselerasi dari posisi awal hingga 100 km per jam dalam 3,8 detik dan mencapai kecepatan tertinggi 295 km per jam. Performa luar biasa ini diimbangi dengan tingkat efisiensi yang tinggi, karena Cayenne Turbo S E-Hybrid juga dapat dikendarai hingga 40 km tanpa emisi lokal.

Cayenne Turbo S E-Hybrid juga dilengkapi dengan peralatan lengkap pabrik sebagai standar. Yakni fitur sistem stabilisasi guling listrik Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC),

kunci diferensial poros belakang Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), rem performa tinggi Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB), velg ringan 21 inci dalam desain Aero termasuk ekstensi lengkungan roda dalam warna bodi, Power Steering Plus, dan Paket Sport Chrono.

Suspensi udara tiga ruang adaptif, termasuk Porsche Active Suspension Management (PASM), memastikan spektrum luas dinamika berkendara khas Porsche dan pengendalian yang nyaman. Velg ringan hingga 22 inci dan kemudi gandar belakang juga tersedia sebagai tambahan opsional.

Semua model Cayenne dilengkapi lampu depan LED, cruise control dengan fungsi pembatas kecepatan, perlindungan pejalan kaki berbasis kamera, dan Park Assist di bagian depan dan belakang.

Ekstra opsional termasuk lampu depan LED matrix beam, head-up display, Night Vision dengan kamera thermal imaging, dan co-pilot digital Porsche InnoDrive termasuk adaptive cruise control, lane keeping assist, road sign recognition, active lane guidance, junction assistant dan emergency brakes.

Porsche 718 Cayman GT4

718 Cayman GT4 yang mencolok dirancang untuk penggemar mobil

sport yang menghargai tingkat kelincihan yang tinggi dan kedekatan dengan pusat tenaga.

Mobil sport bermesin tengah yang seimbang sempurna ini memiliki mesin boxer empat liter, enam silinder naturally aspirated yang menghasilkan 309 kW (420 hp), dicocokkan dengan transmisi manual enam kecepatan murni.

Karakter yang menarik dari mesin naturally aspirated ini terlihat dari pengiriman daya linier yang dikombinasikan dengan respons langsung dari mesin GT. Dengan kecepatan mesin maksimum 8.000 putaran untuk sensasi aural mesin boxer maksimum.

Sorotan lain dari 718 Cayman GT4 adalah konsep aerodinamis yang ditingkatkan secara komprehensif. Ini menghasilkan downforce hingga 50 persen lebih banyak, tanpa mempengaruhi hambatan, menjadi bukti efisiensi yang luar biasa.

Peredam belakang lengkung ruang tunggal juga menciptakan ruang di bagian belakang untuk difuser fungsional. Ini menyumbang 30 persen downforce yang baik di gandar belakang. Sayap belakang juga tetap ditandai dengan efisiensi yang lebih besar, yakni menghasilkan downforce sekitar 20 persen lebih banyak dibandingkan dengan pendahulunya.

Dengan dinamika menikung yang superior, sasis GT performa tinggi dari 718 Cayman GT4 memberikan pengalaman berkendara yang emosional. Sistem peredaman Porsche Active Suspension Management (PASM) dengan suspensi lebih rendah 30 mm menurunkan pusat gravitasi dan meningkatkan potensi dinamika lateral. Ini dirancang khusus untuk digunakan di arena balapan dan membuat karakteristik penanganan mid-engine 718 Cayman GT4 tajam seperti pisau bedah.

Sistem Porsche Stability Management (PSM) dan Porsche Torque Vectoring (PTV) dengan kunci diferensial belakang mekanis, semakin

meningkatkan dinamika longitudinal dan lateral, performa menikung, dan kenikmatan berkendara. Sistem rem performa tinggi pada 718 Cayman GT4 juga memberikan daya henti yang cocok untuk track driving berkat

Test Drive Taycan Indoor

Sejalan dengan fokus pada elektrifikasi di GIIAS tahun ini, Gaikindo telah menyiapkan area test-drive dalam ruangan khusus bagi pengunjung untuk mencicipi penawaran kendaraan listrik baru dari pro-

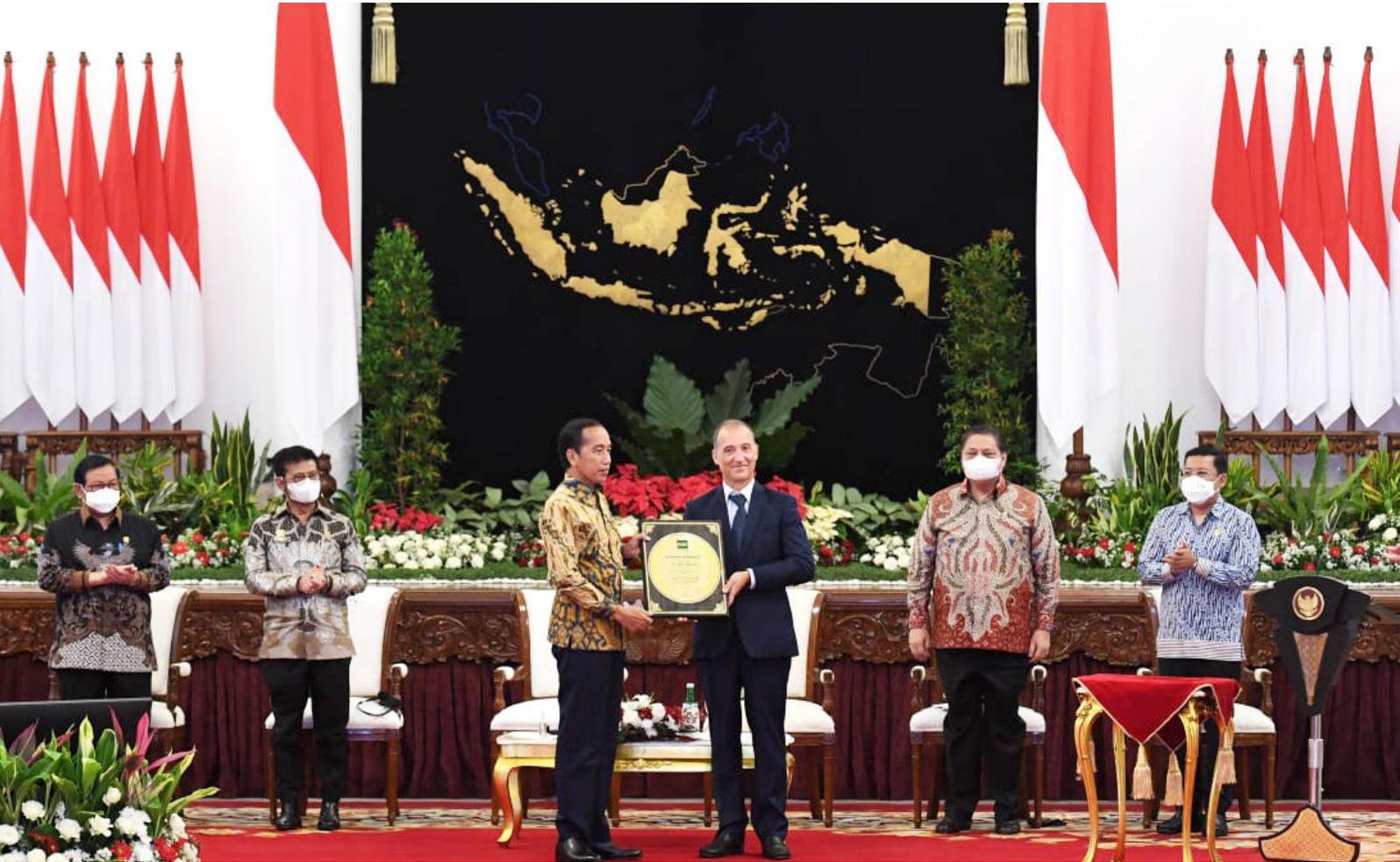


rem kaliper tetap aluminium monoblok yang besar.

Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) juga tersedia sebagai opsi untuk paket keseluruhan yang memungkinkan 718 Cayman GT4 menawarkan kenikmatan berkendara yang sempurna.

dusen. Di sini, pengunjung dapat merasakan pengalaman mobil sport all-electric pertama Porsche, Taycan Turbo.

Model Porsche lainnya tersedia untuk test drive di trek outdoor, yaitu model Cayenne dan Panamera E-Hybrid, serta Macan III yang baru saja diluncurkan di Indonesia. ●



KETAHANAN PANGAN INDONESIA DIAKUI DUNIA INTERNASIONAL

Pemerintah Indonesia percaya diri mampu menjaga ketahanan pangan di tengah kondisi krisis pangan global akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Apalagi, pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur di bidang pertanian, mulai dari bendungan, embung, hingga jaringan irigasi guna mendukung peningkatan hasil produksi pertanian nasional.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memanfaatkan varietas-varietas unggul padi, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga Indonesia dapat mencapai swasem-

bada beras dengan produksi yang surplus selama tiga tahun terakhir.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir April 2022, jumlah stok beras berada di angka 10,2 juta ton. Presiden pun berharap agar para petani tidak hanya memproduksi komoditas pertanian yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga komoditas pertanian yang masuk pasar ekspor.

"Di tengah ancaman krisis pangan di tingkat global, sekali lagi pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi, menjamin ketercukupan pangan di dalam negeri, dan sekaligus

memberikan kontribusi bagi kecukupan pangan dunia. Kita juga harus terus mendorong agar kita tidak hanya memproduksi yang bisa kita konsumsi oleh rakyat kita saja, tetapi nanti apabila produksinya meningkat, kita juga harus mulai masuk ke pasar-pasar ekspor," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/08/2022).

Atas pencapaian tersebut, Presiden Jokowi menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras dan baiknya sistem ketahanan pangan yang dimiliki.

Presiden menjelaskan, surplus atau stok beras yang dimiliki di tengah krisis pangan dunia, menjadi salah satu indikator Indonesia berhasil meraih penghargaan atas sistem ketahanan pangan yang baik dari IRRI.

Selama tiga tahun terakhir, sejak 2019-2021, Indonesia juga konsisten tidak membuka importasi beras karena produksi nasional yang mencukupi kebutuhan pangan. Tercatat, produksi beras nasional rata-rata mencapai 31,3 juta ton pada 2019-2021.

Selain itu, agar tidak bergantung pada satu komoditas saja, yakni pada beras, Presiden meminta diversifikasi pangan, termasuk pada tanaman sorgum yang saat ini dikembangkan di Waingapu, Nusa Tenggara Timur.

Dengan ekstensifikasi lahan pada tanaman sorgum, Presiden berharap Indonesia tidak lagi bergantung pada jagung impor, baik untuk bahan pangan maupun pakan ternak.

"Kita harap dengan terus kita konsentrasi ke sana, insya Allah kita sudah tidak impor jagung lagi dalam 2-3 tahun mendatang, seperti beras yang sudah tiga tahun tidak impor," kata Presiden.

Direktur Jenderal IRRI, Jean Balie, mengatakan, pencapaian Indonesia itu merupakan langkah besar untuk menciptakan ketahanan pangan nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik global. IRRI berkomitmen akan bekerja sama dalam jangka panjang untuk memperkuat sistem ketahanan pangan di Indonesia.

"Pada kesempatan ini, saya ingin menyerahkan plakat kepada Presiden Jokowi sebagai bentuk pengakuan dan ucapan selamat atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras dan meningkatkan sistem ketahanan pangan nasional," kata Balie.

"Ini adalah pencapaian yang sangat besar, dibuktikan dengan sistem pertanian-pangan tingkat tinggi, ketahanan pangan, tidak hanya beras, tetapi juga pada komoditas lain, terutama di tengah kondisi ketegangan geopolitik," paparnya.

Menurut Balie, selama pandemi yang sangat mempengaruhi berbagai negara, Indonesia berhasil mendongkrak tingkat produktivitas produksi dan mencapai tingkat swasembada yang

tinggi. IRRI menilai Indonesia mencapai swasembada karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dari 20 persen.

"Ini merupakan hasil dari adopsi teknologi yang tinggi, pelatihan petani yang baik, juga kinerja penyuluhan yang sangat baik dan kerja sama yang sangat baik antar instansi, khususnya antara IRRI dan pemerintah Indonesia," kata Balie.

Selain IRRI, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) juga mengakui sistem ketahanan pangan di Indonesia yang tangguh di tengah krisis pangan dan ketegangan geopolitik.

Representasi FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, menilai, penghargaan yang diberikan IRRI kepada pemerintah Indonesia merupakan sebuah pencapaian besar, terutama terkait swasembada beras di



• INFO ISTANA

tenengah pandemi COVID-19 dan situasi geopolitik.

"Saya katakan bahwa ini adalah pencapaian besar yang telah dicapai Indonesia karena kita telah melihat hampir tidak ada impor beras kecuali untuk varietas premium. Impor jagung juga telah stabil, jadi saya akan mengatakan bahwa ini adalah pencapaian besar dan ini merupakan tonggak utama menuju sistem pangan pertanian yang tangguh di negara ini," kata Rajendra Aryal.

FAO berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam menyediakan dukungan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pangan. Pihaknya juga siap untuk bekerja sama dengan pemerintah In-

77 RI.

Syarul mengatakan produksi padi kini kian meningkat signifikan hingga mencapai swasembada beras, di mana dalam tiga tahun terakhir Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras. Melalui penggunaan teknologi inovasi dalam berbagai aspek di bidang pertanian, Indonesia bahkan telah berhasil membangun bendungan dan irigasi yang jadi tolok ukur hadirnya pertanian yang kuat.

Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, kata Syahrul, pencapaian swasembada beras itu merupakan hasil kerja terintegrasi semua pihak, khususnya para petani.

Meskipun demikian, dia mengingatkan arahan Presiden Jokowi bahwa

Prosentasinya sangat-sangat kecil dibandingkan produksi beras dan stok beras kita," kata Kuntoro.

Kuntoro menyebutkan broken rice yang berkode HS 10064090 tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan pakan ternak. Pada 2019, impor broken rice mencapai 98,6 persen dari keseluruhan impor beras, 2020 mencapai 90,47 persen, dan 2021 sebanyak 81,63 persen.

Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menilai Indonesia memang layak dan sudah sepatutnya mendapatkan penghargaan dari IRRI karena telah swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut.

"Kita patut bersyukur, IRRI telah menilai Indonesia mampu menghasilkan penelitian di bidang padi dan sekaligus penerapannya di lapangan," kata Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/8/2022).

Menurut dia, penghargaan tersebut bisa dijadikan pemantik bagi pemerintah, juga dunia pertanian Indonesia untuk selalu berinovasi agar mampu menghadapi tantangan pangan global dalam jangka panjang. Penghargaan dari IRRI sekaligus menjadi pemicu untuk bisa mengantisipasi tantangan pangan global ke depan yang penuh ketidakpastian.

Menurut Sutarto, ada beberapa terobosan yang harus segera dilakukan pemerintah supaya pertanian Indonesia semakin kuat di tingkat nasional maupun global. Yakni meningkatkan produktivitas pangan, mendorong pangan bersumber bahan pangan produksi lokal atau diversifikasi pangan sehat, dan menetapkan harga produk pangan yang sewajarnya.

"Tantangan lainnya agar ketersediaan pangan produksi dalam negeri meningkat, tentunya harga produk pangan seyogyanya bukan asal murah tetapi harga wajar, sehingga petani bisa sejahtera," katanya.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyebutkan penghargaan IRRI kepada Indonesia sebagai negara yang berhasil swasembada beras adalah pencapaian yang membanggakan bagi petani.



nesia untuk bisa mempertahankan pencapaian swasembada ini menuju ketahanan sektor pertanian yang lebih baik ke depannya.

"FAO bersedia berkomitmen untuk menyediakan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk produksi yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik," kata dia.

Hasil Kerja Petani

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, penghargaan dari IRRI atas pencapaian Indonesia dalam swasembada beras dan meningkatkan sistem ketahanan pangan nasional merupakan kado besar bagi HUT ke-

tantangan global masih ada, sehingga upaya memperkuat ketahanan pangan nasional harus dilakukan lebih keras lagi.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, menambahkan, dengan ketersediaan beras yang sangat mencukupi, Indonesia sudah tidak mengimpor beras konsumsi. Beras yang masih diimpor Indonesia merupakan beras untuk keperluan industri. Tercatat Indonesia mengimpor beras khusus pada 2019 sebanyak 444,51 ribu ton, 2020 sebanyak 356,29 ribu ton, dan 2021 sebanyak 407,74 ton.

"Namun sebanyak 82-99 persen impor berupa broken rice atau beras pecah untuk bahan baku industri.

Sekretaris Jenderal HKTI, Sadar Subagyo, mengapresiasi upaya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menggiatkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung kemajuan sektor pertanian. "Prestasi beliau dalam mengadakan KUR bagus," katanya.

HKTI memberikan beberapa masukan bagi pemerintah agar konsisten meningkatkan produksi beras, sehingga mampu mempertahankan prestasi yang didapat dari IRRI. Yakni membatasi laju konversi sawah dengan menerapkan UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, membuka lahan-lahan sawah baru atau ekstensifikasi, melakukan penyehatan lahan sawah di Jawa dengan pemberian pupuk yang berimbang antara organik, kimia dan hayati.

"Lalu, melakukan tata ulang business process padi, sehingga memberikan keuntungan memadai untuk petani," katanya.

Dari segi kebijakan pertanian, Sadar berharap petani mendapatkan subsidi harga gabah agar bisa menikmati hasil yang lebih menguntungkan. "Lebih baik lagi biaya subsidi pupuk (input) dialihkan untuk subsidi harga gabah (output), sehingga petani dapat memperoleh net profit minimal 30 persen," kata Sadar.

Semangat Petani Milenial

Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras selama tiga tahun terakhir, 2019-2021, bisa diraih berkat kerja sama terintegrasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga para petani. Bagi para petani, capaian tersebut menumbuhkan rasa bangga tersendiri yang memberikan dorongan semangat untuk terus berkarya.

Hal tersebut dirasakan oleh salah satu petani milenial asal Bali, Agung Wedhatama, yang turut hadir dalam acara penyerahan penghargaan IRRI kepada pemerintah Indonesia di Istana Negara.

"Kami sebagai petani milenial sangat bangga akan pencapaian negara kita, Indonesia dalam tiga tahun ini swasembada beras, kita tidak impor beras, dan selalu konsisten petani-petani kita di Nusantara bisa memproduksi beras dengan kuantitas yang mencukupi

bangsa kita, bahkan surplus. Adalah sebuah kebanggaan buat saya sebagai petani dan sebagai rakyat Indonesia," ujar Agung.

Menurut Agung, pandemi COVID-19 yang melanda justru membuat sektor pertanian makin tangguh karena para petani menjadi makin sadar bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang utama. Meski di masa pandemi secara pasar permintaan berkurang, tetapi kebutuhan pangan akan terus meningkat dan ke depannya isu pangan akan menjadi isu paling strategis di dunia.

"Ke depan, isu pangan memang menjadi isu paling strategis di dunia. You control the food, you control the people, you control the nation. Selagi kita bisa menyuplai surplus di pangan

jadi negara maju di 2030-2040 dengan bonus demografi kita," jelasnya.

Sementara itu, Ade Putra Daulay, petani milenial lainnya yang juga hadir dalam acara tersebut, menilai bahwa kerja sama lintas sektor merupakan faktor utama untuk meningkatkan sektor pertanian Indonesia. Menurutnya, pemerintah baik daerah maupun pusat harus terus memberikan dukungan bagi para petani yang memiliki berbagai keterbatasan.

"Tentunya ini kita harus bersama-sama dan harus mempunyai komitmen yang kuat, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana harapannya terhadap penumbuhan petani-petani milenial yang ada di Indonesia," ujar petani asal Riau tersebut.



kita, negara kita akan terkuat sejahtera dan makmur," imbuhnya.

Sebagai seorang petani, Agung menaruh harapan besar pada pemerintah, antara lain agar infrastruktur pertanian bisa terus ditingkatkan. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia, terutama anak-anak muda juga harus terus ditingkatkan agar ada regenerasi petani di Indonesia, sehingga tatanan pangan Indonesia makin kuat dan tangguh ke depannya.

"Tentu saja yang paling penting pengembangan teknologi pertanian, IoT (internet of things), dan digitalisasi dengan smart farming wajib dilakukan agar kita bisa bersaing dengan pangsa pasar lain, sehingga Indonesia bisa men-

Seperti halnya Agung, Ade pun merasa bangga dengan capaian swasembada beras Indonesia, sehingga mendapat penghargaan dari organisasi-organisasi internasional. Apalagi, menurutnya, capaian tersebut diraih di tengah krisis pandemi COVID-19 dan krisis pangan global akibat kondisi geopolitik yang tidak pasti.

"Kita petani milenial melihat hal ini kita apresiasi sangat luar biasa. Karena pada hari ini di tengah pandemi COVID-19 dan juga dihantui oleh krisis pangan global, tetapi Indonesia mampu survive di tengah pandemi COVID-19 ini, mampu meningkatkan hasil-hasil produksi, khususnya beras di Indonesia," ungkapnya •



KADO GARUDA ASIA UNTUK INDONESIA

Pemain Masa Depan Sepak Bola Tanah Air

“Saya meminta kepada para pemain untuk memberikan yang terbaik di final karena kesempatan tidak datang dua kali. Saya berharap mereka mengukir prestasi terbaik untuk karir dan itu akan menjadi hadiah kemerdekaan bangsa Indonesia.”

Kalimat itu menjadi doa yang diucapkan Bima Sakti sehari sebelum pertandingan melawan Vietnam di final Piala AFF U-16, Kamis (11/8/2022). Hasilnya, Garuda Asia keluar sebagai yang terbaik sekaligus mempertahankan gelar yang diraih pada Piala AFF U-16 edisi 2018.

Bahkan, Presiden Joko Widodo juga mengamini apa yang dikatakan Bima Sakti lewat akun resmi twitternya @jokowi.

“Selamat kepada timnas sepak bola U16 Indonesia yang telah mempersembahkan gelar juara Piala AFF

U16 2022 dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 pada partai final di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Gelar juara Piala AFF U16 2022 ini jadi sebutuk kado HUT Kemerdekaan.”

Meski hanya di level junior, keberhasilan yang diraih Garuda Asia ini menjadi obat bagi pencinta olahraga Tanah Air akan prestasi Timnas Indonesia. Sebelum turnamen ini, Timnas U-19 gagal melewati babak penyisihan Piala AFF U-19. Akhir tahun lalu, Timnas Senior juga gagal meraih juara Piala AFF 2021 usai dikalahkan Thailand di partai final.

Kesuksesan Indonesia juga se-

makin lengkap setelah sang kapten, Muhammad Iqbal Gwijangge, terpilih sebagai pemain terbaik Piala AFF U-16. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, menyatakan bakal menjadikan Iqbal sebagai anak angkatnya.

Pelatih Timnas Indonesia U-16, Bima Sakti, mengatakan, kehadiran orang tua di stadion menjadi motivasi para pemainnya untuk berjuang di final hingga berhasil menjadi juara Piala AFF U-16 2022.

“Kalau soal taktik saya kira sama saja. Yang paling penting pemain bisa melihat orang tua mereka karena sebe-

lumnya hanya menengok lewat foto," ujar Bima dalam konferensi pers usai laga final Piala AFF U-16 2022 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat (12/8/2022) malam.

Menurut juru taktik berusia 46 tahun itu, motivasi kuat dari keberadaan orang tua membuat anak-anak asuhnya tampil fokus dan bekerja keras sejak menit pertama pada partai puncak kontra Vietnam. Hal tersebut membuat skuad berjudul Garuda Asia mampu memenangkan pertandingan final itu dengan skor 1-0.

"Terima kasih kepada para pemain yang sudah bekerja keras," tutur Bima.

Selain itu, secara khusus, Bima menunjukkan trofi juara itu untuk tiga buah hatinya. Dia juga melontarkan terima kasih untuk salah satu anaknya, yang berkebutuhan khusus, karena dialah yang mengusulkan kepada Bima untuk mengundang orang tua semua pemain pada partai final Piala AFF U-16 itu.

"Anak saya berkebutuhan khusus dan belum bisa berjalan meski sudah seusia Iqbal. Namun, dia yang menyarankan saya untuk mendatangkan orang tua pemain. Masukan itu lalu saya sampaikan kepada Pak Ketua Umum PSSI, Sekretaris Jenderal PSSI dan Direktur Teknik PSSI. Alhamdulillah, orang tua pemain hadir di tengah-tengah kami," kata Bima.

Tidak lupa pula dia menyampaikan apresiasi kepada orang tua pemain dan para pelatih pemain skuadnya di sekolah sepak bola (SSB), akademi maupun klub. Bima menegaskan bahwa karena jasa merekalah pemain timnas U-16 dapat mempersembahkan juara Piala AFF U-16 2022 untuk Indonesia.

"Jadi siapapun pelatih timnas U-16, pemain sudah terbentuk dengan baik," ujar pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2018 itu.

Apresiasi Untuk Garuda Asia

Kesuksesan Timnas Indonesia U-16 mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Skuad Garuda Asia beserta jajaran pelatih mendapatkan undangan bertemu Presiden dan mengikuti upacara HUT ke-77 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu

(17/8/2022).

Iqbal dkk hadir bersama pelatih Bima Sakti ke Istana Merdeka pukul 09.30 WIB dan langsung disambut Presiden Jokowi di ruang kredensial. Presiden mengucapkan selamat kepada Timnas U-16 serta tim pelatih yang telah menjadi juara tersebut.

"Selamat ya, kemarin saya lihat mainnya bagus sekali," kata Presiden Jokowi.

Presiden berpesan agar menjaga performa terbaik yang dimiliki Timnas U-16 dan jangan sampai menurun di jenjang usia berikutnya.

"Harus dijaga performanya, jangan sampai menurun, biasanya ke U-23 menurun, harus konsisten," ucap Pres-



iden.

Presiden pun berjanji akan mencari tempat berlatih untuk timnas U-16. "Nanti kita carikan training camp yang baik," ujar Presiden.

Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, menyatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan bonus setelah berjumpa dengan penggawa Timnas Indonesia U-16 yang nilainya sekitar Rp1 miliar. Selain itu, Jokowi juga berpesan agar pemain Timnas U-16 terus dikawal hingga naik ke kelompok usia bermain yang lebih tinggi.

"(Bonus) kurang lebih (Rp1 miliar). Terima kasih pak Presiden yang sudah memanggil anak-anak di sela-sela kesibukan di upacara 17-an, masih bisa memanggil dan menemui anak-anak ke dalam menanyakan dan memberi-

kan bonus," ujar Iriawan.

Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu juga menjelaskan bahwa PSSI telah memberikan bonus kepada Timnas U-16 senilai Rp1,385 miliar yang berasal dari berbagai pihak.

"Skuad Timnas U-16 hari ini tiba di Jakarta untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan termasuk pemberian bonus dari beberapa pihak. Seperti diketahui PSSI memberikan bonus sebesar Rp1.385.000.000," ungkap Iwan Bule.

Selain dari PSSI dan Presiden, Iqbal dan kolega juga mendapatkan apresiasi dari J99Corp milik pengusaha Gilang Widya Pramana berupa 28 laptop kepada seluruh pemain Garuda Asia.

"Saya pribadi senang dan terharu Tim U-16 bisa memenangkan Piala AFF U-16 tahun ini. Jujur, kami semua warga Indonesia haus akan prestasi, begitu juga mungkin adik-adik. Jadi kami dari JCorp memberikan masing-masing satu buah laptop kepada 28 pemain. Saya ingin ini bisa berguna, bermanfaat dan menjadi pelecut semangat lagi untuk mempersembahkan juara lagi bagi Indonesia," kata Perwakilan dari J99Corp, Ganesya Widya.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-16 juga mendapatkan bonus dari beberapa pihak swasta ketika diundang ke acara televisi pada Rabu (17/8/2022) malam. Timnas Indonesia U-16 mendapatkan total bonus sebesar Rp677,3 juta di acara tersebut.

Sebelumnya, Borneo FC menya-

takan bakal memberikan bonus beasiswa sampai selesai kuliah kepada tujuh pemainnya yang tergabung di Timnas U-16. yakni Yanuar Sanusi, Ridho Al Ikhsan, Andrika Fathir Rachman, Narendra Tegar Islami, Muhammad Kafiatu Rizky, Ridzar Nurviat Subagja, dan Andhika Putra Setiawan.

Chief Operating Officer Borneo FC, Ponaryo Astaman, mengatakan, beasiswa itu diberikan sebagai tambahan motivasi, sekaligus bentuk apresiasi dari klub berjuduk Pesut Etam itu. Menurut dia, sepak bola sekarang memberikan prestasi buat mereka, tetapi pendidikan tetap penting dan tidak boleh dilupakan.

"Karena di usia mereka sekarang

mal Marhali, menilai Timnas Indonesia U-16 punya kualitas begitu baik, bahkan mungkin setara dengan timnas Jerman dan Spanyol.

Kemenangan atas Vietnam disebut Akmal Marhali jadi cermin bahwa di level kelompok umur, Indonesia memiliki begitu banyak pemain bertalenta dan mumpuni.

"Ini adalah gambaran bagaimana pemain muda Indonesia sangat potensial dan bisa bersaing di level tinggi. Tak hanya Vietnam, Indonesia juga bisa bersaing dengan negara-negara di Eropa, seperti Spanyol, Italia, Jerman dan negara-negara sepak bola maju lainnya," ujar Akmal.

Namun, Akmal menegaskan, sinar

kuat. Karena nanti akan ada kerusakan, kesalahan dalam perjalanan perkembangan pemain-pemain muda," ujar Akmal.

"Masalahnya, ketika pemain masih muda, performanya bagus, tetapi saat memasuki permainan profesional, mereka menjadi tumpul. Masalah seperti ini, PSSI harus mencari jalan keluarnya," sambungnya.

Situasi yang disebutkan Akmal Marhali bisa dilihat dalam karir para pemain Timnas Indonesia U-19 yang berhasil menjuarai Piala AFF U-19 2013. Saat itu, tim yang diasuh Indra Sjafri, tampil begitu luar biasa. Namun, ketika memasuki usia dewasa, mayoritas dari mereka justru bertumbangan dan tenggelam begitu saja.

Tercatat, hanya Evan Dimas Darmono yang lumayan konsisten tampil di level tertinggi sepak bola Indonesia pasca membantu Garuda Nusantara menjuarai Piala AFF U-19 2013. Dia tak hanya jadi andalan di klub, tetapi juga Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pengamat sepak bola, Dwi Widijanto, berpendapat, penampilan Timnas U-16 sangat konsisten, bahkan penampilannya cenderung menanjak. Indonesia bermain dengan baik dalam mengontrol bola dan melakukan defensif.

"Kalau dalam segi bakat, paling tidak kalau untuk bersaing di level Asia, apalagi di Asia Tenggara kita bisa," ujar Dwi.

Menurutnya, kaderisasi timnas penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemain pada setiap jenjang. Keikutsertaan timnas dalam berbagai kompetisi yang berkelanjutan turut membantu kematangan strategi dalam bertanding. Mental pemain timnas Indonesia perlu dijaga untuk meningkatkan perkembangan dan kualitas pertandingan.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menyatakan Kemenpora bersama PSSI akan terus memutar otak untuk mencari cara guna melanjutkan serta menjaga keberlangsungan pembinaan Timnas U-16.

"Memang saya sudah bicara dengan Ketua Umum PSSI, Pak Mochamad Iriawan, kita konsentrasi bina mere-



pendidikan itu penting. Itu akan mereka bawa bahkan sampai nanti selesai bermain bola. Usia mereka masih sangat muda, jalan mereka masih panjang," katanya.

Dengan pendidikan yang baik, kata dia, mereka akan berkembang bukan hanya menjadi pesepakbola yang lebih baik, tapi juga manusia yang lebih baik. "Kami harapkan juga mereka tidak berhenti sampai sini prestasinya, semoga mereka kelak bisa konsisten dan bakal menjadi masa depan untuk Borneo FC maupun Timnas Indonesia di level lebih tinggi," ujar mantan pemain Timnas Indonesia itu.

Lanjutkan Pembinaan Pemain Muda

Koordinator Save Our Soccer (SOS) sekaligus pengamat sepak bola, Ak-

terang para pesepak bola Indonesia di kelompok umur ini, belum tentu bisa terus dijaga hingga mereka memasuki level profesional. Menurutnya, situasi "layu sebelum berkembang" begitu sering terjadi di Indonesia, di mana para pemain yang potensial di usia muda, justru gagal mencapai kemampuan terbaiknya saat dewasa.

Menurut Akmal, PSSI selaku federasi sepak bola Indonesia harus mencari solusi agar fenomena negatif tersebut bisa diminimalisasi demi munculnya pemain-pemain berkualitas, tak hanya di level junior, tetapi juga senior.

"Jika momentum ini terus berlanjut, kami akan memiliki tim yang kuat di masa depan. Di sisi lain, ketika Anda tidak tertarik (membenahi), akan sulit untuk memiliki tim Indonesia yang

ka. Karena mereka yang kita harapkan pengisi U-20 nanti, bahkan mungkin ke U-23 sampai ke senior," kata Menpora.

Langkah tersebut dinilai penting, sebab selama ini kerap terjadi putus-nya keberlanjutan prestasi dari timnas usia dini ke level senior. Oleh karena itu, diharapkan dengan pemantauan proses pembinaan yang berkelanjutan dapat membantu menjaga para pemain Timnas U-16 mencapai peak performance dalam usia 23-24 tahun.

"Selama ini, di U-16 mereka bagus, kemudian kita tidak bisa secara serius, sehingga yang sampai ke timnas senior sangat sedikit. Makanya, dengan PSSI sebagai federasi kita akan cari cara supaya mereka terbina terus, saya berharap sampai dia pemain senior. Jadi kalau kira-kira sekarang 16, sampai 8-10 tahun yang akan datang, karena peak performance atlet kan usia 23-24," kata Menpora.

Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, mengisyaratkan bahwa Bima Sakti akan tetap melatih Timnas U-16 setelah membawa skuadnya menjuarai Piala AFF U-16 2022.

"Masih akan dikawal coach Bima. Nanti kami akan mencari lagi pemain timnas U-16 berikutnya," ujar Iriawan.

Menurutnya, Bima Sakti berhasil dalam menjalankan tugasnya. Selain membawa Timnas U-16 juara, dia juga dapat membangun suasana tim yang penuh kekeluargaan.

"Anak-anak sangat dekat sekali. Mereka makan bareng, salat pun demikian. Kemudian, orang tua pun dihadirkan ketika final," tutur Iriawan.

Iriawan mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk menggelar pemusatan latihan Timnas U-16 di luar negeri sebagai persiapan menuju Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

"Kami akan berdiskusi di internal federasi. Kalau di luar negeri jelas nanti lokasinya di negara yang sepak bolanya muat, seperti Spanyol, Portugal, Belanda atau yang lainnya," ujarnya.

Dia menyebut, pilihan TC di luar Indonesia akan masuk dalam peta jalan (roadmap) Timnas U-16. Agar rencana itu berjalan lancar, PSSI berjanji untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Saya menyampaikan itu kepada Menpora dan beliau sangat mendukung. Namun mungkin timnas akan dimatangkan dahulu di dalam negeri," tutur Iriawan.

Selanjutnya Piala Asia U-17

Pelatih Timnas U-16, Bima Sakti, mengatakan, skuadnya langsung

Bima juga berharap klub tidak langsung memaksakan personel Timnas U-16 berlatih keras setelah mengikuti Piala AFF U-16 2022.

"Kami akan berkoordinasi dengan klub karena Elite Pro Academy akan digulirkan. Kami minta pemain jangan dipaksakan dahulu karena masih lelah," harapnya.



Koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali

mengalihkan fokus ke Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 seusai menjuarai Piala AFF U-16 2022.

"Saya menyampaikan kepada pemain kami masih akan berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-17 pada Oktober. Jadi kami harus fokus ke sana," ujar Bima.

Untuk itu, Bima berharap para pemainnya tetap menjaga kondisi diri ketika kembali ke klub masing-masing.

Sebagai pelatih, Bima menyebut akan menyusun program baru sebagai persiapan menuju Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 yang berlangsung pada 1-9 Oktober 2022. Salah satu kegiatan yang akan direncanakan adalah mengadakan pemusatan latihan (TC), baik di dalam maupun luar negeri. Sebab, lawan yang akan dihadapi yakni Uni Emirat Arab, Palestina, Guam dan Malaysia. ●



WISATA KONSERVASI JADI KONTROVERSI

Pemerintah mulai mengedepankan aspek kualitas dan konservasi yang berkelanjutan pada destinasi-destinasi pariwisata di Tanah Air. Sepanjang 2022 ini, sudah dua destinasi wisata yang mulai menerapkan aspek tersebut, yakni di Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo.

Taman Wisata Candi Borobudur menjadi destinasi wisata Indonesia pertama yang meramaikan pentingnya konservasi dan aspek keberlanjutan lainnya. Pemerintah sebelumnya mewacanakan menaikkan tarif naik ke Candi Borobudur Rp750.000 bagi wisatawan lokal. Namun, rencana tersebut batal dilakukan karena mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat.

Meski begitu, pemerintah tetap membatasi pengunjung yang masuk maksimal 1.200 orang per hari. Bukan hanya itu, sebagai pembatasan, pengunjung juga diwajibkan untuk

mendaftar secara daring terlebih dahulu.

Selain wajib mendaftar online terlebih dahulu, pengunjung juga harus didampingi oleh pemandu wisata terdaftar. Tak hanya itu, para pengunjung wajib pula mengenakan alas kaki khusus bernama sandal upanat saat naik ke stupa candi. Dilansir dari laman Kemendikbud Ristek, upanat adalah sandal khusus yang digunakan untuk menaiki struktur Candi Borobudur.

Pemilihan kata "upanat" yang berarti "alas kaki" merupakan aktualisasi dari relief Karmawibhangga panel 150 pada Candi Borobudur. Alas kaki ini

terbuat dari anyaman daun pandan dan dibuat oleh pengrajin di kawasan Borobudur.

Penggunaan sandal upanat sebagai alas kaki bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya keausan batu tangga. Pasalnya, gesekan alas kaki pengunjung dengan batu candi menjadi salah satu faktor pemicu candi bercorak Buddha ini kian mengalami kerusakan.

Yang terbaru adalah pemerintah akan memberlakukan kenaikan tarif masuk kawasan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemprov

NTT berencana menaikkan tarif kunjungan wisatawan dari Rp 200.000 per orang menjadi Rp 3,75 juta per orang per tahun, namun hanya di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Biaya ini ditujukan untuk tiket masuk sekaligus biaya konservasi.

Awalnya, tarif baru itu akan diterapkan mulai 1 Agustus 2022. Namun, rencana itu ditunda dan baru resmi diterapkan mulai 1 Januari 2023.

Rencana penerapan kebijakan tersebut berdasarkan hasil kajian pemerintah bersama lembaga pendidikan tinggi. Dari kajian itu disebutkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke dua pulau tersebut dibatasi maksimal 219.000 orang per tahun. Alasannya, ada perubahan perilaku komodo dan kondisi lingkungan karena jumlah pengunjung yang berlebih.

Kebijakan itu menuai protes dari masyarakat lokal dan pegiat wisata. Mereka menyayangkan kenaikan tarif yang sangat tinggi itu karena dapat mengancam penghidupan mereka dari sektor pariwisata. Jika tarif dinaikkan, jumlah kunjungan wisatawan dikhawatirkan akan menurun. Hal itu kemudian akan berdampak pada berkurangnya pendapatan mereka.

Menurut Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTT, Agus Bataona, selama dua hingga tiga bulan ke depan, sekitar 10.000 wisatawan membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo. Hal ini semakin membuat khawatir masyarakat dan pengusaha wisata apabila penerapan kebijakan itu direalisasikan dalam jangka panjang.

Aksi protes kemudian dilakukan sebagai bentuk penolakan kebijakan kenaikan tarif tersebut. Selain itu, para pegiat wisata menghentikan segala aktivitas dan layanan pariwisata sebagai wujud protes. Dalam aksi protes dan aksi mogok itu, terjadi kericuhan antara massa dan petugas keamanan.

Jumat (29/7/2022) siang, warga Pulau Komodo, mendatangi kantor jaga Balai Taman Nasional Komodo dan mengancam akan menyegel pulau jika pemerintah tetap menaikkan tarif masuk Pulau Komodo menjadi Rp 3,75 juta. Selain di Pulau Komodo, ratusan pelaku pariwisata dan warga

di Labuan Bajo juga berunjuk rasa di depan lokasi peluncuran aplikasi masuk ke Pulau Komodo. Mereka menolak keputusan pemerintah menaikkan harga tiket masuk Pulau Komodo dengan tidur di jalan raya.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, kenaikan tarif masuk ini bertujuan agar konservasi di TN Komodo dapat dikelola dengan lebih maksimal. Sebab, pengelolaan taman nasional dan upaya konservasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Terlebih, Komodo merupakan

gara Timur," ucapnya.

Selain itu, Viktor mengatakan, penetapan kenaikan tarif masuk di TN Komodo juga bertujuan untuk pelayanan pariwisata jangka panjang dan berkelanjutan. Pihaknya berupaya untuk menjaga ekosistem darat dan laut demi kelangsungan hidup komodo yang ada di kawasan tersebut.

"Kami sangat menjaga ekosistem darat dan laut dari dua pulau itu. Misalnya, dengan mencegah adanya upaya pemboman ikan yang juga merusak alam lautnya, pencegahan



satwa endemik yang hanya bisa ditemukan di kawasan NTT.

"Maka tarif tersebut akan digunakan dengan baik untuk konservasi dan juga kita batasi pengunjungnya agar alam dan ekosistemnya tetap terjaga. Karena dengan konservasi TNK yang baik, maka akan semakin menjadi kebanggaan kita semua. Apalagi Komodo ini adalah satu-satunya yang ada di dunia dan hanya ada di Nusa Teng-

pencurian satwa seperti rusa yang adalah makanan komodo. Ini semua sangat berkaitan erat demi kelangsungan hidup ekosistem di sana dan juga demi kelangsungan hidup komodo," ucap Viktor.

Viktor menambahkan, masyarakat yang hendak melihat komodo juga bisa berkunjung ke Pulau Rinca. Terdapat 1.300 komodo di Pulau Rinca dengan tarif normal bagi pengunjung.

• INFO WISATA

Viktor menyebut, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi terkait hal ini agar perekonomian masyarakat bertumbuh bersama aspek pariwisata lainnya di Labuan Bajo. Ia juga mengatakan, akan mengambil langkah tegas bagi pihak-pihak yang melakukan intimidasi kepada para wisatawan TN Komodo.

“Untuk kelompok atau pihak-pihak yang tidak setuju dan bahkan melakukan intimidasi, ancaman dan rasa takut kepada para wisatawan, maka kami Pemerintah Provinsi NTT dan Forkopimda akan mengambil langkah tegas untuk hal tersebut. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengambil langkah tegas terkait itu,”



ucapnya.

Utamakan Konservasi

Meski menuai kontroversi, namun kebijakan pembatasan pengunjung serta rencana kenaikan tarif di Candi Borobudur dan TN Komodo ini membuat banyak orang menyadari akan perlunya konservasi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyebut, kebijakan tersebut dilakukan demi mengedepankan upaya konservasi agar tercipta destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pada pertemuan mingguan bersama media, Senin, 15 Agustus 2022, Sandi menyampaikan bahwa pemerintah memang tengah berfokus pada

quality and sustainability. Ia menerangkan bahwa semua destinasi wisata perlu mempunyai aspek-aspek ini.

“Nah, kami memang mengedepankan pariwisata berbasis kualitas dan berkelanjutan atau quality and sustainability. Berarti semua destinasi wisata harus memiliki aspek quality and sustainability,” kata Sandi.

Dia menegaskan, ke depan, pemerintah akan terus mengembangkan destinasi-destinasi wisata Indonesia dengan dilandasi oleh kedua aspek tersebut sebagai aspek pengembangan utama. “Jadi aspek konservasinya, kita bicara Raja Ampat, Candi Muaro Jambi, juga kita kembangkan nanti destinasi-destinasi lainnya. Semua akan mengacu kepada quality and

sustainability,” imbuh Sandi.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan bahwa pengembangan kedua aspek ini tidak sama dengan menaikkan tarif. Justru dengan berfokus pada kedua aspek tersebut, diharapkan destinasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan.

“Jadi harapannya tentunya bukan berarti semuanya akan dinaikkan tarifnya, tapi justru harus ada kajian pembatasan seperti apa dan bagaimana kita juga bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada para wisatawan,” ujarnya.

Sandi pun mengajak destinasi-destinasi wisata di Indonesia untuk mengedepankan aspek kualitas dan

keberlanjutan agar dapat tetap lestari dan bisa terus membantu perekonomian.

“Jadi ini juga open call kepada seluruh pengelola destinasi wisata untuk melihat aspek kualitas dan keberlanjutannya, dan bagaimana kita bisa mengembangkan ke depannya sehingga upaya konservasi dan peningkatan ekonomi ini bisa berjalan beriringan,” ujar Sandi.

Apa yang disampaikan Sandi juga diamine oleh Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup pertama RI yang menjabat pada 1978-1993 dan menjadi saksi penetapan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu taman nasional pertama di Indonesia.

Menurutnya, daya tarik TN Komodo adalah satwa komodo itu sendiri. Komodo sebagai makhluk hidup harus dipertahankan dan destinasi itu berbeda dari destinasi lain, misalnya Bali yang lebih menonjolkan budaya atau tempat.

“Wisata komodo adalah wisata dengan living creature (makhluk hidup) yang unik, yang merupakan binatang yang historis. Demikian halnya, maka komodo sebagai makhluk hidup harus kita pertahankan,” ujarnya dalam keterangan tertulis 21 Juli 2022.

Strategi pariwisata di daerah habitat komodo idealnya tak mengedepankan kuantitas pengunjung, melainkan pada kualitas tamu. Sebab, jika ekosistem komodo terganggu, kehidupan satwa purba itu juga ikut terganggu. Manusia tidak bisa sembarangan mengakses habitat komodo, termasuk membuang sampah sembarangan dan penggunaan lahan.

“Tidak ada yang peduli pada dampak dari penggunaan lahan, perubahan iklim, suhu, serta alam. Tidak ada yang peduli. Yang penting wisatawan dapat hotel, dapat berwisata, dan dapat naik kapal. Apakah ada yang peduli dengan komodo? Tidak ada. Yang penting uang, uang, dan uang,” tegasnya.

Untuk itu, kata Emil, harga masuk perlu dinaikkan sebagai kompensasi untuk mengembalikan apa yang hilang dari ekosistem komodo dan makhluk hidup lain di kawasan, demi menciptakan pariwisata yang bertanggung jawab dan mengedepankan

praktik konservasi.

Selain itu, kajian juga menunjukkan perlunya pembatasan pengunjung. Dari hasil kajian, diperoleh bahwa kapasitas ideal TN Komodo dalam menampung wisatawan adalah sebanyak 219.000 dan maksimal sebanyak 292.000 kunjungan per tahun.

Jumlah itu jika dilihat berdasarkan sejumlah faktor, termasuk panjang jalur terpendek trekking, lama berjalan rata-rata wisatawan, lama berkunjung wisatawan, hingga tingkat kenyamanan berwisata, serta mempertimbangkan nilai jasa ekosistem di dalamnya.

Nilai jasa ekosistem yang dinilai hilang mulai dari jasa ekosistem sumberdaya genetik, jasa ekosistem biodiversitas, jasa ekosistem penyediaan air bersih, pengaturan iklim, produksi oksigen, jasa ekosistem ruang hidup, jasa ekosistem ecotourism, hingga jasa ekosistem estet.

Berdasarkan data pertumbuhan wisatawan dan ekonomi tim Kajian Daya Dukung Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem, pertumbuhan wisatawan di TN Komodo tercatat mengalami kenaikan 1,33 kali pada rentang 2013-2016, menjadi 2,05 kali selama rentang waktu 2016-2019. Hal ini disebut malah berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat yang mengalami penurunan dari 1,7 kali selama 2013-2016, menjadi 1,5 kali selama 2016-2019.

Mengacu pada data tersebut, tim kajian menilai perlu ada program konservasi dan penerapan pariwisata berkelanjutan guna menunjang kelestarian ekosistem TN Komodo. Apalagi sejak September 2021, status komodo sebagai satwa liar daftar merah International Union for Conservation (IUCN) atau berstatus terancam punah.

"Maka jangan jumlah pengunjung menjadi kriteria, yang menjadi obyek wisata adalah makhluk hidup, bukan barang mati. Apabila ekosistemnya terganggu, bisa mengganggu ekuilibrium kehidupan komodo, yang mana kita tidak punya ahlinya," kata Emil.

Banyak Wisata Alternatif

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupaya mengoptimalkan daya tarik wisata lain di luar kawasan

Taman Nasional Komodo untuk menarik semakin banyak wisatawan nusantara dan mancanegara berkunjung ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

"Pekerjaan rumah Kemenparekraf sekarang ialah promosi dan memunculkan destinasi atau spot baru, sehingga lebih banyak alternatif dan aktivitas yang bisa dilakukan di Labuan Bajo, tidak hanya di TNK," kata Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina, di Labuan Bajo, Jumat (12/8/2022).

Untuk mengoptimalkan promosi daya tarik wisata dalam kawasan Flores, Alor, Lembata, dan Bima (Floratama), BPOLBF membuat paket

ke desa-desa wisata yang ada dalam kawasan Floratama.

Shana menjelaskan Labuan Bajo telah didesain sebagai pintu gerbang pariwisata NTT. Sehingga dari Labuan Bajo wisatawan bisa mengakses seluruh destinasi di NTT, baik melalui darat, laut, dan udara. Sehingga, berbagai cara ditempuh untuk menggenjot kunjungan wisatawan baik nusantara dan mancanegara ke Labuan Bajo.

"Sehingga kita tidak terjebak bahwa ke TNK adalah satu satunya tempat berwisata ke Labuan Bajo," sambungnya.

Selain beberapa cara tersebut, salah satu bentuk dukungan Kemenparekraf dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo di luar TN Komodo ialah



perjalanan keluarga (family trip) ke travel agent/travel operator (TA/TO) untuk mengenal produk wisata baru, seperti wisata tematik tenun, wisata konservasi, dan wisata religi.

Dengan basis data yang telah ada di kawasan Floratama, BPOLBF mengoptimalkan pengenalan daya tarik wisata dengan memberikan pengetahuan alur ke lokasi wisata, waktu yang terbaik untuk berkunjung, pilihan wisata yang ada, dan pola perjalanan wisata.

Selain pengenalan daya tarik wisata, TA/TO juga diajak terlibat dalam berbagai pelatihan untuk menghubungkan mereka dengan desa wisata. Dengan demikian, para wisatawan bisa didatangkan langsung

keterlibatan dalam Festival Golo Koe yang digagas oleh Keuskupan Ruteng.

Shana mengatakan Festival Golo Koe yang akan berlangsung sejak tanggal 8-15 Agustus 2022 itu merupakan bentuk respons gereja terhadap pariwisata Labuan Bajo. Festival itu akan dimeriahkan dengan berbagai aktivitas budaya, religi, UMKM, pentas musik, parade, doa bersama, yang tentunya diikuti semua paroki di Keuskupan Ruteng.

"Ini menunjukkan Labuan Bajo punya kebudayaan yang luar biasa, menjadi vatican Indonesia, dan saya pikir pariwisata itu tidak hanya untuk sekelompok orang saja tapi menjadi jiwa dari seluruh masyarakat di Manggarai Barat," katanya. ●



LAGU JOKO TINGKIR NGOMBE DAWET GANTI LIRIK

Pada perayaan Hari Kemerdekaan Ke-77 RI, 17 Agustus 2022, selain lagu Ojo Dibandingke yang sempat viral, lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet juga sempat naik pamornya karena mendapat request langsung dari Presiden Joko Widodo.



Namun, belakangan lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet ramai diperbincangkan warganet. Lagu ini dianggap bermasalah karena punya lirik yang dinilai menghina ulama. Atas polemik itu, pencipta lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet, Pratama, kini sudah minta maaf.

Lagu yang beredar luas di media sosial itu mencuri perhatian karena

lirik lagunya. Kemunculan Pratama pun sudah dinantikan oleh banyak orang, khususnya para ulama di Lamongan.

Pratama meminta maaf lewat sebuah video YouTube. Dia menunjukkan permohonan maafnya kepada masyarakat Lamongan dan semua orang yang merasa tersinggung dengan lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet yang dia tulis.

"Di kesempatan kali ini, izinkan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Lamongan dan pihak-pihak yang tersinggung atau kurang berkenan, karena saya telah membuat lirik menggunakan nama Joko Tingkir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Pratama.



Pratama mengaku bahwa dirinya tidak banyak tahu soal sosok dan nama Joko Tingkir. Oleh karena itu, dia pun menggunakan nama itu di dalam lirik lagu yang punya makna nyeleneh. Hal ini juga disebutkan dalam permohonan maafnya.

Ditegaskan Pratama, dia tidak per-



nah berniat untuk melecehkan atau menghina ulama. Dia menggunakan nama Joko Tingkir tanpa tahu asal-usul dari sosok tersebut.

"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan, ketidaktahuan saya, ketidakpahaman saya di balik nama Joko Tingkir ini adalah sosok ulama besar dan dihormati di Jawa. Saya mohon maaf. Tidak ada niatan saya melecehkan nama beliau. Saya akui karena saya tidak tahu dan kurang paham di balik sosok nama besar beliau. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," lanjut dia.

Karena kontroversi ini, Pratama memutuskan untuk mengganti lirik lagunya dan tidak lagi menggunakan nama Joko Tingkir. Dia pun berharap agar permohonan maafnya bisa diterima oleh masyarakat.

Joko Tingkir Ngombe Dawet juga viral dan populer setelah dibawakan oleh Farel Prayoga. Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat meminta Farel membawakan lagu tersebut di perayaan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka.

Joko Tingkir merupakan sosok ulama besar dan menjadi guru para ulama di Nusantara. Menurut Narto Widodo, seorang seniman asal Lamongan, banyak yang merasa gusar karena nama Joko Tingkir ada di lirik lagu itu. Karena dalam liriknya mengisyaratkan sosok Joko Tingkir direndahkan. Hal ini yang kemudian mengusik banyak orang.

"Yang dipersoalkan para kiai itu adalah penggunaan kata Joko Tingkir dalam syair atau lirik lagu tersebut," kata pria yang akrab disapa Cak Narto.

Masyarakat juga diimbau tak menyanyikan lagu tersebut. Cak Narto juga menganjurkan sang pencipta lagu untuk mengubah liriknya dengan menghilangkan nama Joko Tingkir. ●



OJO DIBANDINGKE DIKUKUHKAN KE KEMENKUMHAM

Hak cipta atas lagu Ojo Dibandingke ciptaan Agus Purwanto atau dikenal sebagai Abah Lala resmi dikukuhkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengukuhan hak cipta itu diberikan langsung oleh Menkumham, Yasonna Laoly.

"Abah Lala ini perannya sangat sentral. Kalau tidak diciptakan sama Abah Lala ini, Farel tidak bisa menyanyikan Ojo Dibandingke. Nah, ini sekarang Abah Lala terima kasih, ini hak pencipta pencatatan berlaku selama hidup pencipta terus berlangsung, selama 70 tahun setelah pencipta pergi, meninggal dunia. Jadi selama-lamanya, terima kasih," ujar Yasonna di Golden Ball Room The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Yasonna mengatakan adanya hak cipta itu membuat setiap orang yang mau memakai lagu Ojo Dibandingke harus membayar royalti kepada Abah Lala. Royalti itu nantinya akan diurus oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Kemenkumham.

"Ini hak pencipta, biasanya yang taken hak cipta itu cukup Dirjen, Direktorat Hak Cipta, ini menteri yang teken langsung," ujarnya

"Apalagi ini lagu viral supaya dia dapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya, kalau suatu saat ada yang mau pakai lagu itu royalti kepada pencipta ada. Nanti LMKN yang urus itu ya, LMKN kita yang urus itu," tambahnya.

Selain itu, dia mengatakan penampilan Farel Prayoga di Istana dalam HUT ke-77 RI juga sudah didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual. Dia menyebut Farel berhak menerima royalti saat ada yang memakai penampilannya tersebut.

"Jadi ini sudah Hak Kekayaan untuk performance di Istana Negara ini, temen-temen kalau sudah mau ambil pakai penampilan itu bayar, dia punya hak Kekayaan Intelektual ada royaltinya nanti masuk LMKN ya. Jadi nanti ada royalti, jadi jangan sembarangan kutip di YouTube sudah kita kasih haknya," tuturnya.

Yasonna mengatakan dinobatkannya Farel sebagai Duta Kekayaan Intelektual kategori pelajar berprestasi diharapkan mampu menginspirasi anak-anak yang lain. Dia berharap putra-putri bangsa lainnya dapat berani menunjukkan bakat yang dimiliki tanpa rasa malu, seperti Farel.

"Berarti kita mengajak anak-anak kita bisa bermimpi, bahwa kalau dia punya potensi, dia punya talenta dia dapat maju. Nah itu pertama," ujar Yasonna.

"Supaya anak ini, Farel bisa menginspirasi anak-anak yang punya kemampuan, bakat, punya kemampuan menyanyi. Sehingga mereka nanti terdorong untuk tampil, punya kepercayaan diri untuk tampil. Farel juga bisa, saya juga bisa. Dan Farel kita ajak untuk menjadi duta kita untuk itu," lanjutnya.

Yasonna juga mendorong masyarakat segera mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang dimiliki. Dia menyebut banyak manfaat yang bisa diperoleh atas pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

"Jadi, ini yang kami dorong ya supaya kita sadar untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual kita, karena kekayaan Intelektual itu banyak. Ya perorangan ada merek, ada paten, ada hak cipta, bisa geografis, ada yang komunal, dikasih geografis terkait ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, itu banyak, itu perlu didaftarkan, dan manfaat ekonominya akan ada," terangnya. ●



MELIHAT GAMBARAN TAHUN DEPAN

Sektor swasta lebih menjadi andalan menumbuhkan perekonomian. Pemerintah lebih ke mitigasi risiko dan gejala.

“Investasi harus dipacu serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global, harus ditingkatkan. Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, maka manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing, dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejala di masa depan.” (Presiden Joko Widodo dalam Pidato Pengantar RUU APBN 2023 beserta Nota Keuangannya).

Sangat jelas dari ungkapan Presiden dalam pidato itu bahwa yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi adalah sektor swasta. Dari mana sim-

pulan sektor swasta tampak semakin kuat menjadi motor pertumbuhan? Tentu saja dari penerimaan pajak yang proyeksinya akan mencapai Rp1.924,9 triliun dibandingkan dengan Rp1,784 triliun target semula dalam APBN 2022.

Toh dengan kenaikan penerimaan perpajakan itu, pemerintah mengambil kebijakan fiskal (anggaran negara) yang lebih ke arah mitigasi risiko dan gejala di masa depan. Risiko dan gejala masa depan lebih condong ke pertimbangan politik ketimbang ekonomi.

Mudah memahami konteksnya. Masa depan yang dekat pada 2023 memang ranah politik menuju agenda puncak berupa Pemilihan Umum Legislatif (DPRD kota dan kabupaten serta

provinsi), serta DPR dan DPD, serangkaian dengan pemilihan kepala daerahnya, juga tentu saja Pemilihan Presiden. Rangkaian agenda politik yang semuanya berlangsung pada 2024.

Terlebih lagi, dalam kaitan dengan pidato itu, Menteri Keuangan, bendahara negara, Sri Mulyani Indrawati mengemukakan alokasi anggaran Pemilu yang akan cair pada 2023. “Untuk 2023 mengikuti siklus pemilu dan tahapan, kami estimasi kebutuhan mencapai Rp14 triliun untuk KPU dan Bawaslu Rp5 triliun,” ujarnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa, 16 Agustus 2023.

Bu Menkeu juga mengisyaratkan pada 2024 alokasi anggaran untuk

Pemilu akan lebih besar. "Anggaran pemilu paling besar adalah pada 2024, saat pelaksanaan pemilu itu terjadi. Jadi ini masih dalam proses tahapan persiapan pemilunya," kata Menkeu Ani.

Namun, mitigasi risiko dan gejala di masa depan yang dikemukakan oleh Presiden dalam pidato tahunan itu bukan hanya terkait persiapan Pemilu 2024 tentu saja. Penyusunan RAPBN 2023 ternyata juga menargetkan penurunan defisit anggaran dari APBN 2022 4,85 persen dan direvisi melalui Perpres 98 Tahun 2022 menjadi 4,5 persen. Sedangkan RAPBN 2023 menargetkan defisit anggaran menjadi 2,85 persen.

Sebagai implikasinya, postur RAPBN 2023 menunjukkan penurunan pada pos tertentu anggaran belanja atau pengeluaran pemerintah pusat dibandingkan dengan APBN 2022. Jika pada APBN 2022 belanja pemerintah pusat dianggarkan Rp1,994,5 dan membengkak menjadi Rp2.301,6 triliun pada Perpres 98 Tahun 2022, maka pada RAPBN 2023 angkanya tercatat Rp2.230 triliun. Turun lebih dari Rp70 triliun.

Meski begitu, RAPBN 2023 tetap menunjukkan kenaikan anggaran belanja untuk Kementerian dan Lembaga (K/L). Begitu juga nilai transfer ke daerah.

Jika pada APBN 2022 Belanja K/L berada di angka Rp945,8 triliun, pada RAPBN 2023 nilainya naik menjadi Rp993,2 triliun. Sedangkan transfer ke daerah pada APBN 2022 yang realisasinya diproyeksikan Rp799,1 triliun meskipun dianggarkan hingga Rp804,8 triliun, pada RAPBN 2023 angkanya tetap naik menjadi Rp811,7 triliun.

Mengenai transfer ke daerah, layak dicatat pos Dana Desa yang pada APBN 2022 berada di angka Rp67,9 triliun mengalami kenaikan pada RAPBN 2023 menjadi Rp70 triliun. Kenaikan juga dianggarkan pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara DAK fisik turun, pos DAK non-fisik naik sekaligus menunjukkan perhatian lebih kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Sayangnya, dana bagi hasil (DBH) pada RAPBN 2023 menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan dengan angka pada APBN 2022. Proyeksi DBH pada APBN 2022 berada pada angka Rp142,1 triliun, dan pada RAPBN 2023 angkanya menurun menjadi Rp136,3 triliun saja. Boleh jadi kecenderungan penurunan ini akan mendorong pemerintah daerah menghitung ulang potensi bagi hasilnya

egaskan subsidi itu akan cenderung berkurang.

Namun, bukan pos subsidi saja yang membuat proyeksi belanja Non-K/L menurun dalam RAPBN 2023. Dalam penjelasannya, pemerintah melihat memasuki 2022, konsumsi Pemerintah diperkirakan mengalami kontraksi, utamanya disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan realisasi belanja negara untuk penanganan Covid-19. Hal



lebih serius lagi.

Tapi, di mana pos penurunan belanja pemerintah pusat itu berada? Ternyata penurunan terutama pada pengeluaran belanja Non-Kementerian/Lembaga.

Belanja Non-K/L terdiri dari pembayaran bunga utang, belanja subsidi (energi dan non-energi), belanja bantuan sosial, belanja hibah dan belanja lain-lain. Sebagaimana sudah dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo, belanja subsidi energi pada tahun ini sudah memberatkan anggaran, maka gambaran tahun depan yang tercermin pada RAPBN 2023 men-

ini sejalan dengan melandainya risiko Covid-19 sehingga belanja untuk penanganan Covid-19 (antara lain penanganan pasien, serta pengadaan alkes dan vaksin) mengalami penurunan.

Secara nominal, penyelenggara negara melihat konsumsi pemerintah per 2022 diperkirakan berkontraksi dibandingkan dengan konsumsi Pemerintah pada 2021. Dengan alokasi belanja negara yang lebih berkualitas, konsumsi pemerintah pada 2023 diperkirakan kembali tumbuh positif dan diharapkan memicu dampak berganda (multiplier effect) yang lebih tinggi terhadap perekonomian. ●

REALISTIS DAN MITIGATIF

Layaknya gambar, ada yang realistis. Toh ada pula yang imajinatif. Bagaimana gambaran RAPBN 2023 mengenai perekonomian Indonesia pada tahun itu?

Layak belaka menyimak pandangan Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) MH Said Abdullah. Menurut dia, bukan saja realistis, RAPBN 2023 jauh dari gambaran imajinatif. Said menyebutnya Realistis dan Mitigatif.

Harap maklum, karena Banggar DPR di sisi legislatif sudah mengkaji bersama penyusunan RAPBN 2023 dengan jajaran eksekutif pemerintahan sebelum Presiden Jokowi menyampaikannya pada Selasa, 16 Agustus 2022. Lebih dari itu, Banggar DPR adalah para wakil rakyat yang juga berfungsi mengawasi jajaran eksekutif.

Said mengungkapkan, Banggar DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia telah melakukan

serangkaian pembahasan terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023.

Kesepakatan Banggar DPR dengan Pemerintah tentang KEM PPKF Tahun 2023 yang diputuskan pada Juni 2022 lalu telah menjadi dasar pemerintah menyusun NK RAPBN 2023. Keseluruhan landasan pikir, arah kebijakan, atribusi dan distribusi anggaran yang ditugaskan pemerintah ke Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagai cerminan dari kesepakatan KEM PPKF antara Banggar DPR dengan pemerintah.

"Banggar DPR memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah dalam melihat tantangan yang kemungkinan kita hadapi pada tahun depan," ujar Said Abdullah kepada wartawan, Kamis, 18 Agustus 2022.



Pandangan Banggar DPR tersebut, sambungannya, antara lain, pertama, inflasi tinggi di sejumlah kawasan, bahkan negara negara maju (Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Turki, dll) menahan tingkat konsumsi global. Tertahannya tingkat konsumsi global berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia. Per April 2022 lalu, IMF telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen. Sedangkan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada kisaran 3,2 persen.

Resiko terbesar atas melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia adalah pukulan langsung terhadap perdagangan internasional Indonesia. Menurunnya ekspor dan impor sangat mempengaruhi sisi permintaan (demand) ekonomi. Risiko serupa potensial kita hadapi pada pasar keuangan dalam negeri. Tanda tanda capital outflow terus berlangsung, khususnya pada

negara negara emerging market. Hingga Agustus 2022 ini modal keluar telah mencapai Rp126 triliun year to date, yang berarti sepanjang Januari hingga Agustus 2022.

Kedua, respon kebijakan sejumlah negara maju menahan laju inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan secara serial membuat tekanan pada sektor moneter. The Fed Rate setidaknya telah menaikkan suku bunga acuan hingga 225 basis point sejak awal tahun ini. Dua pukulan sekaligus kita terima, pertama tren kenaikan Yield SBN 10 tahun terus merambat naik sejak awal tahun dan memuncak pada Juli lalu yang mencapai 7,30 persen. Kedua kecenderungan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar juga naik.

Efek terhadap kedua pukulan pada sektor keuangan ini berkonsekuensi kita harus menanggung biaya dana (cost of fund) yang naik. Kendati rasio utang pemerintah perlu Juli 2022 menunjukkan penurunan ke level

37,91 persen PDB. Tetap saja kecenderungan kita menghadapi kewajiban imbal hasil SBN yang cenderung naik. Permintaan terhadap USD sebagai kewajiban pembayaran utang dan perdagangan, termasuk di pasar keuangan mengakibatkan penyediaan dana untuk USD akan lebih mahal.

Ketiga, situasi ekonomi dunia yang tidak menentu telah meningkatkan banyak negara terjerumus dalam hutang tidak sehat. IMF memprediksi lebih dari 60 negara akan rontok ekonominya, dan gagal bayar utang. Situasinya kurang lebih sama dengan apa yang dihadapi oleh Sri Lanka saat ini. Revolving Risk naik tajam. Ibarat rumus politik, kehancuran ekonomi bisa berujung pada krisis politik dan keamanan. Oleh sebab itu kita harus waspada pada situasi ini pada tahun politik mendatang.

Selanjutnya keempat, perang Ukraina dan Rusia tampaknya belum menunjukkan tanda tanda akan berakhir.



• INFO KHUSUS

Karena perang inilah harga komoditas dunia, termasuk energi melambung tinggi. Embargo yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap produk produk Rusia yang menjadi rantai pasok global terhenti dengan serta merta. Tidak banyak negara memiliki produk substitusinya dengan cepat. Supply and demand berjalan pincang, kenaikan harga tidak terhindarkan.

Saat situasi ekonomi dunia masih terhuyung, Amerika Serikat berulah di Selat Taiwan. Kunjungan Nancy Pelosi Ketua DPR Amerika Serikat dalam sekejap mengubah Selat Taiwan menjadi perlombaan arsenal militer yang

adaan dan disiplin prokes harus tetap kita biasakan di semua tempat," kata Said.

Ancaman cacar monyet juga harus kita antisipasi pada setiap kedatangan internasional. Kewaspadaan tinggi terus ditingkatkan oleh segenap pihak agar cacar monyet tidak menjadi faktor baru yang melibas ekonomi kita seperti saat kita kebobolan menghadapi Covid-19.

"Menghadapi medan pekerjaan kita ke depan yang tidak mudah, kita tetap optimistik dan berpegangan semua persoalan bisa diselesaikan dengan ikhtiar yang tepat, serta munajat kepada Allah SWT dengan tulus," ungkap

2023. Maka Desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis," ujar Said.

Said menyebut, setidaknya beberapa program strategis, antara lain, pertama, pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat. Kita memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target pada tahun depan. Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu. Dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70 persen pendapatan negara, kita memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan. Integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan Undang Undang HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan obyek pajak, sekaligus kepatuhan wajib pajak.

Kedua, optimalisasi PNPB melalui berbagai program hilirisasi yang terus ditingkatkan oleh pemerintah, serta pemanfaatan Barang Milik Negara melalui tata kelola yang baik akan berkontribusi penerimaan yang lebih baik.

Ketiga, pengelolaan berbagai belanja strategis. Belanja strategis, lanjut Said, antara lain terkait subsidi pangan, "Program subsidi pangan harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga terjangkau. Oleh sebab itu program pencadangan pangan nasional menjadi kebutuhan wajib. Dashboard pangan nasional harus termonitor secara langsung di Kantor Presiden secara realtime. Memastikan kecukupan konsumsi domestik sebelum membagi surplus bahan pangan untuk ekspor. Sebaliknya, kebijakan impor bahan pangan harus mencakup komitmen keberlanjutan pasokan, harga yang ekonomis, serta tata kelola impor bahan pangan yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Belanja strategis lainnya, menyangkut subsidi energi. Said melihat perlunya reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas bumi dunia. Ia pun mengemukakan strategi yang bisa ditempuh untuk melakukan reformasi subsidi energi.

"Pertama mengubah subsidi yang



melibatkan Tiongkok di satu pihak, Taiwan, Amerika Serikat, Jepang dan Korea di pihak lainnya. Bila kawasan ini mengalami eskalasi, dampak pukulannya akan lebih terasa pada ekonomi Indonesia, mengingat semua negara tersebut berkontribusi 47 persen dari total perdagangan internasional kita pada 2021. "Kita harus mewaspadaai kemungkinan eskalasi di kawasan ini," ungkapnya.

Kelima, pandemi Covid-19 dan cacar monyet (monkey pox) harus kita waspada sebagai bahaya laten. "Meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia masih terkendali, sejalan dengan meningkatnya penduduk tervaksin Covid-19 pada dosis 2 dan booster, bukan berarti kita bebas dari meningkatnya penduduk terinfeksi covid-19. Kewasp-

Said Abdullah. Ia menegaskan, Banggar DPR percaya pemerintah menyiapkan segala mitigasi resiko berbagai tantangan ke depan, dan dituangkan dengan cukup komprehensif pada NK RAPBN 2023.

Setidaknya ada dua isu besar dalam desain RAPBN 2023. Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju SDM unggul, reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri. Kedua, respon kebijakan atas berbagai tantangan tahun depan.

"Berdasar kedua isu strategis tersebut, Badan Anggaran DPR akan menjadikannya agenda untuk menjadi pokok pembahasan RAPBN

semula berbasis komoditas menjadi berfokus pada kelompok penerima. Kedua, secara perlahan menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi serta tarif listrik bersubsidi secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli keluarga miskin,” ungkapnya.

Selanjutnya, belanja strategis juga menyangkut program perlindungan sosial. Menurut Said, keluarga miskin perlu memiliki daya tahan sosial dan ekonomi menghadapi potensi kenaikan inflasi. Karena itu, perlindungan sosial harus menjangkau seluruh kelompok penduduk rentan ini.

rutin, serta memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sebagai sumber korupsi,” ungkap Said.

Jika belanja-belanja strategis itu sudah terpenuhi, kata dia, pelaksanaan pemilu 2024 pun perlu efisien untuk mencegah pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal. “Demokrasi yang berbiaya mahal akan mendorong praktik korupsi oleh penyelenggara negara,” ujarnya.

Menurut Said, masih ada dua program strategis yang memerlukan perhatian, yaitu disiplin mengelola defisit

Sedangkan bauran kebijakan, Said melihat perlunya kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter yang saling menopang dalam upaya pengendalian inflasi, dan nilai tukar, serta penerapan berbagai macam insentif dan disinsentif pada sektor riil. “Keseimbangan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter kolaboratif dalam merespon gejolak eksternal,” ujarnya.

Toh ada pula yang melihat RAPBN 2023 ini kurang realistis. Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, misalnya, menyebut beberapa asumsi



Dengan begitu, sambungnya, program strategis nasional seperti; IKN, infrastruktur, konversi energi menuju energi baru dan terbarukan, pengembangan food estate dan reforma agraria, dapat berjalan beriringan dengan belanja strategis sebelumnya.

Tambahan pula, sambungnya, hampir sepertiga belanja negara dikirim ke daerah dan desa. “Reformasi struktural terhadap belanja daerah harus dikerjakan. Pemerintah telah memiliki dukungan UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah sebagai jalan melakukan langkah itu. Mendorong inisiatif daerah dalam meningkatkan fiskal daerah, serta memperbaiki belanja daerah yang heavynya masih untuk belanja

APBN dan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang bersambung dengan sektor riil.

Untuk disiplin mengawal defisit di kisaran 2,61-2,85 persen produk domestik bruto (PDB) adalah dengan menjaga tingkat utang pada 2023 pada kisaran 40,58 persen PDB. “Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang, apalagi tren tingkat bunga utang yang semakin tinggi, Banggar DPR mengharapkan pemerintah melakukan optimalisasi serapan SAL tahun sebelumnya, mendorong kontribusi dividen BUMN lebih besar, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang lebih kreatif,” tandasnya.

RAPBN 2023 terkesan tidak realistis.

“Melihat target defisit 2,88 persen dari PDB, maka target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2023 menjadi kurang realistis,” ujar Piter, Kamis, 18 Agustus 2022. Menurut dia, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen perlu stimulus yang cukup dan itu sulit jika defisit ditekan di bawah tiga persen.

Di sisi lain, target inflasi 3,3 persen juga dirasa Piter kurang realistis. Peralnya, tekanan inflasi global dan harga energi yang tinggi masih akan terjadi di tahun 2023. “Dengan anggaran subsidi yang demikian rendah sekitar Rp 200 triliun, saya tidak yakin target inflasi bisa dicapai,” tandasnya. •



MEREDAM INFLASI DENGAN SIMULASI

RAPBN 2023 menargetkan inflasi pada tahun itu lebih rendah dari 2022, padahal ketidakpastian global tinggi. Bagaimana memahaminya?

Secara sederhana, ketidakpastian global yang tinggi mendapat tanggapan dengan mengupayakan kondisi domestik lebih pasti untuk menekan inflasi. Malah untuk memastikannya pemerintah membuat simulasi dengan apa yang disebut stress test (uji ketegangan) untuk mengantisipasi laju inflasi tahun depan.

Sebagai landasan tentu saja angka inflasi tahun ini yang menurut perkiraan (outlook) berkisar 4,0-4,8 sepanjang tahun. Sedangkan proyeksi dalam RAPBN 2023 adalah 3,3 persen dalam setahun.

Nah, sekitar sepekan sebelum penyampaian Nota Keuangan RAPBN

2023 di hadapan anggota DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintanya untuk melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 dengan skenario apabila kondisi ekonomi global tak kunjung membaik.

"Untuk tahun ini, Presiden meminta untuk dari sisi APBN membuat simulasi stress test, kalau seandainya kondisi global dalam situasi yang tidak membaik," ujarnya dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.

Stress test bertujuan untuk meng-

ukur ketahanan sebuah sistem keuangan dalam menghadapi skenario ekonomi terburuk. Melalui simulasi ini diharapkan APBN dapat memitigasi berbagai risiko yang masih dihadapi tahun depan serta dapat membuat APBN tahun 2023 tetap terjaga dan berkelanjutan di tengah tekanan global.

"Ini yang sedang terus kami finalkan. Tadi kami membuat beberapa skenario mengenai kondisi tahun depan apabila gejolak akan berlangsung lebih besar dari yang kami asumsikan," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan, RAPBN 2023 dirancang untuk mampu bertahan di tengah guncangan pere-

Istana Negara, 25 Agustus 2021

RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI



konomian global dan gejolak ketidakpastian yang sangat tinggi.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga meminta APBN bisa dijaga tetap kredibel, berkelanjutan, dan sehat. "Oleh karena itu, APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber," tutup Bendahara Negara itu.

Sri Mulyani menjelaskan, Dana Moneter Internasional (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen di tahun ini.

Lembaga ini pun memproyeksikan pelemahan ekonomi masih akan berlanjut di tahun depan. IMF memperkirakan ekonomi global hanya akan tumbuh 2,9 persen di 2023 mendatang. "Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru mening-

kat," ungkap dia.

IMF memperkirakan inflasi global akan naik mencapai 6,6 persen di negara-negara maju dan 9,5 persen di negara-negara berkembang pada 2022. Lonjakan inflasi yang sangat tinggi di negara maju tersebut, telah memicu pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas, yang memacu keluarnya aliran modal asing (capital outflow) dan volatilitas di sektor keuangan.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi, pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) agar kebijakan fiskal dan moneter bisa sejalan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri. Kami bersama Pak Gubernur BI terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel, namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi kebijakan

fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural," ujarnya.

Nah, seperti apa bentuk uji ketegangan untuk mengelola angka inflasi tahun depan? Salah satunya adalah menambah jumlah uang beredar. Peninggi kebijakan moneter Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan petinggi kebijakan fiskal Menteri Keuangan yang juga Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan mengharapkan ridho Allah yang Maha Kuasa pada hari ini 18 Agustus 2022, saya Perry Wajiyto Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi meluncurkan 7 pecahan rupiah kertas tahun emisi 2022 sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah republik Indonesia," kata Gubernur Bank Sentral Perry Warjiyo, dalam Peluncuran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 pada Kamis,

• INFO KHUSUS

18 Agustus 2022.

Rincian uang kertas baru itu terdiri atas pecahan uang rupiah kertas Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2000, dan Rp 1000. Ketujuh pecahan Uang TE 2022 tersebut secara resmi berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan bertepatan pada HUT-77 Kemerdekaan RI.

Peluncuran ini menjadi wujud komitmen BI menyediakan uang rupiah berkualitas dan terpercaya untuk masyarakat Indonesia. "Sebagai sim-

gakan.

"Rupiah tidak sekedar mata uang, ini sebuah mata uang yang menggambarkan perjalanan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 1946. Uang Rupiah Republik Indonesia dilahirkan dan berlaku. Waktu itu disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta," jelasnya.

Sebagai Informasi, pecahan uang kertas baru terdiri dari Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000, dan Rp 1000. Dalam

harga bahan bakar minyak jenis tertentu. Lebih dari itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan tantangan berat dalam menahan harga BBM bersubsidi.

"APBN menahan harga BBM itu menjadi tantangan pada kuartal II 2022," ungkap Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis, 18 Agustus 2022.

Pemerintah menyatakan telah menaikkan subsidi energi dari hanya

Asumsi Dasar Ekonomi Makro



Pendapatan Negara mempertimbangkan kebijakan penerimaan yang tidak berulang dan harga komoditas yang diperkirakan termoderasi

Belanja Negara diarahkan untuk mendukung reformasi struktural untuk peningkatan produktivitas serta penguatan akses dan kualitas layanan publik

(598,2) Rp
(2,85%) PDB

Pembiayaan Anggaran dilakukan dengan dukungan sumber yang lebih inovatif dan efisien termasuk pemanfaatan SAL



■ Pendapatan Negara ■ Belanja Negara ■ Defisit Anggaran ■ Pembiayaan Anggaran

bol kedaulatan pemersatu bangsa, kami mengajak semua komponen masyarakat bangga dan paham rupiah. Mari kita terus kobarkan optimisme, semangat kebangsaan dan komitmen pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju," jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan ada berbagai cerita dan narasi mengenai kebangsaan bangsa Indonesia dalam lembaran uang baru tersebut. Rupiah sendiri adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, Sri Mulyani menambahkan sudah selayaknya rupiah dihormati dan dibang-

uang kertas yang baru, gambar pahlawan, kemudian tarian, pemandangan alam, dan flora masih dipertahankan.

Tak ada penegasan bahwa peluncuran rupiah emisi baru itu adalah bagian dari stress test gelagat inflasi. Namun jelas, salah satu pengertian inflasi adalah peningkatan jumlah uang beredar beriringan dengan kenaikan harga dalam periode tertentu. Letak stress testnya adalah apakah rupiah emisi 2022 akan memacu laju inflasi sepanjang sisa 2022 pada akhirnya.

Uji ketegangan lain terkait inflasi ini adalah ingar-bingar potensi kenaikan

Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun. Dana itu digunakan untuk menahan harga BBM jenis Pertalite dan Solar, LPG, serta listrik dengan daya di bawah 3.500 VA di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia. Saat ini, harga minyak mentah dunia memang mulai melandai. Namun, masih tetap tinggi di area US\$90 per barel.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghitung ulang kemampuan APBN dalam menahan harga. "Pertalite, Pertamina, Solar, LPG, listrik ini bukan harga yang sebenarnya,

bukan harga keekonomian. Ini harus kita tahu, untuk menahan agar inflasi tidak tinggi (kami menggelontorkan subsidi Rp502 triliun). Tapi apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," ungkap Jokowi.

Alhasil, terlihat gelagat inflasi itu berbeda-beda menurut provinsi. Jokowi mengemukakan, setidaknya ada lima provinsi yang diminta untuk berhati-hati karena laju inflasinya sudah berada di atas lima persen. Angka lima persen adalah patokan laju inflasi nasional setahun per Juli 2022 yang tercatat 4,94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015.

Ia menyebutkan, kelima provinsi yang inflasinya tertinggi yakni Jambi sebesar 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, serta Aceh sebesar 6,97 persen. "Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen, lalu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, dan Aceh. Tolong ini dilihat secara detil yang menyebabkan ini (inflasi tinggi) apa?" ujarnya dalam arahan di Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022.

Presiden pun menyatakan, bakal meninjau langsung ke daerah-daerah guna mengecek laju inflasinya. Jokowi meminta, untuk seluruh kepala daerah mengetahui kinerja inflasi di wilayahnya guna mencari solusi yang tepat agar inflasi bisa terkendali. "Provinsi harus tahu posisi inflasinya di angka berapa. Nanti saya ke daerah, ketika saya tanya jangan gelagapan enggak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa," tegas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta untuk para gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia bisa bekerja sama dengan tim pengendali inflasi, baik di daerah maupun pusat, dalam upaya mengendalikan laju inflasi. "Saya ingin bupati, walikota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi. Tanyakan di daerahnya apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi, bisa saja beras, bisa saja bawang merah, bisa saja cabe, dan dicek," kata Jokowi.

Semuanya masih dalam uji ketegangan hingga akhir 2022. Sedangkan pemerintah berupaya menekan inflasi

itu dengan jurus perlindungan sosial (Perlinsos). Hingga akhir 2022, anggaran perlinsos diperkirakan meningkat menjadi Rp502,64 triliun untuk pemberian bantuan antara lain PKH kepada 10 juta KPM, Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM, subsidi listrik kepada 38,5 juta pelanggan, program Kartu Prakerja kepada 2,9 juta peserta, serta bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) kepada 7,5 juta KPM.

Selain itu, anggaran perlinsos juga digunakan untuk memberikan penyalangan perlinsos kepada masyarakat miskin dan rentan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, antara lain melalui: (i) penambahan pemberian BLT Minyak Goreng kepada

program bagi lansia dan disabilitas, serta dukungan pelaksanaan perlinsos yang adaptif terhadap krisis.

Sebagian besar anggaran perlinsos dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu melalui K/L dan Non-K/L. Program perlinsos melalui K/L dialokasikan antara lain melalui Kementerian Sosial sebesar Rp74,20 triliun antara lain untuk pelaksanaan PKH bagi 10 juta KPM dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM. Kemudian Kementerian Kesehatan sebesar Rp46,53 triliun melalui bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN, Kemendikbud Ristek sebesar Rp20 triliun melalui Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah



23 juta penerima; dan (ii) Bantuan PKL Warung dan Nelayan kepada 2,76 juta pedagang kaki lima, pemilik warung dan nelayan di 212 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebagai upaya lanjutan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.

Anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp479,10 triliun pada RAPBN 2023. Targetnya adalah menjadi daya ungkit pengentasan kemiskinan dan kerentanan utamanya melalui perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan perlinsos sepanjang hayat termasuk penguatan

bagi 908,9 ribu mahasiswa, Kementerian Agama sebesar Rp2,56 triliun melalui Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 67,8 ribu mahasiswa.

Sedangkan anggaran perlinsos melalui Non-K/L sebesar Rp311,87 triliun dengan alokasi antara lain melalui program pengelolaan subsidi sebesar Rp289,29 triliun untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 Kg, subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana. Belum lagi melalui transfer ke daerah dalam bentuk BLT Desa.

Masih belum yakin juga dengan upaya meredam inflasi pada 2023? Kita lihat saja dulu hasil uji ketegangan (stress test) hingga akhir 2022. ●

BERAS

Gunawan Effendi

Pengakuan itu akhirnya datang juga. Indonesia menerima penghargaan atas kesanggupannya berswasembada beras membentuk sistem ketahanan pangan dari International Rice Research Institute (IRRI) atau lembaga penelitian padi internasional. Penghargaan itu resminya adalah Acknowledgment for Achieving Agri-Food System Resiliency and Rice Self Sufficiency During 2019-2021 Through the Application of Rice Innovation Technology.

Presiden Joko Widodo menerima langsung penghargaan itu dari Direktur Jenderal IRRI Jean Balie di Istana Negara Jakarta pada Minggu, 14 Agustus 2022. Yang perlu dicatat pula adalah kehadiran Rajendra Aryal Kepala Perwakilan Organisasi Pangan di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (Food and Agriculture Organization) untuk Indonesia dan Timor Leste.

Penghargaan ini menjadi lebih bersejarah bukan saja karena beriringan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan, melainkan juga lantaran pengakuan Indonesia berswasembada beras sebelumnya sudah berlalu hampir 40 tahun. Pada 38 tahun lalu, FAO yang mengakui Indonesia berswasembada beras untuk pertama kalinya.

Maka tak mengherankan ketika menyampaikan pidato sambutan atas penghargaan ini, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada banyak pemangku kepentingan swasembada beras dan sistem ketahanan pangan nasional.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia, atas kerja kerasnya tentu saja, para bupati, para gubernur, Kementerian Pertanian yang semuanya bekerja sama dengan riset-riset dari universitas-universitas, perguruan tinggi yang kita miliki. Ini adalah kerja yang terintegrasi, kerja bersama-sama, kerja gotong-rojong, bukan hanya milik kementerian saja.

Dan terakhir, kita juga harus terus mendorong ini agar kita tidak hanya memproduksi yang bisa kita konsumsi oleh rakyat kita saja, tetapi nanti apabila produksinya meningkat kita juga harus mulai masuk ke pasar-pasar ekspor.

Diversifikasi pangan. Hati-hati, kita tidak hanya tergantung pada beras, tetapi harus kita mulai untuk jenis-jenis

bahan pangan yang lainnya. Telah kita mulai kemarin di Waingapu sorgum, di NTT sorgum. Kemudian di beberapa provinsi jagung juga besar-besaran, yang dulu tujuh tahun yang lalu kita harus impor 3,5 juta ton jagung, hari ini kita hanya impor kira-kira 800 ribu (ton). Ini sebuah lompatan yang sangat besar sekali. Dan kita harapkan dengan terus-menerus kita konsentrasi ke sana insyaallah kita sudah tidak impor jagung lagi dalam dua-tiga tahun mendatang, seperti beras yang sudah tiga tahun kita tidak impor.

Di tengah ancaman krisis pangan di tingkat global, sekali lagi pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi, menjamin ketercukupan pangan di dalam negeri, dan sekaligus memberikan kontribusi bagi kecukupan pangan dunia."

Begitu ungkapan Presiden Jokowi selain berterima kasih kepada IRRI dan FAO yang memberikan dukungan dalam upaya Indonesia berswasembada beras dan mengembangkan sistem ketahanan pangan nasional. Terlebih lagi, banyak tantangan yang mengadang upaya itu dan memerlukan penyesuaian dan inovasi agar swasembada berkesinambungan dan berkelanjutan.

Soal tantangan untuk kesinambungan dan keberlanjutan swasembada beras itu bukan asal bunyi. Salah satu tantangan, misalnya, biaya produksi beras di Indonesia yang mencapai sekitar 700-800 dolar AS per ton dibandingkan dengan Vietnam yang

tercatat kurang dari separuhnya, di kisaran 300 dolar AS per ton. Alhasil, daya tarik impor memang jauh lebih besar. Tantangan lain adalah usia rata-rata petani yang menghasilkan beras. Lebih dari separuh yang bekerja di sawah-ladang ternyata berusia di atas 45 tahun. Pada konteks ini bolehlah kita mengingat ulang antropolog Clifford Geertz yang meneliti petani di kawasan aliran Kali Brantas, Jawa Timur, pada pertengahan Abad XX lalu.

Menurut Geertz, petani harus bekerja keras, berkubang lumpur, dan membanting tulang untuk menghasilkan padi bukanlah tragedi. Di mana-mana petani ya kerap menderita begitu. "Tapi, tragedinya adalah mereka menderita tanpa ada faedahnya," tandasnya.

Nah, menghindarkan petani dari penderitaan tanpa faedah merupakan bagian penting untuk menjamin kesinambungan dan keberlanjutan swasembada pangan dan akhirnya sistem ketahanan pangan nasional. ●



nfo indonesia

www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

Network



INFO PASANG
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel



Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

 www.infoindonesia.id
 [@infoindonesia.id](https://www.facebook.com/infoindonesia.id)  [@_infoindonesia](https://twitter.com/_infoindonesia)
 [@info_indonesia.id](https://www.instagram.com/info_indonesia.id)  [YouTube : infoindonesiatv](https://www.youtube.com/infoindonesiatv)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

nfo indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

EDISI #23 AGUSTUS 2022

77 PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT



Dirgahayu
REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2022